

DISERTASI

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, INFLASI, SUKUBUNGA
KREDIT, TERHADAP INVESTASI, BELANJA PUBLIK, BELANJA RUTIN,
DAN PERTUMBUHAN EKONOMI PADA ERA OTONOMI DAERAH
DI KALIMANTAN TIMUR

THE EFFECT OF REGIONAL ORIGINAL INCOME, INFLATION, INTEREST RATE
OF CREDIT, TO INVESTMENT, PUBLIC EXPENDITURE, ROUTINE
ROUTINE EXPENDITURE, AND ECONOMIC GROWTH IN THE LOCAL GOVERNMENT
IN EAST Kalimantan

JUNARDI



No.	Nama	Alamat
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2010

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, INFLASI, SUKU BUNGA
KREDIT, TERHADAP INVESTASI, BELANJA PUBLIK, BELANJA RUTIN,
DAN PERTUMBUHAN EKONOMI PADA ERA OTONOMI DAERAH
DI KALIMANTAN TIMUR**

Disertasi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Doktor

Program Studi

Ilmu Ekonomi

Disusun dan diajukan oleh

JIUHARDI

kepada

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2010

DISERTASI

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, INFLASI, SUKU BUNGA KREDIT,
TERHADAP INVESTASI, BELANJA PUBLIK, BELANJA RUTIN, DAN
PERTUMBUHAN EKONOMI PADA ERA OTONOMI DAERAH
DI KALIMANTAN TIMUR**

Disusun dan diajukan oleh :

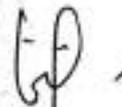
JIUHARDI

P0500307029

Telah Disetujui Oleh
Tim Promotor



Prof. Dr. H. A. Karim Saleh
Promotor



Prof. Dr. Hj. Rahmatia, MA
Ko-Promotor

Ketua Program Studi
Ilmu Ekonomi PPS-UNHAS



Prof. Dr. H. Djabir Hamzah, MA



Direktor Program Pascasarjana
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. dr. Abdul Razak Thaha, M.Sc

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : JIUHARDI

Nomor Mahasiswa : P0500307029

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan disertasi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima saksi atas perbuatan tersebut.

Makassar , 16 Februari 2010

Yang menyatakan



JIUHARDI

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, atas AnugrahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini dengan baik yang merupakan salah satu syarat dalam rangka penyelesaian pendidikan Doktor pada Program Studi Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari dalam menyelesaikan analisa dan pembahasan hasil penelitian ini telah banyak dibantu dan dibimbing dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan penghargaan serta ucapan terima kasih, kepada :

1. **Prof. Dr. H. Karim Saleh**, selaku Promotor, yang setia membantu memberikan arahan dan petunjuk serta motivasi yang sangat berharga sejak rencana penyusunan proposal hingga selesainya disertasi ini.
2. **Prof. Dr. Hj. Rahmatia, MA** selaku Ko-promotor, yang banyak memberi semangat dan diskusi inspiratifnya yang sangat membantu penulis terutama masukan-masukan untuk teori-teori ekonomi yang sangat membantu dalam proses penyelesaian disertasi ini
3. **Prof. Dr. dr. H. Idrus. A. Paturusi**, Rektor Universitas Hasanuddin.
4. **Prof. Dr. H.M. Ali, M.Si**, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, yang selama ini selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan studi pada seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
5. **Prof. Dr. H. Djabir Hamzah, MA.**, selaku Ketua Program Studi Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi Universitas Hasanudin, yang sangat kooperatif dan memudahkan mahasiswa di dalam mengurus administrasi kemahasiswaan.
6. Bapak dan Ibu Penguji **Dr. Andi Munarfah, MS, Prof. Dr. H. Latanro, Prof. Dr. I Made Benyamin, M.Ec, Dr. H. Madris, DPS., SE., M.Si, dan Prof. Dr. H. Muh. Yunus Zain, MA.** Salam hormat penulis untuk tim penguji yang sangat kooperatif dalam proses koordinasi dan bimbingan, yang mempersilahkan dan menyediakan waktu dimanapun penulis ingin menghadap setiap saat dan memberikan dukungan moril yang luar biasa bagi penulis.
7. **Pengelola Pascasarjana Universitas Hasanuddin**, yang memberikan dukungan dan membantu selama penulis dari awal kuliah hingga akhir.

8. **Bapak Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr**, selaku Rektor Universitas Mulawarman telah memberikan motivasi dan kesempatan kepada penulis untuk studi program Doktor di Universitas Hasanuddin.
9. **Prof. H. Zamruddin Hasid, SE., SU** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman yang telah memberikan motivasi dan kesempatan kepada penulis untuk studi program Doktor di Universitas Hasanuddin.
10. Seluruh Bupati Kabupaten Kota yang telah memberikan data dan informasi melalui Badan Pusat Statistik Kabupaten Kota masing-masing.
11. Istri tercinta dan tersayang **Marilin, SE** serta anak-anakku tersayang **Rima, Indira Reisia Angun, dan Cristine Triana Jimah** yang penuh pengertian, kesabaran memberikan semangat, dorongan dan doa selama menempuh studi sampai terselesainya disertasi ini.
12. Ayahanda **Djuk Djalung** dan Ibunda **Sulo Alung** yang telah bersusah payah membesarkan, mendidik dan menyekolahkan dan berdoa untuk saya sehingga dapat menyelesaikan studi ini.
13. Mertua Bapak **Lah Njau** dan Ibu **Luhung Apui (Alm)**, yang telah memberikan motivasi dan doa untuk saya sehingga dapat menyelesaikan studi ini.
14. Saudara-saudara penulis, **Eriani, Angun, Lenjau, Saman, Jani** dan **Juga** yang telah memberikan dorongan dan semangat selama menempuh studi ini.
15. **Ipar, Keluarga Martinus Apui, Keluarga Elviati Uyang, S.sos., M.Si,** Keluarga Merang Lah, Keluarga Ding Usat, Keluarga Balu Ipai, dan Keluarga Limpau yang telah memberikan bantuan, dorongan dan semangat selama menempuh studi ini.
16. Keponakan penulis, **Keluarga Pai Bilung, Keluarga Yonathan, Dorkas Inoq dan Carolina Impung, Ediyono, dan Apriati Uleh** yang telah memberi dorongan dan semangat selama menempuh studi ini.
17. Sahabat saya, **Irwansyah, Irwan Gani, A. Lanang, H. Syahrudin, Muh. Rum, Murtiadi A., dan Arifin Kalibe** yang memberikan bantuan dan motivasi sehingga studi ini dapat diselesaikan.
18. Teman-teman seangkatan dari kelas Samarinda, **Ledy Setiawati, Hj, Siti Amalia, Arfiah B., Annisa Kusumawardani, Hj. Musvianti, Hj, Yana Ulfah, Hj. Indah Martati**, serta teman-teman seangkatan dari Ambon dan Makassar.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang dengan tulus ikhlas telah memberikan bantuan moril dan materil serta mendoakan keberhasilan penulis.

Akhir kata penulis mengharapkan kritik, saran membina dan masukan dari pembaca untuk menyempurnakan penulisan dan penelitian ini selanjutnya, karena *"TIADA GADING YANG TAK RETAK"*, semoga Tuhan Yesus melimpahi Anugerahnya pada kita semua, amien.

Makassar, 2010

JIUHARDI

ABSTRAK

JIUHARDI. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Inflasi, dan Suku Bunga Kredit terhadap Investasi, Belanja Publik, Belanja Rutin, dan Pertumbuhan Ekonomi pada Era Otonomi Daerah di Kalimantan Timur (dibimbing oleh Karim Saleh dan Rahmatia).*

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis pengaruh PAD, inflasi, dan suku bunga kredit terhadap Pertumbuhan Ekonomi baik langsung maupun tidak langsung melalui investasi, belanja publik, dan belanja rutin.

Data yang digunakan adalah data sekunder berupa data Pendapatan Asli Daerah (PAD), inflasi, suku bunga kredit dan investasi (Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA)), besar belanja publik dan besar belanja rutin dan pertumbuhan ekonomi selama kurun waktu tahun 2000 sampai dengan tahun 2007. Model yang digunakan adalah persamaan struktural yang bermanfaat untuk mengamati pengaruh keterkaitan yang bersifat langsung maupun yang tidak langsung antara eksogen dan endogen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Bunga kredit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja rutin berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.



ABSTRACT

JIUHARDI. *The Effect of Regional Original Revenue, Inflation, and Credit Interest on Investment, Public Spending, Routine Spending and Economic Growth at the Regional Autonomous Era in East Kalimantan* (supervised by Karim Saleh and Rahmatia).

The aim of the study was to analyze the effect of regional original revenue, inflation, and credit interest on economic growth through investment, public spending and routine spending.

The data used were secondary data obtained from regional original revenue, inflation, credit interest and domestic investment and foreign investment, public and routine spending and economic growth for the period of 2000-2007. The model applied was structural equation to observe the effect of the relationship exogenously and endogenously.

The results of the study indicate that the regional original revenue, investment, public spending and routine spending have a positive and significant effect on economic growth, but inflation and credit interest have a negative and significant effect on economic growth.



ABSTRAK

JIUHARDI. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Inflasi, Suku Bunga kredit terhadap Investasi, Belanja Publik, Belanja Rutin dan pertumbuhan Ekonomi pada Era Otonomi Daerah di Kalimantan Timur (dibimbing oleh Karim Saleh dan Rahmatia)*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pengaruh PAD, Inflasi, Suku Bunga kredit terhadap Pertumbuhan Ekonomi baik langsung maupun tidak langsung lewat Investasi, Belanja Publik, Belanja Rutin.

Data yang digunakan adalah data sekunder berupa data *Pendapatan Asli Daerah (PAD), Inflasi, Suku Bunga Kredit dan Investasi (Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA)), besar Belanja Publik dan besar Belanja Rutin dan Pertumbuhan Ekonomi* selama kurun waktu dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2007 .

Model yang digunakan adalah persamaan struktural yang bermanfaat untuk mengamati pengaruh keterkaitan yang bersifat langsung maupun yang tidak langsung antara eksogen dan endogen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi , Bunga kredit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, Belanja Publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, Belanja Rutin berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi .

Kata kunci : PAD, Inflasi, Suku Bunga kredit , Investasi, Belanja Publik, Belanja Rutin dan pertumbuhan Ekonomi

DAFTAR SINGKATAN DAN SIMBOL

Singkatan

APBD	:	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
BBM	:	Bahan Bakar Minyak
BI	:	Bank Indonesia
BPS	:	Biro Pusat Statistik
DAK	:	Dana Alokasi Khusus
DAU	:	Dana Alokasi Umum
DBH	:	Dana Bagi Hasil
GDP	:	Gross Domestic Product
IHK	:	Indeks Harga Konsumen
Kaltim	:	Kalimantan Timur
LDR	:	Loan Deposit Ratio
LPE	:	Laju Pertumbuhan Ekonomi
NCD	:	Non-Core Deposits
NPL	:	Non Performing loan
PAD	:	Pendapatan Asli Daerah
PADS	:	Pendapatan Asli Daerah Sendiri
PDB	:	Produk Domestik Bruto
PDRB	:	Produk Domestik Regional Bruto
q-t-q	:	Quarter to quarter
UNDP	:	Nation Development Program
y-o-y	:	Year on Year

DAFTAR SINGKATAN DAN SIMBOL

Simbol

- X_1 = Pendapatan Asli Daerah
- X_2 = Inflasi
- X_3 = Suku Bunga Kredit
- Y_1 = Investasi
- Y_2 = Belanja Publik
- Y_3 = Belanja Rutin
- Y_4 = Pertumbuhan Ekonomi
- α_0 = konstanta untuk Y_1
- β_0 = konstanta untuk Y_2
- δ_0 = konstanta untuk Y_3
- Ω_0 = $\psi_0 + \psi_4\alpha_0 + \psi_5\beta_0 + \psi_6\delta_0$ = konstanta untuk Y_4
- α_1 = Pengaruh langsung X_2 terhadap Y_1
- α_2 = Pengaruh langsung X_3 terhadap Y_1
- β_1 = Pengaruh langsung X_1 terhadap Y_2
- β_2 = Pengaruh langsung X_2 terhadap Y_2
- δ_1 = Pengaruh langsung X_1 terhadap Y_3
- δ_2 = Pengaruh langsung X_2 terhadap Y_3
- ψ_1 = Pengaruh langsung X_1 terhadap Y_4
- ψ_2 = Pengaruh langsung X_2 terhadap Y_4
- ψ_3 = Pengaruh langsung X_3 terhadap Y_4
- ψ_4 = Pengaruh langsung Y_1 terhadap Y_4
- ψ_5 = Pengaruh langsung Y_2 terhadap Y_4

- Ψ_6 = Pengaruh langsung Y3 terhadap Y4
 $\Psi_4\alpha_1$ = Pengaruh tak langsung X₂ terhadap Y₄ melalui Y₁
 $\Psi_4\alpha_2$ = Pengaruh tak langsung X₃ terhadap Y₄ melalui Y₁
 $\Psi_5\beta_1$ = Pengaruh tak langsung X₁ terhadap Y₄ melalui Y₂
 $\Psi_5\beta_2$ = Pengaruh tak langsung X₂ terhadap Y₄ melalui Y₂
 $\Psi_6\delta_1$ = Pengaruh tak langsung X₁ terhadap Y₄ melalui Y₃
 $\Psi_6\delta_2$ = Pengaruh tak langsung X₂ terhadap Y₄ melalui Y₃
 Ω_1 = $(\Psi_1 + \Psi_5\beta_1 + \Psi_6\delta_1)$ = Pengaruh total X₁ terhadap Y₄
 Ω_2 = $(\Psi_2 + \Psi_4\alpha_1 + \Psi_5\beta_2 + \Psi_6\delta_2)$ = Pengaruh total X₂ terhadap Y₄
 Ω_3 = $(\Psi_3 + \Psi_4\alpha_2)$ = Pengaruh total X₃ terhadap Y₄
 ϵ_1 = *Error term* dari Y₁
 ϵ_2 = *Error term* dari Y₂
 ϵ_3 = *Error term* dari Y₃
 μ_1 = $(\Psi_4\epsilon_1 + \Psi_5\epsilon_2 + \Psi_6\epsilon_3 + \epsilon_4)$ = *Error term* dari Y₄

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI	iii
PRAKATA	iv
ABSTRACT	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR SINGKATAN DAN SIMBOL	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	39
C. Tujuan Penelitian	40
D. Manfaat Penelitian	41
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	42
A. Teori Pertumbuhan Ekonomi	42
B. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal Investasi	52
C. Pendapatan Asli Daerah	64
D. Inflasi	73
E. Tingkat Suku Bunga	80
F. Penelitian Terdahulu	82
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN	112
A. Kerangka Konseptual	112
B. Hipotesis Penelitian	126

BAB IV METODE PENELITIAN	127
A. Jenis dan Rancangan Penelitian	127
B. Instrumen Penelitian	128
C. Populasi dan Sampel Penelitian	129
D. Metode Pengumpulan Data	130
E. Metode dan Alat Analisis	132
F. Defenisi Operasional Variabel dan Pengukuran	144
BAB V HASIL PENELITIAN	148
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	148
B. Gambaran Umum PAD, Inflasi, Suku Bunga, Investasi, Belanja Publik, Belanja Rutin dan Pertumbuhan Ekonomi	162
C. Hubungan Fungsional PAD, Inflasi, Suku Bunga Kredit, Investasi, Belanja Publik, Belanja Rutin dan Pertumbuhan Ekonomi	163
1. Pengaruh Inflasi dan Suku Bunga Kredit terhadap Investasi	164
2. Pengaruh PAD dan Inflasi terhadap Belanja Publik	165
3. Pengaruh PAD dan Inflasi terhadap Belanja Rutin	166
4. Pengaruh PAD, Inflasi, Suku Bunga Kredit, Investasi, Belanja Publik, dan Belanja Rutin terhadap Pertumbuhan Ekonomi	167
D. Pengaruh Langsung, Tidak Langsung dan Total Pengaruh PAD, Inflasi, Suku Bunga Kredit, Investasi, Belanja Publik dan Belanja Rutin terhadap Pertumbuhan Ekonomi	171
1. Pengaruh langsung (<i>Direct Effect</i>)	171
2. Pengaruh Tidak Langsung	173
3. Pengaruh Total	175

BAB VI PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	176
A. Pengaruh PAD dan Inflasi terhadap Belanja Publik	176
1. Pengaruh PAD terhadap Belanja Publik	176
2. Pengaruh Inflasi terhadap Belanja Publik	178
3. Dampak dan Implikasi Pengaruh PAD dan Inflasi terhadap Belanja Publik	179
B. Pengaruh PAD dan Inflasi terhadap Belanja Rutin	185
1. Pengaruh PAD terhadap Belanja Rutin	185
2. Pengaruh Inflasi terhadap Belanja Rutin	186
3. Dampak dan Implikasi Pengaruh PAD dan Inflasi terhadap Belanja Rutin	187
C. Pengaruh PAD, Inflasi , Suku Bunga Kredit, Investasi, Belanja Publik, dan Belanja Rutin terhadap Pertumbuhan Ekonomi	191
1. Pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi	191
2. Pengaruh Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi	193
3. Pengaruh Tingkat Bunga Kredit terhadap Pertumbuhan Ekonomi	194
4. Pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi	195
5. Pengaruh Belanja Publik terhadap Pertumbuhan Ekonomi	196
6. Pengaruh Belanja Rutin terhadap Pertumbuhan Ekonomi	197
7. Dampak dan Implikasi Pengaruh PAD, Inflasi , Suku Bunga Kredit, Investasi, Belanja Publik, dan Belanja Rutin terhadap Pertumbuhan Ekonomi	197
D. Pengaruh Inflasi , Suku Bunga Kredit terhadap Investasi	206
1. Pengaruh Inflasi terhadap Investasi	206
2. Pengaruh suku bunga kredit terhadap Investasi	207
3. Dampak, Implikasi Pengaruh Inflasi , Suku Bunga Kredit terhadap Investasi	208

E. Implikasi Teoritis dan Empiris Hasil Penelitian	214
F. Keterbatasan Penelitian	214
BAB VII PENUTUP	215
A. Simpulan	215
B. Saran	217
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

TABEL	Halaman
1. Perkembangan Investasi di Indonesia Selama Periode 1990-2007.	29
2.1. Rekapitulasi Penelitian Terdahulu	110
3.1 Struktur Hubungan Antar Variabel Relevan (Rujukan Teori Antecedent Variable)	115
3.2 Struktur Hubungan Antar Variabel Relevan (Rujukan Teori Mediating Variable dan Consequent Variable)	116
3.3 Kedudukan Variabel Penelitian, Sifat Penelitian, Sifat Pengaruh antar Variabel dan teori/ Penelitian yang mendukung	125
4.1 Pengaruh Langsung antar Variabel	141
4.2 Pengaruh Tak Langsung antar Variabel	141
4.3 Pengaruh Total antar Variabel	142
5.1 Banyaknya Kecamatan, Desa / Kelurahan dan Luas Wilayah Menurut Kabupaten Kota th. 2006	150
5.2 Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Menurut Kabupaten/Kota (Rp) 2005 – 2006	159
5.3 Descriptive Statistics Variabel Penelitian	162
5.4 Hubungan Fungsional Variabel Bebas dengan Variabel Terikat	164
5.5 Pengaruh Tidak Langsung	173
5.6 Pengaruh Total	175
6.1 Intisari pengaruh PAD dan Inflasi terhadap Belanja Publik	184
6.2 Intisari pengaruh PAD dan Inflasi terhadap Belanja Publik	190

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	Halaman
1. Perkembangan Investasi di Indonesia selama Periode 1990–2007 (dalam persen terhadap PDB)	32
2. Perkembangan Ekspor Non Migas Kaltim	37
3. Kerangka Proses Berfikir	117
3.1 Model Konseptual Penelitian	119
3.2 Model Operasional Penelitian	120
5.3 Koefisien Estimasi Menurut Jalur	170

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan unsur penting dalam proses pembangunan wilayah di Indonesia karena pertumbuhan ekonomi yang menjadi indikator kesejahteraan masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi sampai saat ini masih merupakan target utama pembangunan dalam rencana pembangunan wilayah di samping pembangunan sosial. Melalui pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi tersebut diharapkan kesejahteraan masyarakat secara bertahap akan dapat ditingkatkan (Syafrizal, 2008). Kuznets (1966) dalam Jinghan (2002) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu wilayah untuk menyediakan semakin banyak barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya. Jinghan (2002) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan pertanda penting dalam kehidupan perekonomian, demikian juga Kuznets menunjukkan ciri-ciri pertumbuhan ekonomi modern yang muncul dalam analisa yang didasarkan pada produk nasional dan komponennya.

Masalah bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi sudah dibicarakan sejak klasik hingga sekarang. Peranan pemerintah dan uang yang diinvestasikan telah diperdebatkan sejak lama, bahkan sampai saat ini. Peranan pemerintah tercermin pada kebijakan moneter dan fiskal, dalam hal

ini termasuk kebijakan anggaran suatu negara. Sejalan dengan uraian itu, estimasi pertumbuhan ekonomi juga sudah lama diterima sebagai suatu indikator penting dari kinerja ekonomi secara keseluruhan dari suatu negara. Pertumbuhan ekonomi selanjutnya bisa didekomposisikan menurut sektor untuk mendapatkan kontribusi sektoral terhadap pembentukan PDRB. Sementara estimasi pertumbuhan ekonomi dalam suatu periode jangka panjang memperlihatkan besaran dan arah dari pertumbuhan ekonomi dari sebuah negara, komposisi sektoralnya memberi suatu gambaran mengenai posisi relatif dari sektor-sektor berbeda di dalam ekonomi negara tersebut. Suatu analisis terhadap perubahan-perubahan di dalam pertumbuhan ekonomi dan kontribusi dari sektor-sektor ekonomi dalam suatu periode tertentu memberikan suatu ukuran dari perubahan-perubahan struktural di dalam pola produksi dan jasa-jasa di dalam ekonomi.

Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai suatu proses pertumbuhan output perkapita dalam jangka panjang. Hal ini berarti, bahwa dalam jangka panjang, peningkatan kesejahteraan tercermin pada peningkatan output perkapita yang sekaligus memberikan banyak alternatif dalam mengkonsumsi barang dan jasa, serta diikuti oleh daya beli masyarakat yang semakin meningkat. (Boediono, 1992:1 - 2). Pertumbuhan ekonomi juga bersangkutan paut dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dapat dikatakan, bahwa pertumbuhan ekonomi menyangkut perkembangan yang berdimensi tunggal dan diukur dengan meningkatnya hasil produksi dan pendapatan. Dalam hal ini berarti terdapatnya kenaikan dalam pendapatan nasional yang

ditunjukkan oleh besarnya nilai Produk Domestik Bruto (PDB) atau PDRB pada skala Regional Propinsi.

Tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, yang dihitung dari Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan rata-rata tertimbang dari tingkat pertumbuhan sektoralnya, artinya apabila suatu sektor mempunyai kontribusi besar, namun pertumbuhannya lambat maka kondisi seperti ini akan menghambat tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sebaliknya jika sektor tersebut mempunyai kontribusi besar dan dibarengi dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi pula, maka sektor tersebut akan menjadi lokomotif perekonomian daerah. Berdasarkan data deret waktu dari BPS, sangat nyata sekali bahwa selama periode Orde Baru, ekonomi Indonesia telah mengalami suatu perubahan struktural yang besar dari suatu ekonomi dimana sektor pertanian memainkan suatu peran yang sangat dominan di dalam pembentukan/pertumbuhan PDRB Indonesia ke suatu ekonomi dimana sumbangan PDRB dari sektor tersebut menjadi sangat berkurang.

Pada tahun 1965, kontribusi pertanian tercatat sekitar 56 persen dan tahun 1997 tinggal 16 persen dari PDB, atau hanya sepertiga dari pangsa tahun 1965. Sementara itu industri manufaktur tumbuh sangat pesat pada kisaran 13 persen rata-rata per tahun selama periode 1975-1997. Ini membuat pangsa PDRB dari industri manufaktur naik dari sekitar 8 persen tahun 1965 melewati sektor pertanian tahun 1991, dan tahun 1995 menjadi sekitar 24 persen dari PDB Indonesia, tiga kali lebih besar dari pangsa tahun 1965. Biasanya, sektor-sektor sekunder lainnya seperti

konstruksi, transportasi, dan listrik, gas dan suplai air bersih, dan juga sektor-sektor tersier seperti keuangan dan jasa lainnya ikut berkembang mengikuti perkembangan industri, atau sektor-sektor sekunder (selain industri) dan tersier semakin penting dalam proses industrialisasi. Karena perkembangan industri dengan sendirinya menciptakan permintaan terhadap sektor-sektor non-primer tersebut. Perkembangan industri memerlukan infrastruktur seperti jalan-jalan raya, kompleks-kompleks industri dan gedung-gedung perkantoran, dan juga jasa-jasa keuangan dan penyewaan (lisensi). Sektor jasa juga menunjukkan suatu tren yang positif selama periode tersebut. Pembangunan nasional mengusahakan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, yang pada akhirnya memungkinkan terwujudnya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat. Strategi ini dikenal dengan Trickle down effect yang merupakan teori yang diagungkan dan dipakai oleh pemerintahan Soeharto saat menjalankan program pembangunan ekonomi nasional. Soeharto mendahulukan menggenjot pertumbuhan ekonomi, namun mengabaikan pemerataan. Strategi trickle down effect mengasumsikan perlunya memprioritaskan pertumbuhan ekonomi terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan pemerataan.

Dalam kenyataannya di banyak negara, termasuk di Indonesia, teori ini gagal menciptakan kemakmuran untuk semua, yang tumbuh dan berkembang besar adalah pengusaha-pengusaha yang dikenal sebagai kroni Soeharto. Bisnis membesar dan menggurita menghasilkan konglomerasi. Sedangkan, sebagian besar masyarakat Indonesia justru

tertinggal dalam kemiskinan. (Susanto,dkk : 2009). Di jaman sekarang, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melaksanakan pembangunan lima tahun ke depan yang mengacu pada keserasian dan keseimbangan antar pertumbuhan dan pemerataan atau Growth with Equity. Strategi ini merupakan koreksi atas kebijakan pembangunan terdahulu yaitu untuk mewujudkan pembangunan dan pemerataan secara bersamaan dalam sebuah strategi yang pro-growth, pro-job, dan pro-poor dalam pembangunan ekonomi nasional. Dengan triple track strategy ini, pembangunan ekonomi nasional dilakukan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, melalui peningkatan investasi dan perdagangan dalam dan luar negeri. Pembangunan ekonomi juga ditujukan untuk menciptakan lapangan kerja dengan memutar sektor riil, dan bersamaan dengan itu, pembangunan ekonomi di fokuskan untuk mengurangi kemiskinan melalui kebijakan revitalisasi pertanian dan pedesaan, serta program-program pro-rakyat. (Susanto,dkk : 2009).

Pertumbuhan ekonomi bersangkutan paut dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dapat dikatakan, bahwa pertumbuhan ekonomi menyangkut perkembangan yang berdimensi tunggal dan diukur dengan meningkatnya hasil produksi dan pendapatan. Dalam hal ini berarti terdapatnya kenaikan dalam pendapatan nasional yang ditunjukkan oleh besarnya nilai Produk Domestik Bruto (PDB) atau PDRB pada skala Regional Propinsi. Indikator lain, yaitu pendapatan per kapita dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi ini (Kuncoro,2004; Gaspersz dan Feonay, 2003). Indikator ini lebih

komprehensif dalam mengukur pertumbuhan ekonomi dikarenakan lebih menekankan pada kemampuan negara/daerah untuk meningkatkan PDB/PDRB agar dapat melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Indikator ini secara simultan menunjukkan apakah pertumbuhan ekonomi yang terjadi mampu meningkatkan kesejahteraan seiring dengan semakin cepatnya laju penambahan penduduk.

Reformasi yang dimulai beberapa tahun lalu di Indonesia telah merambah ke seluruh aspek kehidupan. Salah satu aspek reformasi yang dominan adalah aspek pemerintahan. Aspek pemerintahan yang dimaksud disini adalah aspek hubungan pemerintah pusat dengan daerah. Pada aspek ini isu yang mencuat adalah adanya tuntutan otonomi yang lebih luas dan nyata yang harus diberikan kepada daerah. Oleh karenanya sejak tanggal 1 Januari 2001 Bangsa dan Negara Indonesia memulai babak baru dalam penyelenggaraan pemerintahan, dimana otonomi daerah dilaksanakan di seluruh Dati II (kota dan kabupaten). Hampir seluruh kewenangan pemerintah pusat diserahkan pada daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah. Menurut United Nation Development Program (UNDP) bentuk-bentuk desentralisasi dalam era otonomi daerah adalah sebagai berikut; desentralisasi administratif, desentralisasi fiskal, desentralisasi politik, dan desentralisasi pelayanan.

Reformasi yang diwujudkan dengan pelaksanaan otonomi daerah, diharapkan tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar dana perimbangan

yang diperoleh, tetapi juga perbaikan dan perubahan terhadap pengelolaan keuangan daerah, agar mampu memberikan aspek keadilan, transparansi, rasional, partisipatif dan bertanggung-jawab dalam pelaksanaannya.

Perdebatan yang mengemuka di kalangan para praktisi ekonomi berkaitan dengan desentralisasi fiskal telah berlangsung cukup lama. Isu utama yang menarik untuk senantiasa didiskusikan adalah mengenai keterkaitan antara desentralisasi fiskal dengan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat, yakni pertumbuhan ekonomi. Terdapat ambiguitas mengenai hubungan antara dua variabel tersebut yakni apakah pertumbuhan ekonomi merupakan dampak dari desentralisasi fiskal atau justru sebaliknya. Bahl dan Linn (1992) berpendapat bahwa pendelegasian sebagian urusan keuangan publik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan konsekuensi dari pencapaian taraf hidup masyarakat yang lebih baik. Pernyataan ini didukung oleh dua argumen sebagai berikut. Pertama, *median vote theory* yang memaparkan tentang respon dunia usaha atas selera dan preferensi masyarakat daerah. Pelayanan publik disesuaikan dengan kehendak dan permintaan masyarakat setempat. Kedua, *fiscal mobility theory* yang menggambarkan tingkat mobilitas penduduk antardaerah yang dipicu oleh tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi. Perbaikan kualitas hidup orang akan mendorong mereka untuk memilih daerah yang menyediakan pelayanan publik yang lebih baik.

Bertolak belakang dari pendapat di atas bahwa sebelumnya, Oates (1993) menegaskan bahwa tingkat kemajuan ekonomi merupakan *outcome* dari kesesuaian preferensi masyarakat dengan Pemerintah Daerah yang

tercipta karena makin pentingnya peran Pemda dalam otonomi daerah. Secara teori, pendelegasian fiskal kepada pemerintah yang berada di level bawah diperkirakan memberikan peningkatan ekonomi mengingat pemerintah daerah memiliki kedekatan dengan masyarakatnya dan mempunyai keunggulan informasi dibandingkan dengan pemerintah pusat, sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang benar-benar dibutuhkan di daerahnya. Respon yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap tuntutan masyarakat jauh lebih cepat karena mereka berhadapan langsung dengan penduduk daerah/kota yang bersangkutan.

Argumentasi lain yang mendasari adalah munculnya 'kompetisi' atau persaingan antar daerah akan meningkatkan kesamaan pandangan antara apa yang diharapkan oleh masyarakat dengan suatu program yang dijalankan oleh pemerintahnya. Apabila pertumbuhan ekonomi daerah bervariasi dengan adanya perbedaan level desentralisasi fiskal, maka hal ini mengindikasikan bahwa pengeluaran pemerintah daerah mampu memacu pembangunan daerah melalui penyediaan sarana dan prasarana umum. (Davoodi dan Zou, 1998). Sejalan dengan hal tersebut, Oates (1993) berpendapat bahwa pembangunan ekonomi suatu daerah akan berimbas pada penciptaan sektor publik di daerah. Lebih lanjut dikatakan bahwa desentralisasi fiskal berpotensi memberikan kontribusi dalam bentuk peningkatan efisiensi pemerintahan dan laju pertumbuhan ekonomi. Disamping itu, berdasarkan hasil analisis atas 58 negara ditemukan bahwa rendahnya tingkat desentralisasi fiskal akan mereduksi tingkat pendapatan per kapita masyarakat .

Di era otonomi ini tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tidak akan memberikan arti apabila tidak diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Daerah didorong untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengumpulkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan maksud agar subsidi dari pemerintah pusat dapat dikurangi dan mengurangi beban APBN. Otonomi daerah berlaku di Indonesia berdasarkan UU 22/1999 (direvisi menjadi UU 32/2004) tentang Pemerintahan Daerah memisahkan dengan tegas antara fungsi Pemerintahan Daerah (Eksekutif) dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif). Berdasarkan pembedaan fungsi tersebut, menunjukkan bahwa antara legislatif dan eksekutif terjadi hubungan keagenan (Halim, 2001; Halim & Abdullah, 2006). Pada pemerintahan, peraturan perundang-undangan secara implisit merupakan bentuk kontrak antara eksekutif, legislatif, dan publik. Undang undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 10, menegaskan bahwa kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, peradilan, moneter, fiskal, agama, dan pembangunan ekonomi secara makro. Di samping itu daerah berwenang mengelola sumberdaya nasional di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan hidup. Di wilayah laut kewenangan daerah meliputi: a) eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut tersebut (12 mil dari garis pantai), pengaturan kepentingan administratif, pengaturan tata ruang, penegakan

hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah Pusat. Kewenangan daerah kabupaten atau kota hanya sepertiga dari batas laut propinsi.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sedangkan penyelenggaraan tugas Pemerintah (Pusat) di Daerah dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, DPRD akan mengawasi kinerja pemerintah melalui anggaran. Bentuk pengawasan ini sesuai dengan *agency theory* yang mana pemerintah daerah sebagai agen dan DPRD sebagai prinsipal. Hal ini menyebabkan penelitian di bidang anggaran pada pemerintah daerah menjadi relevan dan penting.

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk propinsi maupun kabupaten dan kota. Proses penyusunan anggaran pasca UU 22/1999 (dan UU 32/2004) melibatkan dua pihak: eksekutif dan legislatif, masing-masing melalui sebuah tim atau panitia anggaran. Adapun eksekutif sebagai pelaksana operasionalisasi daerah berkewajiban membuat draft/rancangan APBD, yang hanya bisa diimplementasikan kalau

sudah disahkan oleh DPRD dalam proses ratifikasi anggaran. Penyusunan APBD diawali dengan membuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda). Dalam perspektif keagenan, hal ini merupakan bentuk kontrak (*incompletecontract*), yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif.

Anggaran sektor publik pemerintah daerah dalam APBD sebenarnya merupakan output pengalokasian sumberdaya. Adapun pengalokasian sumberdaya merupakan permasalahan dasar dalam penganggaran sektor publik (Key 1940 dalam Fozzard, 2001). Keterbatasan sumberdaya sebagai pangkal masalah utama dalam pengalokasian anggaran sektor publik dapat diatasi dengan pendekatan ilmu ekonomi melalui berbagai teori tentang teknik dan prinsip seperti yang dikenal dalam *public expenditure management* (Fozzard, 2001). Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah (Halim, 2001).

Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergeseran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan

harta tetap lainnya. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik, karena asset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Stine (1994) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik. Kedua pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik. Anggaran merupakan suatu alat perencanaan mengenai pengeluaran dan penerimaan (atau pendapatan) di masa yang akan datang, umumnya disusun untuk satu tahun. Di samping itu anggaran merupakan alat control atau pengawasan terhadap baik pengeluaran maupun pendapatan di masa yang akan datang (Musgrave 1970, dalam Suparmoko, 2002).

Sejak tahun 1967 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) di Indonesia disusun dan diberlakukan mulai tanggal 1 April sampai dengan tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Namun khusus untuk tahun 2000 tahun anggaran akan dimulai pada tanggal 1 April dan akan berakhir tanggal 31 Desember. Untuk tahun-tahun berikutnya tahun anggaran akan dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember, seperti yang pernah dijalankan sebelum tahun anggaran 1967 / 1968.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 (dan UU 32/2004) dinyatakan bahwa penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sedangkan dalam penyelenggaraan tugas Pemerintah (Pusat) di Daerah dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah adalah menyediakan barang dan jasa yang dampaknya bersifat lebih terbatas pada penduduk di suatu wilayah tertentu, seperti dalam hal penerangan jalan, mobil pemadam kebakaran, penyediaan lampu lalu-lintas dan lain sebagainya. Sedangkan kegiatan penyediaan barang publik yang mempunyai dampak sangat luas seperti pertahanan dan keamanan, keadilan serta kesehatan masyarakat, sebaiknya merupakan tanggung jawab pemerintah pusat.

Di samping itu pemerintah baik pusat maupun daerah wajib melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelayanan, pengaturan dan perlindungan terhadap masyarakat, pengelolaan kekayaan Negara, serta

pemanfaatan sumber daya alam. Dalam menjalankan tugasnya, Pemerintah Daerah memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit jumlahnya. Oleh karena itu Pemerintah Daerah juga perlu memahami dari mana sumber keuangan daerah itu akan diperoleh. Dalam Hal ini Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 (dan UU 32/2004) juga telah menyebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari: a) Pendapatan asli daerah yang berasal dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah, b) dana perimbangan, c) pinjaman Daerah, dan d) lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Seperti dengan anggaran pada umumnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selalu mempunyai dua sisi, yaitu sisi penerimaan atau sisi pendapatan dan sisi pengeluaran. Selanjutnya penerimaan atau pendapatan dikelompokkan menjadi penerimaan rutin dan penerimaan pembangunan; dan sisi pengeluaran juga dibedakan menjadi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Penerimaan rutin disebut sebagai penerimaan daerah yang terdiri dari pos pendapatan asli daerah sendiri (PADS), bagi hasil pajak dan bukan pajak, dan bagian dari sumbangan dan bantuan. Lebih rinci lagi yang dimaksud dengan PADS terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah, ditambah dengan keuntungan perusahaan daerah, serta penerimaan lain-lain yang sah seperti biaya perijinan, hasil dari kekayaan daerah dan sebagainya. Dalam hal penerimaan bagi hasil dapat berupa bagi hasil dari penerimaan pajak pemerintah pusat seperti dari PBB maupun dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor, maupun bagi hasil dari pungutan

kekayaan daerah seperti iuran hasil hutan. Selanjutnya bantuan dan ganjaran ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah pusat atau pemerintah propinsi. Di sisi pengeluaran ada pengeluaran rutin terutama untuk gaji pegawai dan belanja barang di samping untuk pembiayaan DPRD dan Kepala Daerah. Di samping pengeluaran rutin terdapat pengeluaran pembangunan untuk sektor-sektor. Pos pengeluaran pembangunan sektoral yang menonjol adalah untuk sektor transportasi, lingkungan hidup dan pendidikan. Pos-pos pengeluaran sektoral lainnya rata-rata kurang dari Rp. 2 Milyard.

Dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 menyatakan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari: a) pendapatan asli daerah yang berasal dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah, hasil perusahaan milik Daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, b) dana perimbangan, c) Pinjaman daerah, dan d) Lain-lain pendapatan yang sah. Adapun materi pokok yang berkaitan *dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah* dituangkan dalam Undang-Undang No.25 Tahun 1999 Bagian Ketiga, Pasal 6 yang menyatakan bahwa dana perimbangan terdiri dari: a) Bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan dari sumberdaya alam, b) Dana alokasi umum, dan c) Dana alokasi khusus.

Seperti halnya dengan pemerintah pusat yang menarik pajak untuk membiayai kegiatannya, maka pemerintah daerah juga menarik pajak untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah, di samping sumber-sumber pendapatan lainnya. Pendapatan daerah dapat berasal dari pendapatan asli

daerah sendiri, pendapatan asli daerah yang berasal dari pembagian pendapatan asli daerah, dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan pendapatan daerah lainnya yang syah. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak dan retribusi daerah, keuntungan perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah. Sebagai sumber pendapatan dari pemerintah daerah, Groves (1951) berpendapat bahwa setiap pajak harus memenuhi *Smith's cannons* yang meliputi: a) unsur keadilan (*equity*), b) unsur kepastian (*certainty*), c) unsur kelayakan (*convenience*), dan d) efisien (*economy*), dan e) unsur ketepatan (*adequacy*).

Di samping itu beberapa ahli keuangan daerah seperti halnya (Nick Devas, Brian Binder, Anne Booth, Kenneth Davey, dan Roy Kelly, 1989:58-90 dalam Suparmoko. 2002) mengusulkan beberapa tolok ukur untuk menilai keberhasilan pajak daerah. Tolok ukur tersebut dikaitkan dengan hasil (*yield*), keadilan (*equity*), daya guna ekonomi (*economic efficiency*), kemampuan melaksanakan (*ability to implement*), dan kecocokan sebagai sumber pendapatan daerah (*suitability as a local revenue source*).

Beberapa jenis pajak daerah yang menjadi sumber pendapatan pemerintah tingkat propinsi adalah a) pajak kendaraan bermotor, b) bea balik nama kendaraan bermotor, c) pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Selanjutnya macam pajak yang dipungut di daerah kabupaten/kota dan menjadi sumber pendapatan daerah kabupaten atau kota diantaranya adalah a) pajak hotel dan restoran, b) pajak hiburan, c) pajak reklame, d) pajak penerangan jalan, e) pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian

golongan c, f) pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, g) serta pajak lainnya dapat ditetapkan asal memenuhi persyaratan untuk menjadi pajak baru.

Adapun syarat-syarat menetapkan pajak baru adalah: a) pungutan itu harus bersifat pajak, artinya dapat dipaksakan dan balas jasanya tidak dapat langsung ditunjuk, b) obyek pajak dan dasar pajak yang baru tidak bertentangan dengan kepentingan umum, c) potensi pajak tersebut memadai artinya biaya pemungutannya tidak akan lebih besar daripada penerimaan pajaknya, d) pajak baru itu tidak berdampak ekonomi negatif, artinya tidak menyebabkan adanya alokasi faktor produksi yang salah dan menghambat pembangunan, e) pajak dikenakan sedemikian rupa dengan memperhatikan aspek keadilan (equity) dan kemampuan membayar (ability to pay) si wajib pajak, dan f) pajak yang dikenakan akan dapat menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Salah satu desentralisasi yang paling banyak disoroti dan paling berpengaruh terhadap perkembangan daerah adalah desentralisasi fiskal yang merupakan bagian penting dalam implementasi otonomi daerah. Kebijakan Fiskal pada dasarnya alat atau instrumen pemerintah yang sangat penting peranannya dalam sistem perekonomian. Instrumen fiskal itu berguna untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas basis kegiatan ekonomi berbagai sektor, dan secara khusus memperluas lapangan usaha untuk menurunkan tingkat pengangguran. Dengan kebijakan fiskal, pemerintah dapat memanfaatkan sumber daya ekonomi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan ekonomi yang

dikehendaknya. Kebijakan fiskal juga sekaligus sebagai kesempatan emas untuk memberikan sinyal, baik bagi pelaku ekonomi, dunia usaha, investor, maupun yang lainnya.

Keberhasilan otonomi daerah dianggap akan berhasil apabila dapat menciptakan kemandirian finansial daerah yang bersangkutan, sehingga mampu membiayai pengeluaran dan melakukan kewajiban daerah tanpa mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak, retribusi dan keuntungan perusahaan daerah harus dioptimalkan. Kemandirian keuangan daerah, tercermin pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah, yaitu semakin besarnya peranan PAD maka semakin besar pula derajat kemandirian keuangan daerah itu. Sebaliknya semakin rendah PAD, maka semakin kecil kemandirian keuangan daerah yang bersangkutan.

Selanjutnya, apabila sumber-sumber penerimaan daerah terbesar berasal dari Dana Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka pembangunan daerah yang bersangkutan sangat tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, yaitu dana Bagi Hasil Pajak (BHP) dan pembagian hasil bukan pajak (BHBP), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain kedua faktor tersebut didalam peningkatan percepatan pembangunan ekonomi daerah sangat ditentukan oleh investasi swasta yang berperan dalam menciptakan lapangan usaha, kesempatan kerja, dan meraih keuntungan sebagai hasil produksi barang dan jasa yang menimbulkan nilai tambah (*value added*) sehingga investasi swasta tersebut mampu menggerakkan perekonomian daerah.

Diperlukan strategi agar pembangunan daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang belum stabil. Salah satunya adalah dengan kebijakan-kebijakan fiskal daerah melalui berbagai kebijakan pengeluaran pemerintah (*government expenditure*). Masalahnya adalah tidak semua pemerintah daerah memiliki cukup sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi daerahnya. Ada yang tingkat kemampuan sumber daya keuangan, ada yang tinggi dan adapulah yang rendah. Hal tersebut sangat tergantung dari besaran penerimaan daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 33 tahun 2004 sumber-sumber penerimaan daerah adalah pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan. Dana Perimbangan keuangan Pusat-Daerah (PKPD) merupakan mekanisme transfer pemerintah pusat-daerah yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam (DBHP dan SDA), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Anggaran daerah (SILPA), pinjaman daerah, dana cadangan daerah dan privatisasi kekayaan daerah yang dipisahkan.

Hubungan fiskal antar pemerintah di Indonesia telah mengalami pasang surut dalam menemukan pola ideal yang merepresentasikan aspek keadilan, bukan hanya antara pemerintah pusat dan daerah namun juga antar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Ma (1996) melaporkan bahwa Indonesia pernah menerapkan praktik transfer fiskal yang tersentralisir terutama yang berkaitan dengan sistem perpajakan. Sejak mengadopsi pola

desentralisasi berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah, perkembangan ke arah desain *intergovernmental fiskal* yang lebih terdesentralisir dinilai sangat lamban oleh sebagian kalangan. Hal ini diperkuat oleh Silver et al. (2001:346) yang berpendapat bahwa pemerintah Orde Baru mempunyai kontrol yang cukup tinggi atas dana-dana yang akan dialokasikan kepada pemerintah daerah mengingat kala itu pemerintah pusat sangat meragukan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola urusan 'domestiknya'. Disamping itu terdapat anggapan bahwa pemerintah daerah kurang memiliki kompetensi administrasi agar bisa lebih independen dalam masalah keuangan.

Sebelum era baru desentralisasi fiskal digulirkan pada tahun 2001, setiap daerah tingkat I dan tingkat II memiliki dua jenis penerimaan guna membiayai pengeluaran mereka yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat (Alfirman 2003). Krisis politik dan ekonomi telah memicu pemerintah daerah untuk mengambil peran dan tanggung jawab yang lebih besar dalam mengatur urusan daerahnya masing-masing (Forrester and May, 1999). Fitriani et al. (2005) mengungkapkan bahwa menyusul lengseinya Presiden Soeharto, terdapat tekanan untuk mereformasi setiap kebijakan yang bernuansa korupsi, kolusi dan nepotisme. Salah satu contoh kebijakan yang dimaksud adalah beberapa daerah yang mempunyai sumber daya alam berlimpah namun memperoleh bagi hasil pendapatan yang tidak fair dari pemerintah pusat (Tadjoeddin et al. 2001). Untuk itu, Presiden Habibie yang meneruskan

estafet kepemimpinan bangsa, berinisiatif melakukan reformasi kebijakan menuju era desentralisasi dan demokratisasi (Fitriani et al. 2005).

Selanjutnya, pada tahun 1999 pemerintahan Habibie meluncurkan dua produk hukum fenomenal yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dua produk legislasi ini disusun untuk menciptakan otonomi antar daerah dan mendorong sistem pemerintahan yang lebih demokratis (Fane 2003:159). Dalam paradigma desentralisasi fiskal yang baru, propinsi dan kabupaten/kota mengambil alih semua peran pemerintah pusat kecuali lima hal yaitu pertahanan dan keamanan, kebijakan luar negeri, peradilan, kebijakan ekonomi makro dan perencanaan nasional (Fane 2003). Kerangka desentralisasi fiskal yang baru telah memungkinkan pula adanya pembentukan pemerintahan daerah yang baru. Fitriani et al. (2005) melaporkan bahwa sebelum tahun 2001, terdapat 336 kabupaten/kota di seluruh propinsi. Namun, jumlah ini meningkat tajam menjadi 434 daerah pada akhir tahun 2004.

Boediono (2002) memaparkan bahwa mengacu pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1999, di bawah era baru desentralisasi fiskal, setiap daerah mempunyai sumber penerimaan yang beragam. Pertama, sebagaimana dalam skema sebelumnya, pemerintah daerah mempunyai otoritas untuk memungut penerimaan pajak dan retribusi. Berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, Pemda diperkenankan menyusun instrument pendapatan daerah setelah memperoleh persetujuan dari pemerintah pusat.

estafet kepemimpinan bangsa, berinisiatif melakukan reformasi kebijakan menuju era desentralisasi dan demokratisasi (Fitriani et al. 2005).

Selanjutnya, pada tahun 1999 pemerintahan Habibie meluncurkan dua produk hukum fenomenal yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dua produk legislasi ini disusun untuk menciptakan otonomi antar daerah dan mendorong sistem pemerintahan yang lebih demokratis (Fane 2003:159). Dalam paradigma desentralisasi fiskal yang baru, propinsi dan kabupaten/kota mengambil alih semua peran pemerintah pusat kecuali lima hal yaitu pertahanan dan keamanan, kebijakan luar negeri, peradilan, kebijakan ekonomi makro dan perencanaan nasional (Fane 2003). Kerangka desentralisasi fiskal yang baru telah memungkinkan pula adanya pembentukan pemerintahan daerah yang baru. Fitriani et al. (2005) melaporkan bahwa sebelum tahun 2001, terdapat 336 kabupaten/kota di seluruh propinsi. Namun, jumlah ini meningkat tajam menjadi 434 daerah pada akhir tahun 2004.

Boediono (2002) memaparkan bahwa mengacu pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1999, di bawah era baru desentralisasi fiskal, setiap daerah mempunyai sumber penerimaan yang beragam. Pertama, sebagaimana dalam skema sebelumnya, pemerintah daerah mempunyai otoritas untuk memungut penerimaan pajak dan retribusi. Berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, Pemda diperkenankan menyusun instrument pendapatan daerah setelah memperoleh persetujuan dari pemerintah pusat.

Kedua, Pemda Tk. I dan II mendapatkan dana perimbangan yang lebih menguntungkan. Sebagai contoh penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang pendistribusiannya lebih banyak diperuntukkan pemerintah daerah yaitu sebanyak 90 persen. Sebagaimana telah diatur dalam UU No. 25 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No. 33 Tahun 2004, proporsi bagi hasil pendapatan baik pajak maupun sumber daya alam mulai menunjukkan pola yang fair dan lebih menguntungkan bagi pemerintah daerah.

Penjelasan-penjelasan di atas, memberikan pemahaman bahwa strategi pengelolaan keuangan daerah melalui Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah (APBD), idealnya diarahkan kepada dua sasaran. Pertama, secara eksternal kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang stabil melalui investasi. Kedua, secara internal diarahkan untuk menciptakan tingkat kemandirian keuangan daerah melalui pengurangan ketergantungan kepada dana transfer pemerintah pusat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara kontinyu dan terencana. Tingkat kemandirian keuangan daerah adalah salah satu tujuan tercapainya pelaksanaan otonomi daerah.

Untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal dan adanya kebutuhan pendanaan daerah yang cukup besar, pemerintah memberikan dana perimbangan dan salah satu komponen dana ini yang memberikan kontribusi terbesar adalah Dana Alokasi Umum. Dalam beberapa tahun berjalan, proporsi DAU terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibanding dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk PAD (Adi, 2006).

Seperti telah disinggung di atas bahwa tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah adalah menyediakan barang dan jasa yang dampaknya terlihat lebih terbatas pada penduduk di suatu wilayah tertentu, seperti dalam hal penerangan jalan, mobil pemadam kebakaran, penyediaan lampu lalu lintas dan sebagainya. Sedangkan kegiatan penyediaan barang publik yang mempunyai dampak yang sangat luas seperti pertahanan dan keamanan, keadilan serta kesehatan masyarakat, sebaiknya merupakan tanggung pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pasokan dana dari pemerintah pusat ini. Namun demikian, dalam jangka panjang, ketergantungan semacam ini harus menjadi semakin kecil. Berbagai investasi yang dilakukan pemerintah daerah diharapkan memberikan hasil positif yang tercermin dalam peningkatan PAD. Investasi dalam teori ekonomi didefinisikan sebagai pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan. Dengan perkataan lain dalam teori ekonomi investasi berarti kegiatan perbelanjaan untuk meningkatkan kapasitas produksi suatu perekonomian (Sukirno, 2005).

Komponen besar kedua dari pengeluaran selain konsumsi adalah investasi dalam bentuk perumahan, pabrik, dan mesin-mesin. Motivasi pokok dari investasi adalah mencari laba bersih, yaitu hasil dari periode ini dan periode yang akan datang. Dengan demikian kekuatan ekonomi utama yang menentukan investasi adalah hasil pengembalian investasi (yang

terutama dipengaruhi oleh siklus ekonomi), biaya investasi (yang ditentukan oleh kebijakan mengenai tingkat suku bunga dan perpajakan), serta perkiraan akan masa depan.

Oleh karena faktor-faktor penentu investasi sangat tergantung pada situasi masa depan yang sulit diramalkan, maka investasi merupakan komponen yang paling mudah berubah dalam pengeluaran agregat. Hubungan yang penting terlihat pada skedul permintaan investasi yang mengkaitkan tingkat pengeluaran investasi dengan tingkat suku bunga. Apabila keputusan proyek investasi didorong oleh keinginan memperoleh laba, maka kurva permintaan investasi akan memiliki kemiringan yang menurun. Tingkat suku bunga yang lebih tinggi akan mendorong perusahaan untuk menunda beberapa proyek investasi. Dalam proses pengambilan keputusan investasi, tingkat suku bunga riil menjadi unsur yang benar-benar relevan. Tingkat suku bunga riil menyesuaikan tingkat suku bunga nominal terhadap laju inflasi. Jadi, tingkat suku bunga riil sama dengan tingkat suku bunga nominal minus laju inflasi (Samuelson, 1996).

Berbeda dengan investasi perusahaan – yang mendasarkan investasi untuk tujuan mencari untung, investasi pemerintah didasarkan pada pertimbangan lain, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu investasi pemerintah selalu dinamakan juga sebagai investasi sosial karena kebanyakan dari perbelanjaan investasinya digunakan untuk menciptakan modal tetap sosial atau *social overhead capital*. Investasi-investasi seperti itu meliputi pembuatan jalan raya, pelabuhan dan irigasi, pendirian sekolah, dan rumah sakit serta membangun

bendungan-bendungan. Perlu diingat bahwa kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus-menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional, dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Sejalan dengan apa yang dikemukakan Samuelson, Sukirno (2005) mengatakan bahwa dalam pemikiran ahli-ahli ekonomi klasik, hubungan antara suku bunga dengan investasi mempunyai sifat yang sebaliknya, yaitu semakin tinggi suku bunga, semakin sedikit investasi yang akan dilakukan.

Analisis di atas menunjukkan bahwa dalam pemikiran ahli ekonomi klasik perubahan-perubahan suku bunga sangat penting peranannya dalam menentukan pola kegiatan ekonomi. Fleksibelitas suku bunga akan mempengaruhi komposisi pendapatan daerah yang diproduksi. Untuk menjalankan berbagai fungsinya dalam perekonomian daerah, maka biaya sangat diperlukan. Dana tersebut diperoleh terutama dengan memungut pajak dari masyarakat dan perusahaan. Adakalanya pemerintah membelanjakan uang sesuai dengan pendapatan yang diperolehnya dari perpajakan atau sumber pungutan lainnya. Apabila anggaran belanja pemerintah adalah demikian sifatnya, budget pemerintah dinamakan budget seimbang atau *balanced-budget*. Akan tetapi sering sekali pemerintah membelanjakan uang yang melebihi pendapatannya yaitu anggaran belanjanya mengalami defisit. Untuk menutupi kekurangan pembiayaan tersebut pemerintah akan meminjam dari tabungan masyarakat. Dengan demikian sekarang tabungan masyarakat akan diperebutkan di antara pemerintah dan penanam modal. Perubahan-perubahan akan berlaku atas

dasar suku bunga, jumlah investasi, tabungan dan komposisi pendapatan daerah.

Investasi merupakan unsur GDP yang paling sering berubah. Ketika pengeluaran atas barang dan jasa turun selama resesi, sebagian besar dari penurunan itu berkaitan dengan anjloknya pengeluaran investasi (Mankiew 2002). Para ekonom mempelajari investasi untuk memahami fluktuasi dalam *out put* barang dan jasa perekonomian dengan lebih baik. Model-model GDP yang pernah dipelajari seperti model IS-LM, didasarkan pada fungsi investasi sederhana yang mengaitkan investasi dengan tingkat bunga riil: $I = I(r)$. Fungsi itu menyatakan bahwa kenaikan tingkat bunga riil menurunkan investasi. Ada tiga jenis pengeluaran investasi. **Investasi tetap bisnis** (*business fixed investment*) mencakup peralatan dan struktur yang dibeli perusahaan untuk proses produksi. **Investasi residensial** (*residential investment*) mencakup rumah baru yang orang beli untuk tempat tinggal dan yang dibeli tuan tanah untuk disewakan. **Investasi persediaan** (*inventory investment*) mencakup barang-barang yang disimpan perusahaan di gudang, termasuk bahan-bahan dan persediaan, barang dalam proses, dan barang jadi.

Pemerintah harus memaksimalkan investasi lewat anggaran belanjanya dengan cara membangun infrastruktur menguntungkan dan mewujudkan iklim yang kondusif melalui serangkaian pembenahan kebijakan dan perbaikan institusi untuk menarik kegiatan berinvestasi di Indonesia terutama investasi swasta. Ekonomi biaya tinggi dapat pula dihindari dengan adanya pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur untuk

kelancaran arus dan distribusi dalam negeri serta peningkatan efisiensi dan efektivitas kegiatan usaha di Indonesia merupakan bagian dari peranan pemerintah dalam meningkatkan ekspor. Pengeluaran ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan bernegara, yaitu mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang selama ini diidam-idamkan. Ekspansi kredit perbankan utamanya kredit investasi dapat melalui penurunan tingkat suku bunga dan kebijakan-kebijakan pinjaman yang lain. Dengan berbagai kebijakan ini maka kecenderungan pengusaha untuk melakukan investasi juga semakin meningkat.

Penurunan investasi secara langsung berakibat pada rendahnya pertumbuhan ekonomi. Dari sisi lain lalu lintas modal masih terjadi pelarian, dimana arus modal keluar oleh swasta masih lebih besar bila dibandingkan arus modal masuk. Penurunan tingkat investasi ini disebabkan oleh beberapa hal, terutama stabilitas politik dan keamanan. Situasi keamanan yang belum membaik telah menghambat niat investor dalam dan luar negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Untuk itu pemulihan keamanan dan ketertiban serta stabilitas politik menjadi prasyarat bagi peningkatan investasi (Propenas, 2001).

Meningkatnya ekspor baik ekspor migas maupun non migas baik barang maupun jasa akan turut memacu pertumbuhan ekonomi dan menambah cadangan devisa. Oleh karena itu kebijakan perdagangan luar negeri pemerintah dan pengeluaran pemerintah diarahkan untuk mendukung upaya peningkatan daya saing global produk Indonesia serta meningkatkan

peran ekspor dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah berupa pengeluaran pembangunan seperti penyediaan fasilitas dan prasarana untuk mencapai efektivitas dan efisiensi perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Kebijakan untuk mendukung ekspor tersebut diantaranya penyederhanaan prosedur kepabeanan, peningkatan frekuensi dan optimisasi upaya diplomasi perdagangan baik bilateral maupun multilateral, serta mengurangi secara bertahap hambatan-hambatan dalam perdagangan luar negeri sesuai dengan komitmen nasional dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Melalui kebijakan tersebut, diharapkan mampu meningkatkan daya saing global yang akan berdampak terhadap ekspor Indonesia.

Berbagai upaya untuk memperbaiki tingkat pertumbuhan ekonomi telah dilakukan berbagai pihak, terutama oleh pemerintah, baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Salah satu upaya yang diandalkan untuk tujuan tersebut adalah berusaha merangsang adanya kegiatan investasi di berbagai bidang kegiatan ekonomi. Hal ini didasarkan pada semangat terminologi; *"There is no economic development without investment"*, yang bermakna bahwa investasi dianggap sebagai komponen penting yang menentukan kesuksesan pembangunan ekonomi suatu wilayah.

Domar (1957) menyatakan bahwa investasi sekarang mempunyai dua pengaruh. Pertama, investasi tersebut akan meningkatkan permintaan agregat saat ini. Kedua, investasi akan meningkatkan kapasitas produksi. Jika kapasitas ini tidak dipergunakan dengan baik (misalnya produsen tidak mau berinvestasi karena menganggap permintaan yang tidak cukup, dan

permintaan yang tidak cukup ini disebabkan oleh tingkat pertumbuhan yang tidak cukup), maka hal ini akan mengurangi investasi pada masa yang akan datang, sehingga kapital yang menganggur menjadi berlebihan dan membuat perekonomian mengalami depresi. Akan tetapi jika investasi meningkat dalam jumlah yang tepat, maka permintaan agregat akan meningkat (sebagai hasil dari peningkatan pendapatan, dan peningkatan pendapatan ini disebabkan oleh peningkatan investasi tersebut) dalam jumlah yang cukup untuk menyerap semua kapasitas produksi baru tersebut.

Gambaran terperinci mengenai perkembangan investasi di Indonesia selama periode 1990-2007, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat atau swasta dapat dilihat pada Tabel 1:

Tabel 1. Perkembangan Investasi di Indonesia Selama Periode 1990-2007.

Tahun	Rp. Trilyun			% terhadap PDB Harga Berlaku		
	Pemerintah	Masyarakat	total	Pemerintah	Masyarakat	total
1990	-10	4.8	-5.2	-5.1	2.5	-2.6
1991	-10.5	3.6	-6.9	-4.6	1.6	-3
1992	-11.1	5.4	-5.7	-4.3	2.1	-2.2
1993	-12.3	5.7	-6.6	-3.7	1.7	-2
1994	0.5	-8	-7.5	0.1	-2.1	-2
1995	4.9	-16.4	-11.5	1.1	-3.6	-2.5
1996	12.4	-31.4	-19	2.3	-5.9	-3.6
1997	25.7	-40.2	-14.5	4.1	-6.4	-2.3
1998	-2	43	41	-0.2	4.5	4.3
1999	-11	89.1	78.1	-1	8.1	7.1
2000	-16.4	45.5	29.1	-1.3	3.6	2.3
2001	-5.8	80.9	75.1	-0.4	5.6	5.2
2002	-34.7	95	60.3	-2.2	5.9	3.7
2003	-43.6	103.9	60.3	-2.2	5.2	3
2004	-34.8	38.3	3.5	-1.5	1.7	0.2
2005	-68.5	149.6	81.1	-2.5	5.4	2.9
2006	-34.7	124.3	89.6	-1	3.7	2.7
2007	-38.3	138.8	100.5	-1	3.5	2.5
Rata-rata						
90-97	-0.1	-9.6	-9.7	-1.3	-1.3	-2.5
98-07	-29.0	90.8	61.8	-1.3	4.7	3.4
90-07	-16.1	46.2	30.1	-1.3	2.1	0.8
KV Volatilitas						
90-97	205	116.7	34.1	181.1	100.3	28.7
98-07	217.2	128.6	725.7	194.9	102.5	451.3
90-07	205.7	120.1	551.6	183.5	98.8	342.8

Keterangan: Volatilitas merupakan standar deviasi dari pertumbuhan. Koefisien variasi volatilitas yang dihitung dari volatilitas dibagi rata-rata pertumbuhan (nilai

absolut). Sumber: Dirangkum dan diolah dari Buku Repelita VI, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) berbagai tahun, Laporan Perekonomian Indonesia (Bank Indonesia) berbagai tahun

Investasi merupakan langkah awal kegiatan produksi. Dengan posisi tersebut, investasi pada hakekatnya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya, dalam upaya menumbuhkan perekonomian, setiap negara senantiasa berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi. Sebagai penyangga pertumbuhan ekonomi, perkembangan investasi di Indonesia menunjukkan keadaan yang menggembirakan. Pada tahun 2007, total investasi di Indonesia mencapai Rp 983,9 trilyun (atas dasar harga berlaku). Angka ini hampir tujuh belas kali lipat dibandingkan investasi pada tahun 1990 yang sebesar Rp 58,9 trilyun.

Investasi tersebut dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat/swasta. Meskipun demikian, peranan investasi pemerintah relatif kecil. Dari total investasi pada tahun 2007, hanya 12,75 persen (Rp 125,4 trilyun) yang merupakan investasi pemerintah, sedangkan sebagian besar lainnya (87,25 persen atau Rp 858,5 trilyun) merupakan investasi masyarakat. Selain itu, jika dilihat selama periode 1990–2007, perkembangan investasi pemerintah juga relatif lebih lambat dibandingkan investasi masyarakat. Total investasi masyarakat pada tahun 2007 hampir dua puluh dua kali lipat dibandingkan investasi masyarakat pada tahun 1990,

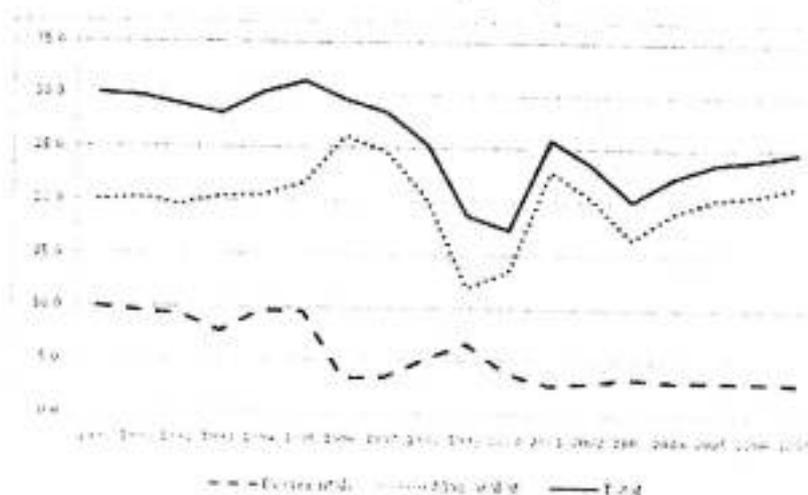
sedangkan investasi pemerintah tahun 2007 hanya sekitar enam kali lipat dibandingkan keadaan tahun 1990.

Tabel 1 juga menunjukkan bahwa perkembangan investasi baik investasi pemerintah maupun masyarakat relatif berlanjut, meskipun pada tahun 1997, Indonesia sebagaimana negara-negara Asia lainnya mengalami krisis ekonomi yang cukup parah. Hal ini terlihat dari rata-rata investasi yang tetap lebih tinggi pada periode setelah krisis (1998–2007) dibandingkan periode sebelum krisis (1990–1997).

Namun demikian, jika dilihat lebih jauh, rata-rata investasi yang lebih tinggi ini ternyata juga diikuti oleh koefisien variasi volatilitas (volatilitas yang sudah disesuaikan terhadap nilai rata-rata pertumbuhan) yang lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa perkembangan investasi di Indonesia pada periode setelah krisis lebih berfluktuasi dibandingkan periode sebelum krisis. Fakta lebih tingginya fluktuasi investasi ini terutama terlihat pada investasi masyarakat. Investasi pemerintah memang menunjukkan kondisi penurunan volatilitas pada periode setelah krisis. Namun, karena proporsi investasi pemerintah terhadap investasi total relatif kecil, kondisi ini hampir tidak mempengaruhi volatilitas investasi secara keseluruhan. Selanjutnya, jika dibandingkan investasi terhadap PDB Indonesia, dapat dikemukakan bahwa selama periode 1990-2007, rata-rata persentase investasi terhadap PDB adalah 25,7 persen, dengan persentase investasi pemerintah terhadap PDB sebesar 5,6 persen dan investasi masyarakat terhadap PDB sebesar 20,1 persen.

Membandingkan kondisi sebelum dan sesudah krisis menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan rata-rata persentase investasi terhadap PDB baik pada investasi pemerintah maupun masyarakat. Secara total, persentase investasi terhadap PDB menurun dari 29,6 persen pada periode sebelum krisis menjadi 22,6 persen pada periode setelah krisis. Investasi pemerintah turun dari 7,9 persen menjadi 3,8 persen, sedangkan investasi masyarakat turun dari 21,8 persen menjadi 18,8 persen. Selain penurunan persentase investasi terhadap PDB, fluktuasi setelah krisis juga menunjukkan peningkatan, yang terlihat dari peningkatan nilai koefisien variasi volatilitas. Bahkan dalam kasus investasi pemerintah, meskipun secara nilai menunjukkan penurunan volatilitas, tetapi sebagai persentase dari PDB, terjadi peningkatan dalam nilai volatilitasnya. Gambaran secara rinci mengenai perkembangan investasi sebagai persentase dari PDB di Indonesia selama periode 1990–2007 diberikan pada gambar 1 berikut:

Gambar 1. Perkembangan Investasi di Indonesia selama Periode 1990–2007 (dalam persen terhadap PDB).



Sumber: Diolah dari tabel diatas

Investasi, hakikatnya merupakan salah satu bagian dari perencanaan keuangan. Dalam pakem perencanaan keuangan, penghasilan bisa dibagi menjadi tiga peruntukkan, yakni konsumsi, menabung dan investasi. Di sini harus dibedakan antara menabung dan investasi. Menabung lebih bersifat berjaga-jaga. Ataupun bila memiliki tujuan tertentu biasanya tidak bersifat mengikat dan bisa terpakai untuk hal lain. Sedangkan investasi lebih untuk menghasilkan nilai tambah dari dana yang ditanamkan dan memiliki tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Secara teoritis, investasi memiliki peranan yang sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jika tidak ada investasi yang memadai maka tidak akan ada pertumbuhan ekonomi. Dan jika pertumbuhan ekonomi tidak memadai maka akan mengakibatkan kurangnya pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan dan penyerapan tenaga kerja.

Biasanya, peluang investasi datangnya dari dua jurusan yaitu lokal/domestik dan dari asing. Untuk melakukan investasi, investor (yang benar-benar punya dana) mempunyai dua pertanyaan mendasar, yaitu mau dialokasikan kemana dan apa tujuannya. Yang dimaksud dengan tujuan di sini adalah horizon investasi, yakni jangka pendek atau jangka panjang. Lalu apakah akan mencari hasil maksimal dengan konsekuensi resiko yang tinggi, atau hasil moderat dengan resiko sedang atau menginginkan resiko rendah tetapi hasilnya juga rendah. Disini tugas pemerintah memfasilitasi kejelian untuk memecahkan stagnasi investasi agar pertumbuhan bergerak lebih cepat sehingga kesempatan kerja lebih terbuka. Pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja yang mengarah pada peningkatan kerja melalui

peningkatan investasi, kesejahteraan masyarakat, merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam perekonomian Indonesia, khususnya Provinsi Kalimantan Timur

Pada Propinsi Kalimantan Timur terdiri dari 13 wilayah Kabupaten/Kota yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain. Perbedaan ini dapat meliputi luas wilayah, jumlah penduduk, sumber daya alam (SDA) yang dimiliki, sarana dan pra sarana transportasi serta hal lainnya, yang kemudian akan memberikan pengaruh bagi perkembangan masing-masing daerah tersebut. Oleh karena itu, dengan menggunakan pendekatan *tipologi Klassen* Bank Indonesia dapat melakukan suatu pemetaan terhadap kondisi seluruh kabupaten/kota tersebut sehingga dapat diketahui karakteristik dari masing-masing daerah tersebut. Pendekatan Bank Indonesia dengan *tipologi Klassen* saat itu menggunakan dasar pada PDRB perkapita yang dikombinasikan dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan tingkat kemiskinan di daerah. Data yang dipergunakan (karena kendala data): PDRB Kabupaten/Kota tahun 2005, dengan menghilangkan sektor pertambangan dan penggalan (migas dan tanpa migas) serta industri pengolahan (migas). Hal ini dimaksudkan agar setiap daerah memiliki tingkat perbandingan yang sama, karena kedua hal tersebut hanya dimiliki oleh beberapa daerah saja. Jumlah penduduk tahun 2005. Tingkat kemiskinan per daerah tahun 2005.

Dari *tipologi Klassen* perekonomian Kabupaten/Kota tersebut dapat terlihat bahwa daerah Kota, yaitu Samarinda, Balikpapan, Tarakan dan Bontang menjadi wilayah yang relatif cepat maju dibandingkan dengan

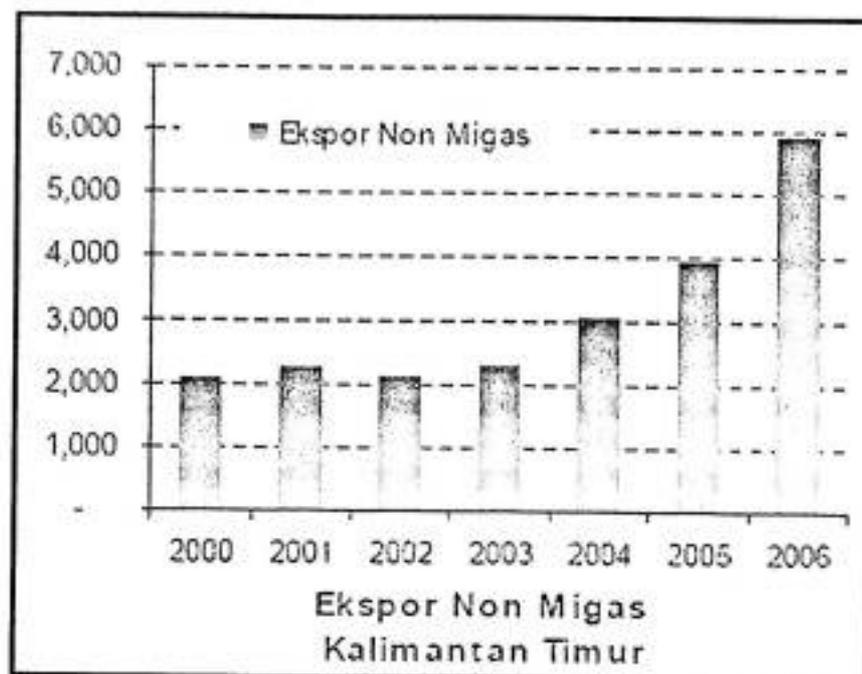
daerah yang secara administratif berbentuk Kabupaten. Beberapa hal yang menjadi keunggulan daerah Kota adalah wilayahnya yang relatif lebih kecil dibandingkan Kabupaten sehingga lebih mudah untuk dilakukan penataan dan ketersediaan sarana dan pra sarana penunjang, seperti transportasi, pendidikan, dan hiburan, yang lebih lengkap. Di sisi lain, masih terdapat 6 Kabupaten yang termasuk ke dalam daerah tertinggal, yang memerlukan perhatian lebih. Namun, dengan perkembangan perekonomian yang dicapai saat ini, Propinsi Kalimantan Timur masih harus menghadapi permasalahan yang mungkin juga dialami Propinsi lain di Indonesia, khususnya propinsi yang sedang berkembang, yang sedang melaksanakan pembangunan. Pembangunan tersebut tentunya memerlukan dana dalam jumlah yang besar.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan tersebut, telah dan akan dilaksanakan beberapa program pembangunan nasional di bidang ekonomi, yaitu: Pertama, menciptakan stabilitas ekonomi dan keuangan agar tercipta iklim yang kondusif bagi peningkatan investasi dan ekspor yang sangat penting bagi percepatan pemulihan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kedua, memacu peningkatan daya saing terutama untuk meningkatkan ekspor non migas, termasuk pariwisata, dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Ketiga, meningkatkan investasi dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi terutama berdasarkan ekuitas daripada berdasarkan pinjaman. Keempat, menyediakan sarana dan prasarana penunjang pembangunan ekonomi, seperti transportasi,

telekomunikasi, informatika, listrik, energi dan pertambangan, serta pengairan dan irigasi (Propenas, 2001).

Berdasarkan data tahun 2008, Kalimantan Timur sebagai propinsi maju kini semakin menjulang dengan beberapa peluang investasi yang terbuka dari segala penjuru. Pemerintah daerah cukup fokus dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan hambatan investasi sehingga Kalimantan tumbuh menjadi tumbuh menjadi propinsi dengan pembangunan yang maju dan berkualitas. Kemajuan Kaltim banyak ditopang oleh kekayaan sumber daya alam berupa minyak, gas alam dan batubara serta kayu yang dimiliki. Batubara dan kayu yang merupakan komoditas nonmigas dan sedang dibutuhkan Cina dan India ini mempunyai kecenderungan harga yang meningkat. Kondisi ini memberikan keuntungan pemasukan yang luar biasa bagi Kaltim karena perkembangan pertumbuhan ekspor nonmigas yaitu batubara dan kayu bergerak positif pesat seperti yang terlihat pada Gambar 2 dibawah ini

Gambar 2 : Perkembangan Ekspor non Migas Kaltim



Sumber Data : Bank Indonesia, 2008

Peningkatan ekspor nonmigas ini menunjukkan bahwa Kaltim sedang berada di puncak kejayaannya karena menginduksi sektor-sektor lainnya untuk tumbuh (Britany, 2008). Investasi di sektor migas dan non migas memang menjadi andalan bagi propinsi Kaltim. Proyek pengeboran sumber minyak dan galian diprioritaskan dengan mempergunakan teknologi maju dengan wacana kerjasama bagi hasil antara pemerintah daerah dengan pihak asing. Pungutan-pungutan liar diminimalkan dengan dibentuk tim pengawas di berbagai tempat pengeboran sehingga produk investasi di sektor tambang ini tidak mahal. Untuk menghindari ketergantungan dalam pemasukan sektor migas ini maka pemerintah daerah Kaltim tahun 2008 ini membuat proyek semacam fasilitasi pengembangan agribisnis kelapa sawit Kaltim yang didalamnya berkecimpung orang-orang ahli, para investor baik dalam maupun luar negeri, pemerintah daerah serta masyarakat sebagai

sumber daya yang dilatih dan dididik. Oleh karena itu, pemerintah daerah telah melakukan diversifikasi risiko bagi pengembangan investasi daerah terhadap investor maupun propinsi Kaltim sendiri.

Disisi lain investasi dan produksi serta usaha di Kaltim ini harus memperhitungkan besarnya risiko seperti naiknya harga komoditas secara terus menerus (inflasi) di Kalimantan Timur yang lebih tinggi inflasi nasional yaitu sekitar 11.06 persen untuk tahun 2008. Selain inflasi, dalam menumbuhkan investasi di Kaltim, Pemerintah daerah juga memperhitungkan tingkat bunga kredit yang mana saat ini Kaltim memiliki kredit macet sebesar 3.31 persen, padahal untuk bank umum penyaluran kredit usaha diupayakan sebesar 4 persen sedangkan investasi dengan pemberdayaan UKM, pemerintah daerah akan berupaya menyalurkan kredit melalui Bank Umum sebesar 68 persen (Britany, 2008).

Strategi dan kebijakan investasi dan pengelolaan keuangan daerah serta sumber PAD yang dikaitkan dengan strategi pembangunan daerah di atas, sangat menarik untuk diteliti di Kalimantan Timur, mengingat: 1) Kalimantan Timur adalah provinsi yang pertumbuhan ekonominya lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional, meskipun pertumbuhan ekonomi tersebut paling besar berasal dari kontribusi sektor non migas; 2) Kalimantan Timur adalah salah satu dari empat provinsi penyumbang penerimaan terbesar bagi negara, namun fasilitas infrastrukturnya masih jauh tertinggal dibandingkan provinsi-provinsi di Pulau Jawa; 3) Kalimantan Timur adalah salah satu provinsi penerima dana transfer pusat terbesar di Indonesia, namun tingkat kemandirian keuangannya relatif masih rendah

(PAD rendah), dan 4) Kalimantan Timur adalah provinsi yang kapasitas fiskalnya lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhan fiskalnya, sehingga Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperoleh sangat kecil, bahkan terdapat beberapa daerah yang bahkan tidak menerima DAU.

Oleh karena itu, penulis ingin mengadakan penelitian tentang Faktor-Faktor Penentu Pertumbuhan Ekonomi pada Era Otonomi Daerah di Provinsi Kalimantan Timur. Selain alasan tersebut, Kalimantan Timur dikenal sebagai daerah kaya sumber daya alam namun masih banyak juga masyarakatnya yang hidup dibawah garis kemiskinan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka secara rinci rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut

1. Apakah inflasi dan suku bunga kredit berpengaruh terhadap investasi di Daerah Propinsi Kalimantan Timur ?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Inflasi berpengaruh terhadap Belanja Publik di Daerah Propinsi Kalimantan Timur ?
3. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Inflasi berpengaruh terhadap Belanja Rutin di Daerah Propinsi Kalimantan Timur ?
4. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Inflasi, Suku bunga kredit, Investasi, Belanja Publik dan Belanja Rutin berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diajukan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Untuk mengetahui pengaruh inflasi dan suku bunga kredit terhadap investasi di Daerah Propinsi Kalimantan Timur
2. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Inflasi terhadap Belanja Publik di Daerah Propinsi Kalimantan Timur ?
3. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Inflasi terhadap Belanja Rutin di Daerah Propinsi Kalimantan Timur ?
4. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Inflasi, Suku bunga kredit, Investasi, Belanja Publik dan Belanja Rutin terhadap Pertumbuhan Ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung ?

D. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat yang dapat ditarik dari penelitian ini, antara lain adalah:

1. Penelitian ini dibangun modelnya berdasarkan tunjangan teori mapan yang telah ada dan studi-studi empiris yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti ataupun pakar dibidang ilmu ekonomi. Disamping teori mapan dan studi empiris yang menunjang pemodelan hubungan kausalitas tersebut, ada beberapa hubungan kausalitas yang jarang dan bahkan belum pernah diteliti secara komprehensif seperti halnya pengaruh inflasi terhadap belanja rutin daerah. Begitu juga halnya

pengaruh langsung belanja rutin daerah terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Namun dari pemahaman dan logika peneliti, hubungan kausalitas tersebut ada. Dengan demikian, maka kontribusi dan manfaat teoritis penelitian ini adalah mampu memberikan sumbangsih tambahan terhadap jajaran studi empiris hubungan kausalitas pengaruh PAD terhadap belanja rutin daerah dan pengaruh langsung belanja rutin daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

2. Memberikan kontribusi pemahaman hubungan kausalitas secara simultan dalam bidang ilmu ekonomi, khususnya bidang ilmu ekonomi regional dan ilmu ekonomi pembangunan.
3. Memberikan kontribusi dalam studi ekonomi pembangunan dan ekonomi regional khususnya pengujian secara empiris dalam hubungan kausalitas antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Inflasi Daerah, dan Suku Bunga Kredit Daerah di dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah secara langsung maupun tidak langsung melalui variabel Investasi, Belanja Publik, dan Belanja Rutin.
4. Memberikan kontribusi bagi agenda penelitian yang akan datang pada bangunan model teoritik yang secara keseluruhan belum diuji secara empirik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Sejak timbulnya pemikiran ekonomi modern pada abad ke-18, teori ekonomi terus berkembang yang ditandai dengan silih bergantinya penggunaan teori atau pendekatan baru. Berikut ini diuraikan tentang perkembangan teori pertumbuhan ekonomi, yang pada dasarnya terbagi kedalam lima periode. Kelima periode tersebut adalah periode 1776-1870; 1870-1914; 1914-1945; 1945-1970; 1970-1990 (Panetto dalam Machmud, 1996:22).

Adam Smith (Alkadri dalam Machmud, 1996:22), dalam bukunya yang berjudul *An Inquiry into the nature and Causes of the Wealth of Nations* (1776), berpendapat bahwa "penerapan kebijaksanaan *Laissez Faire* dapat memaksimalkan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat". Menurut Ricardo (1881) dalam bukunya yang berjudul *The Principles of Political Economy and Taxation* bahwa, "pertumbuhan ekonomi suatu negara berasal dari akumulasi modal". Ricardo (Alkadri dalam Machmud, 1996:23), lebih lanjut menyebutkan bahwa pola pertumbuhan ekonomi suatu negara akan berpola sebagai berikut : Pada mulanya kegiatan ekonomi suatu negara ditandai oleh jumlah penduduk yang rendah tetapi melimpah dengan kekayaan alamnya. Kondisi awal ini memberikan kesempatan kepada pengusaha untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya dengan menetapkan upah buruh yang murah, sehingga memungkinkan mereka

untuk memperbesar pembentukan modal. Modal tersebut diinvestasikan kedalam usahanya. Investasi ini sudah tentu akan meningkatkan produksi dan menambah permintaan terhadap tenaga kerja, yang selanjutnya menyebabkan upah naik. Kenaikan upah ini akan mendorong pertumbuhan penduduk. Disisi lain, karena luas tanah yang dimanfaatkan berada dalam kondidi tetap, maka kualitasnya akan menurun, sehingga tingkat keuntungan berkurang. Untuk mengatasi hal tersebut, kemajuan teknologi merupakan alternatif pemecahan.

Schumpeter (1911) dengan bukunya *The Theory of Economic Development*. Sejak tahun 1934, Schumpeter mengembangkan teorinya mengenai pembangunan dan faktor utama yang menentukan pembangunan ekonomi. Menurut Schumpeter (Sukimo,1985:281) bahwa, "Sistem kapitalisme merupakan sistem yang paling baik untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang pesat. Tetapi walaupun demikian, dalam jangka panjang, sistem kapitalis akan mengalami keadaan yang tidak berkembang.atau stagnasi". Lebih lanjut dikatakan bahwa : Pembangunan ekonomi suatu negara sangat ditentukan oleh inisiatif dari golongan pengusaha yang inovatif atau golongan entrepreneur, yakni golongan masyarakat yang mengorganisasi dan menggabungkan faktor-faktor produksi lainnya untuk menciptakan barang-barang yang diperlukan masyarakat. Mereka merupakan golongan masyarakat yang menciptakan inovasi atau pembaharuan dalam perekonomian. Pembaharuan yang diciptakan oleh pengusaha, dapat dibedakan kedalam lima golongan, yaitu *Invention* (penemuan teknik baru), jenis komoditi baru, perluasan pasar ke

daerah baru, organisasi usaha baru, dan pengembangan bahan mentah baru (Sukimo, 1985 : 283).

Schumpeter, membuat asumsi untuk memperlihatkan titik sentral peranan pengusaha, inovasi, dan teknologi dalam perekonomian. Asumsi Schumpeter itu adalah: pada mulanya perekonomian ditandai tanpa adanya perkembangan penduduk, tidak ada pembentukan modal tetapi terdapat pengangguran. Kondisi ini disadari oleh para pengusaha, yang selanjutnya akan meminjam modal dan membeli faktor-faktor produksi lainnya untuk menciptakan berbagai inovasi. Kegiatan tersebut mempertinggi pendapatan masyarakat dan menaikkan konsumsi mereka. Selanjutnya, peningkatan konsumsi akan memacu pengusaha untuk mempertinggi produksi dengan mengadakan penanaman modal baru yang dikenal dengan istilah investasi swasta. Pada tahap awal, hanya segelintir pengusaha yang melaksanakan inovasi, namun selanjutnya akan diikuti oleh pengusaha lain, sehingga menghasilkan kegiatan ekonomi yang makin tinggi. Setelah kondisi tersebut tercapai, kegiatan ekonomi berikutnya akan ditandai resesi (Alkadri dalam Machmud, 1996:25).

Keynes, 1936 yang menulis buku, *The General Theory of Employment, Interest and Money*. Dalam teorinya, ditekankan pentingnya peningkatan daya beli nyata dalam masyarakat yang bersumber dari konsumsi dan investasi. Selanjutnya Keynes mengemukakan bahwa investasi dapat dinaikkan melalui penurunan tingkat bunga dan peningkatan *Marginal Efficiency of Capital*, serta bekerjanya *multiplier*. Faktor lain yang menopang teori Keynes adalah *Marginal Propensity to Consume and to*

Save. Sebenarnya, Keynes tidak mengemukakan teori ekonomi pembangunan secara sistematis dan aspek ini dikembangkan kemudian oleh Harrod-Domar. Teori pertumbuhan yang diajukan Harrod-Domar pada hakekatnya berusaha memperlihatkan syarat-syarat yang diperlukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap mantap (*Steady Growth*). Untuk itu ia menekankan pentingnya peranan investasi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Investasi tersebut tidak hanya dalam pengertian sempit, tetapi harus dipandang sebagai suatu pengeluaran yang akan menambah kesanggupan perekonomian menghasilkan komoditi, dan pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakatnya. Singkatnya, pertumbuhan ekonomi baru akan berlangsung seandainya pengeluaran masyarakat mengalami peningkatan.

Harrod (1939) dan Tinbergen (1942), selanjutnya berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi nasional sangat dipengaruhi oleh modal, yang merupakan bagian dari output nasional. Akan tetapi, mereka mempunyai pandangan yang berbeda terhadap peran teknologi dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Tinbergen yakin bahwa teknologi dapat disubstitusi dengan buruh dan modal, sedangkan Harrod percaya bahwa buruh dan modal bersifat saling melengkapi satu dengan yang lainnya. (Firman dalam Machmud, 1996:27).

Kaldor (1957,1961,1962) mengajukan teori pertumbuhan ekonomi pada negara-negara yang sudah maju, yang berbeda dari apa yang dikemukakan oleh Tinbergen dan Harrod. Pada dasarnya model Kaldor merupakan kombinasi dari teori Keynes tentang *saving*, yakni *Rate of*

Growth sama dengan produk *Rate* keuntungan (*Profit Rate*) dan kecenderungan untuk menabung profit tersebut (*The Propensity to Save Out of Profits*) dan teknologi.

Tahun 1954, Lewis memperkenalkan sebuah teori tentang pembangunan ekonomi pada konteks terbatas. Lewis berargumentasi bahwa teori Keynes ataupun teori Neo-Klasik tentang teori pertumbuhan ekonomi yang ada pada saat itu, tidak dapat diterapkan pada negara dengan surplus tenaga kerja yang tidak terbatas. Basis model Lewis adalah ekonomi nasional negara yang terkebelakang dengan membagi menjadi dua sektor, yaitu sektor tradisional (*agriculture*) dan sektor modern (*industry*). Pertumbuhan dalam sektor-sektor industri dapat menyerap surplus tenaga kerja dalam sektor pertanian, sampai terjadi keseimbangan baru dengan asumsi bahwa tingkat upah pada sektor industri lebih tinggi dari pertanian. (Firman,1985:3).

Fei dan Renis tahun 1964 (dalam Firman,1985:4) mencoba mengkolaborasikan model Lewis tersebut, untuk mencari hubungan antara konsumsi yang dihasilkan oleh satu sektor dengan buruh pada sektor yang lain, antara investasi pada satu sektor dengan aset pada sektor yang lain, dan antara tenaga kerja dan modal.

Seorang ekonom lainnya, Leibenstein dalam (Todaro, 2003:166) mengemukakan suatu teori pertumbuhan ekonomi. Fokus model Leibenstein ini adalah hubungan antara output nasional dengan buruh disatu pihak, antara tingkat pertumbuhan penduduk dan pendapatan perkapita dilain pihak. Dalam hal ini, ia yakin bahwa pertumbuhan penduduk dan kenaikan

Income bersifat saling menyesuaikan antara satu dengan yang lainnya. Leinbentein menyarankan bahwa untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi, modal secara massal harus diinvestasikan pada seluruh sektor ekonomi secara serentak. Argumen ini pada dasarnya serupa dengan teori 'Big-Push' (Nurkse, 1953, dan Rosenstein-Rodan, 1943, 1957) dan (Firman, 1985:4-5).

Beberapa tahun sebelum Hirschman (1968) mengemukakan pandangannya, seorang ahli ekonomi Prancis bernama Francois Perroux melalui *Growth Poles Theory*, berpendapat bahwa pengembangan industri dan pertumbuhan tidak akan terjadi disemua tempat dalam seketika, pertumbuhan mulai muncul pada titik-titik atau kutub pertumbuhan dengan intensitas yang berbeda, dan menyebar melalui saluran yang luas, serta mempunyai pengaruh yang berbeda-beda pada keseluruhan ekonomi. Sedangkan Hoover, mengemukakan bahwa konsentrasi kegiatan ekonomi akan terjadi pada suatu tempat apabila di tempat tersebut terdapat keuntungan lokasi yang terdiri dari *Localization Economics and Urbanization Economics* (Sjafrizal dalam Machmud, 1996:32).

Berdasarkan teori di atas, jelas bahwa pada prinsipnya pertumbuhan akan terjadi hanyalah pada daerah yang mempunyai keuntungan komparatif, baik dari segi sumber daya alam, modal dan manusia. Akibat adanya perbedaan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, mengakibatkan tingkat pertumbuhan juga akan berbeda.

Tahun 1970-an, lahir metode baru tentang pertumbuhan regional yang dikenal dengan Metode *Shift-Share*. Metode ini menghendaki pengisolasian

efek dari struktur industri suatu daerah terhadap pertumbuhannya selama periode tertentu. Hal ini meliputi penguraian proses pertumbuhan suatu daerah yang dipengaruhi oleh sejumlah komponen, seperti tenaga kerja, penduduk, dan pendapatan.

Metode Analisis *Shift- Share*, pertama kali dipelopori oleh Jones dan Laser (1940, 1951) di Inggris, yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Dunn dan Perloff di Amerika Serikat, dalam rangka menganalisis pertumbuhan ekonomi wilayah di Amerika Serikat. Aplikasi metode ini pertama kali di Inggris dilakukan oleh Hemming (1963), selanjutnya diikuti oleh Brown (1968), Stilwel (1969), *Hunt Report on Intermediate Areas* (1969), dan *South East Economic Planning Council* (1969). Studi-studi ini, pada umumnya menganalisis tentang pertumbuhan regional di Inggris.

Stilwell dalam Glasson, (1974:96) telah mengalokasikan komponen-komponen *Shift* dan *Share* dari pertumbuhan *Employment Regional* di Inggris antara tahun 1959 dan tahun 1967, dengan menggunakan data statistik dari *Department of Employment and Productivity*. Hasil dari penelitiannya memperlihatkan empat daerah pertumbuhan *Employment* dalam ukuran mutlak dan persentase cukup tinggi, sedangkan daerah-daerah lainnya jauh tertinggal dibelakang. Pemahaman atas perbedaan pertumbuhan ini dapat diperoleh dengan mengidentifikasi komponen-komponen *Shift* dan *Share*.

Lucas (1979), menggunakan analisis *Shift-Share* untuk mengidentifikasi pertumbuhan sektor-sektor wilayah yang lamban di Indonesia dan Amerika Serikat. Di Indonesia, studi tentang analisis *Shift-*

Share telah dilakukan oleh Sugeng Budiharsono (1989), yang meneliti tentang transformasi struktur perekonomian Indonesia dengan periode data tahun 1979 dan tahun 1982.

Sugeng Budiharsono (1989:80) menyebutkan bahwa dari 26 propinsi di Indonesia (tidak termasuk Timor-Timur) terdapat 17 propinsi yang termasuk dalam pertumbuhan yang cepat, sedangkan sisanya 9 propinsi termasuk pada pertumbuhan yang lamban. Kesimpulan tersebut diperoleh dengan mengidentifikasi komponen-komponen *Shif- Share*.

Menurut Glasson (1974:96-97) bahwa analisis *Shift – Share* ini bukan merupakan teori pertumbuhan, namun pendekatan ini dapat melengkapi teori-teori lain yang lebih formal yang menitikberatkan hubungan antara struktur industri dengan pertumbuhan regional, dan memisahkan unsur-unsur pertumbuhan yang bersifat intern dan ekstern. Dengan mengadakan modifikasi dan menggunakan asumsi tertentu, metode ini masih tetap dapat digunakan sebagai metode penganalisaan yang lebih bermanfaat terutama dalam menganalisis pertumbuhan wilayah.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. Jadi perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output riil. Definisi pertumbuhan ekonomi yang lain adalah bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi bila ada kenaikan output perkapita. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kenaikan taraf hidup diukur dengan output riil per orang (Sukirno, Sadono, 1999).

Houston (dalam Soepono, 1993:65) menyebutkan bahwa analisis *Shift-Share* memiliki keterbatasan, baik secara teoritis maupun secara empirik. Keterbatasan-keterbatasan teoritik dari metode analisis *Shift-Share* antara: a) Analisis *Shift-Share* tidak lebih daripada suatu teknik pengukuran atau prosedur baku untuk mengurangi pertumbuhan suatu variabel wilayah menjadi komponen-komponen. Persamaan *Shift-Share* hanyalah suatu *Identity Equation*, yakni hanya merupakan suatu definisi. Jadi, tidak mempunyai implikasi-implikasi keprilakuan. Metode *Shift-Share* merupakan teknik pengukuran yang mencerminkan suatu sistem akunting dan teknik analistik; b) Komponen pertumbuhan nasional secara implisit mengemukakan bahwa tiap industri di suatu wilayah hendaknya tumbuh pada laju pertumbuhan ekonomi nasional atau dibebani laju pertumbuhan yang ekuivalen dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Selain terlalu sederhana, gagasan demikian dapat membuat kabur sebab-sebab pertumbuhan wilayah; c) Arti ekonomi dari dua komponen *Shift-Share* tidak dikembangkan dengan baik. Keduanya berkaitan dengan prinsip-prinsip ekonomi yang sama. Perilaku ekonomi yang melandasi kedua macam *Shift* tidak mudah dipisahkan dan dibedakan. Kedua komponen tersebut berkaitan dengan hal-hal yang sama, seperti penawaran dan permintaan, perubahan teknologi, dan perubahan lokasi, dan d) Teknik analisis ini secara implisit mengambil asumsi bahwa semua barang dijual secara nasional. Padahal tidak semua demikian. Bila pasar suatu barang bersifat lokal, maka barang itu tidak bersaing dengan wilayah-wilayah lain yang menghasilkan barang

yang sama atau tidak dapat berharap untuk memperoleh bagian dari kenaikan permintaan agregat.

Keterbatasan-keterbatasan secara empirik dari teknik analisis *Shift-Share* adalah sebagai berikut : a) Jumlah dari salah satu komponen *Shift* dengan data yang tidak agregat belum tentu sama dengan jumlah komponen *Shift*, yang sama menurut data agregat. Jadi hasil analisis ini tergantung pada tingkat rincian sektor-sektor; b) Hanya salah satu dari tiga komponen tergantung pada hal yang sebenarnya terjadi di suatu wilayah selama kurun waktu tertentu; c) Kritik lain terhadap analisis *Shift - Share* adalah masalah pembobotan. Kritik ini mengatakan bahwa tidak adanya penjelasan tentang perubahan dalam struktur ekonomi regional selama periode analisis. Untuk mengatasi masalah ini, ada yang menyarankan menghitung angka rata-rata antara tahun dasar dan tahun akhir analisis. Ada pula yang menggunakan kombinasi konveks dari angka-angka awal dan akhir sebagai analisis, dan d) Masalah lain adalah masalah pengaruh-pengaruh yang saling terkait. Selain itu, pengaruh keunggulan kompetitif bukanlah ukuran keunggulan yang sejati.

Todaro (1998) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat menjadi pekerjaan utama dan tumpuan perhatian utama para pakar ekonomi, perencana, para pembuat keputusan dan politikus di negara-negara berkembang selama tiga dasawarsa ini. Hal ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai prasyarat utama dalam mencapai taraf kehidupan yang lebih tinggi bagi seluruh anggota masyarakat di negara

yang bersangkutan. Itu pula sebabnya pertumbuhan ekonomi menjadi inti usaha pembangunan yang dilaksanakan.

Amir (2006) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara atau suatu daerah. Ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Dengan demikian hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan investasi swasta. Hal tersebut dapat ditunjukkan oleh sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu wilayah yang terus menunjukkan peningkatan, maka itu menggambarkan bahwa perekonomian negara atau wilayah tersebut berkembang dengan baik. Pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh faktor investasi swasta, Pendapatan Asli daerah, dan Dana Perimbangan.

B. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal

Penerapan otonomi daerah yang luas saat ini bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi ekonomi yang ada sehingga dapat memacu peningkatan aktivitas perekonomian di daerah yang pada akhirnya meningkatkan perekonomian nasional. Penerapan otonomi daerah yang telah digariskan dalam UU No. 33/2004, mensyaratkan adanya suatu

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam rangka negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta pemerataan antar daerah secara proporsional, adil, demokratis dan transparan.

Desentralisasi fiskal tidak akan berguna jika tidak diikuti dengan kemampuan finansial yang cukup memadai oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu melalui UU No. 33/2004, diharapkan nantinya akan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk pendanaan pemerintah daerah menurut UU No. 33/2004 dalam pelaksanaan desentralisasi meliputi: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah.

Dalam UU. No 33/2004 memberikan kewenangan bagi daerah untuk meningkatkan kemampuan pendapatannya, yaitu dengan meluaskan jangkauan dari bagian pajak dan bagi hasil sumber daya alam dengan pemerintah pusat. Pemerintah daerah harus dapat meningkatkan penerimaannya untuk membiayai kegiatan pembangunan, namun di era desentralisasi fiskal harapan itu belum optimal yang tercermin dalam pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan PDRB riil menunjukkan variasi antar daerah di Jawa Tengah setelah pelaksanaan desentralisasi fiskal. Dari tahun 2003 – 2007 di mana era pelaksanaan desentralisasi fiskal yang sudah dimulai dari tahun 2001, ternyata hanya

kabupaten-kabupaten tertentu yang memiliki kontribusi PDRB tinggi yaitu: Kutai Kertanegara, Bontang, Balikpapan dan Samarinda.

Hal ini menunjukkan bahwa era desentralisasi fiskal di mana daerah diberi kewenangan dalam mengatur keuangan daerahnya ternyata banyak kabupaten/kota yang belum menunjukkan perubahan yang signifikan dalam PDRB-nya. Meskipun PDRB bukan satu-satunya indikator dalam pembangunan.

Dari sisi otoritas moneter, terjadinya mekanisme transfer keuangan pusat-daerah berpotensi menimbulkan permasalahan dalam operasi pengendalian moneter. Terjadinya desentralisasi fiskal berpotensi menimbulkan resiko perubahan perilaku pengendalian fiskal di daerah-daerah. Jika pemerintah daerah mengalokasikan dananya untuk memperkuat fondasi perekonomian daerah maka akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Tetapi jika dana transfer tersebut dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak produktif, spekulatif dan konsumtif yang dapat menimbulkan *idle money* maka akan berdampak terhadap pengendalian moneter (terutama tentang jumlah uang beredar) (Ismail; 2002). Hasil ini mendukung temuan sebelumnya di China bahwa desentralisasi ekonomi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi bersifat *inflationary* (Brandt dan Zhu, 2000).

Abdullah dan Halim (2003) telah melakukan penelitian tentang pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja pemerintah daerah. Studi kasus yang dilakukan di Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. Hasil temuannya adalah sebagai berikut

DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah Penelitian L. Jay Helms (1985) dengan menggunakan data panel lintas negara menunjukkan bahwa kenaikan pajak pusat dan pajak daerah berdampak memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah, jika penerimaan pajak digunakan sebagai dana perimbangan pusat-daerah. Hasil penelitian ini juga mengindikasikan bahwa pemanfaatan dana perimbangan untuk penyediaan barang publik akan berdampak terhadap kualitas barang publik lokal. Kesimpulan yang didapat menunjukkan bahwa pemberian insentif dana perimbangan berdasarkan pengeluaran lebih baik daripada berdasarkan penerimaan pajak.

Menurut Todaro (2000) terdapat tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa, ketiganya adalah: Akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan modal atau sumber daya manusia, Pertumbuhan penduduk beberapa tahun selanjutnya yang akan memperbanyak jumlah akumulasi kapital, kemajuan teknologi Model pertumbuhan neoklasik dipelopori oleh Robert M. Solow pada tahun 1950-an.

Model pertumbuhan ini telah diterapkan dalam berbagai studi empiris di banyak negara. Asumsi dasar yang dipakai dalam model ini antara lain, keluaran dihasilkan dari penggunaan dua jenis masukan yaitu modal dan tenaga kerja, perekonomian berada pada kondisi penggunaan tenaga kerja penuh, perekonomian berada dalam kondisi persaingan sempurna. Amin Pujiati (2007), membahas ada dua hal utama yang dalam model

penelitiannya, yaitu peranan modal dan perubahan teknologi dalam pertumbuhan ekonomi. Namun untuk sementara perubahan teknologi dianggap konstan sehingga akan diketahui bagaimana peran modal dalam proses pertumbuhan. Akumulasi modal dan kedalaman modal terjadi pada saat pertumbuhan persediaan (*stock*) modal lebih cepat daripada pertumbuhan tenaga kerja. Dalam kondisi tanpa perubahan teknologi, akumulasi modal akan mendorong pertumbuhan keluaran per tenaga kerja, meningkatkan *marginal product* tenaga kerja serta meningkatkan upah. Namun akumulasi modal juga akan mendorong berkurangnya pengembalian modal (*return of capital*) dan menurunkan tingkat suku bunga riil.

Desentralisasi merupakan bagian dari strategi setiap institusi yang berkehendak untuk tidak mati dalam persaingan global. Ia adalah strategi untuk menjadi kompetitif. Demikian pula bagi sebuah negara. Desentralisasi menjadikannya terbagi menjadi bagian-bagian kecil yang terintegrasi dan menjadi sebuah "makhluk organik" yang bergerak efisien mengatasi tantangan global. Dalam praktik, desentralisasi dan otonomi bersifat tumpang tindih. Namun, dalam makna keduanya memiliki perbedaan. Desentralisasi merupakan sistem pengelolaan yang berlebihan dengan sentralisasi. Jika sentralisasi adalah pemusatan pengelolaan, maka desentralisasi adalah pembagian dan pelimpahan.

Rondinelli dan Cheema (dikutip Sarundajang, 1999). Desentralisasi adalah "*the transfer of planning, decision making, or administrative authority from the central government to its field organizations, local administrative units, semi-autonomous and parastatal organizations*".

Menurut Prawirosetoto (2002), Desentralisasi fiskal adalah pendelegasian tanggung jawab dan pembagian kekuasaan dan kewenangan untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan (*tax assignment*) maupun aspek pengeluaran (*expenditure assignment*).

Desentralisasi fiskal ini dikaitkan dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam penyediaan barang dan jasa publik (*public goods/public service*). Desentralisasi fiskal merupakan inti dari desentralisasi itu sendiri karena pemberian kewenangan di bidang politik maupun administrasi tanpa dibarengi dengan desentralisasi fiskal merupakan desentralisasi yang sia-sia, sebab untuk dapat melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab serta tugas-tugas pelayanan publik tanpa diberi wewenang di dalam penerimaan maupun pengeluaran desentralisasi fiskal tidak akan efektif. Dengan demikian, desentralisasi fiskal akan memberi keleluasaan kepada daerah untuk menggali potensi daerah dan memperoleh transfer dari pusat dalam kerangka keseimbangan fiskal.

Terdapat beberapa alasan untuk mempunyai sistem pemerintahan yang terdesentralisasi (Simanjuntak, 2001): (1) Representasi demokrasi, untuk memastikan hak seluruh warga negara untuk berpartisipasi secara langsung pada keputusan yang akan mempengaruhi daerah atau wilayah (2) Tidak dapat dipraktikkannya pembuatan keputusan yang tersentralisasi, adalah tidak realistis pada pemerintahan yang sentralistis untuk membuat keputusan mengenai semua pelayanan rakyat seluruh negara, terutama pada negara yang berpenduduk besar seperti Indonesia (3) Pengetahuan lokal (*local knowledge*), mereka yang berada pada daerah lokal mempunyai

pengetahuan yang lebih banyak mengenai kebutuhan lokal, prioritas, kondisi, dll (4) Mobilitas sumber daya, mobilitas pada bantuan dan sumber daya dapat di fasilitasi dengan hubungan yang lebih erat di antara populasi dan pembuat kebijakan pada tingkat lokal. Menurut Dilliger, dalam Sidik, (2002), pada dasarnya terdapat empat jenis desentralisasi, yaitu: Desentralisasi politik (*political decentralization*), yaitu pemberian hak kepada warga Negara melalui perwakilan yang dipilih suatu kekuasaan yang kuat untuk mengambil keputusan publik, desentralisasi administratif (*administrative decentralization*), yaitu pelimpahan wewenang guna mendistribusikan wewenang, tanggung jawab dan sumber-sumber keuangan untuk menyediakan pelayanan publik, terutama yang menyangkut perencanaan, pendanaan dan manajemen fungsi-fungsi pemerintahan dari pemerintah pusat kepada aparat di daerah, badan otoritas tertentu atau perusahaan tertentu.

Desentralisasi fiskal (*fiskal dezentralization*) yaitu pelimpahan wewenang dalam mengelola sumber-sumber keuangan, yang mencakup: a) *Self-financing* atau *cost recovery* dalam pelayanan publik terutama melalui pengenaan retribusi daerah b) *Cofinancing* atau *coproduction*, di mana pengguna jasa berpartisipasi dalam bentuk pembayaran jasa atau kontribusi tenaga kerja c) Transfer dari pemerintah pusat terutama berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), sumbangan darurat, serta pinjaman daerah (sumber daya alam) dan Desentralisasi ekonomi (*economic or market decentralization*), yaitu kebijakan tentang privatisasi dan deregulasi yang intinya berhubungan dengan kebijakan pelimpahan fungsi-

fungsi pelayanan masyarakat dari pemerintah kepada sektor swasta sejalan dengan kebijakan liberalisasi.

C. Investasi

Samuelson dan Nordhaus (1993), menyebutkan investasi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh para penanam modal yang menyangkut penggunaan sumber-sumber seperti peralatan, gedung, peralatan produksi dan mesin-mesin baru lainnya atau persediaan yang diharapkan akan memberikan keuntungan dari investasi tersebut. Sementara Sukirno (1996:107), menyebutkan investasi adalah pengeluaran atau perbelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa dalam perekonomian. Pertambahan jumlah barang modal ini memungkinkan perekonomian tersebut menghasilkan lebih banyak barang dan jasa di masa yang akan datang. Adakalanya penanaman modal yang dilakukan untuk menggantikan barang-barang modal yang lama dan terdepresiasi.

Adam Smith (1776) menyatakan bahwa investasi dilakukan karena para pemilik modal mengharapkan untung dan harapan masa depan keuntungan bergantung pada iklim investasi pada hari ini dan pada keuntungan nyata. Smith yakin keuntungan cenderung menurun dengan adanya kemajuan ekonomi. Pada waktu laju pemupukan modal meningkat, persaingan yang meningkat antar pemilik modal akan menaikkan upah dan sebaliknya menurunkan keuntungan.

Investasi sangat penting dalam pembangunan ekonomi. Tanpa investasi, maka tambahan stok modal tidak akan terjadi, malah berkurang (penyusutan) sehingga dengan sendirinya tidak akan ada pertumbuhan untuk tahun berikutnya.

Pemintaan agregat suatu negara dapat adalah pengeluaran konsumsi masyarakat ditambah dengan pengeluaran investasi ditambah dengan pengeluaran pemerintah ditambah dengan selisih antara ekspor dengan impor.

Teori makro Keynes (1936) menyebutkan keputusan apakah suatu Investasi akan di laksanakan atau tidak, tergantung pada perbandingan antara besarnya keuntungan yang di harapkan (yang menyatakan dalam persentase satuan waktu) di suatu pihak dan biaya penggunaan dana atau tingkat bunga di pihak lain. Apabila tingkat bunga yang berlaku di pasar uang sebesar 2% setiap bulan (atau 24% setahun), sedangkan keuntungan yang di harapkan sebesar 50% maka investasi tersebut masih menguntungkan karena keuntungan (kotor) yang di harapkan 50% jadi melebihi ongkos pendanaan dapat di katakana $50\% - 24\% = 26\%$ pertahun untuk 10 tahun. Maka jika pengusaha tersebut "rasional" investasi tersebut akan dilaksanakan. Secara ringkas dapat dikatakan : 1) Jika keuntungan yang diharapkan (MEC) lebih besar dari pada tingkat bunga, maka investasi di laksanakan, 2) jika MEC lebih kecil dari pada tingkat bunga maka investasi tidak dilaksanakan, dan 3) Jika MEC = tingkat bunga maka investasi bisa dilaksanakan dan bisa juga tidak.

Berdasarkan uraian di atas, di ketahui bahwa berapa tingkat pengeluaran investasi yang di harapkan oleh para investor di tentukan oleh dua hal yaitu tingkat suku bunga yang berlaku dan *marginal efficiency of capital*. Perilaku makro para investor ini biasanya di ringkas dalam satu bentuk fungsi *marginal efficiency of capital* atau fungsi investasi.

Investasi di Indonesia, sementara itu terdiri dari investasi domestik (PMDN) dan investasi asing (PMA). Berdasarkan keterangan sebelumnya, ada banyak faktor yang berpengaruh terhadap investasi, tentu yang terpenting adalah tingkat bunga, sebagaimana ditunjukkan oleh Keynes. Faktor lain yang tidak kalah pentingnya dengan tingkat bunga adalah pendapatan. Sebagaimana yang telah dijelaskan terdahulu. Selain tingkat bunga, ada beberapa faktor yang dapat berpengaruh terhadap investasi, yaitu jenis investasi (asing dan domestik), kebijakan investasi, dan sebagainya.

Sukirno (1994:107), lebih lanjut menjelaskan penggolongan investasi dari aspek pembelanjaan: a) pembelian berbagai jenis barang modal. b) pembelanjaan untuk membangun rumah tempat tinggal, bangunan kantor, bangunan pabrik dan bangunan-bangunan lainnya. c) penambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun perhitungan pendapatan nasional.

Faktor-faktor utama yang menentukan tingkat investasi adalah: a) tingkat keuntungan investasi yang diramalkan akan diperoleh. b) tingkat bunga. c) ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan terkait dengan tingkat inflasi. d) kemajuan teknologi. e) tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya. f) keuntungan yang diperoleh perusahaan-

perusahaan. Selanjutnya, terkait dengan penanaman modal, maka terdapat dua jenis atau kelompok penanam modal, yaitu penanaman modal asing (PMA), dan penanaman modal dalam negeri (PMDN).

Setidaknya ada empat evolusi perusahaan dalam era globalisasi, yaitu : 1) perusahaan domestik, 2) perusahaan internasional, 3) perusahaan multinasional, 4) perusahaan global (Kuncoro, 2003:293). Perusahaan domestik ditandai dengan ciri orientasi pasar dalam negeri. Sekelompok perusahaan yang memproduksi barang yang sejenis disebut industri (Awh, 1976:264). Berdasarkan tingkat proteksinya, menurut Holland (1987: 170-171) dalam Kuncoro (2003:293), industri domestik bisa dibedakan menjadi industri bayi (*infant*), remaja (*adolescent*), dan dewasa (*mature*). Dimana pada tahap I, agar industri bayi dapat hidup, ia harus diberi tarif yang cukup tinggi agar impor dari negara maju tidak mudah masuk. Pada tahap II, karena industri domestik sudah tumbuh menjadi remaja, pemerintah sedikit demi sedikit mengurangi tingkat proteksi dan selektif, baik menurut sektor maupun perusahaan, dan tidak lagi mengurangi proteksi secara makro atau sektoral seperti tahap II. Dengan berjalannya waktu, perusahaan domestik yang telah "dewasa" biasanya akan melakukan internalisasi bisnis. Dalam praktek, perusahaan tersebut dapat tumbuh menjadi perusahaan internasional, perusahaan multinasional, atau perusahaan global. Lebih lanjut, Kuncoro (2003:297) menjelaskan latar belakang yang menyebabkan perusahaan melakukan ekspansi produk ke luar negeri adalah: 1) hasrat untuk mengejar keuntungan global. 2) keinginan mencari dan memperoleh suplai bahan mentah (*raw-material seekers*). 3) melayani pasar secara

langsung (*market seekers*), dan 4) meminimumkan biaya. Pendekatan evolusioner dalam melakukan ekspansi ke luar negeri adalah tanggapan untuk meminimumkan risiko untuk beroperasi dalam lingkungan asing yang diliputi ketidakpastian.

Salah satu sumber yang dapat menopang pembangunan saat ini adalah dengan menggalakkan bantuan usaha sektor swasta khususnya menyangkut penanaman modal dalam negeri sehingga mampu menjembatani kebutuhan investasi di masa mendatang di tengah ketidakpastian perekonomian nasional maupun internasional.

Pemanfaatan modal dalam negeri secara maksimal terutama diarahkan kepada rehabilitasi pembaharuan, perluasan dan pembangunan baru dalam bidang produksi barang dan jasa namun adakalanya terjadi penurunan tingkat investasi dalam negeri. Penurunan PMDN dapat disebabkan beberapa faktor; pertama, tingginya suku bunga pinjaman yang menyebabkan banyak pengusaha tidak mampu melakukan pengembangan usahanya; kedua, sektor-sektor yang sebelumnya mengalami boom investasi mengalami penurunan investasi yang cukup besar. PMDN akan terus di dorong dan ditingkatkan peranannya sedangkan PMA dimungkinkan di sektor-sektor industri tertentu yang menghasilkan barang-barang yang diperlukan untuk keperluan ekspor sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

D. Pendapatan Asli Daerah

Manajemen pemerintah daerah di Indonesia memasuki era baru seiring dengan diberlakukannya desentralisasi fiskal. Kebijakan terkait yang tertuang dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah efektif diberlakukan per Januari tahun 2001 (UU ini dalam perkembangannya diperbarui dengan dikeluarkannya UU No.32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004). Diberlakukannya undang-undang ini memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah.

Dalam era desentralisasi fiskal diharapkan terjadinya peningkatan pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik. Peningkatan layanan publik ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah. Harapan ini tentu saja dapat terwujud apabila ada upaya serius (pemerintah) dengan memberikan berbagai fasilitas pendukung (investasi). Konsekuensinya, pemerintah perlu untuk memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini. Desentralisasi fiskal disatu sisi memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan daerah, tetapi disisi lain memunculkan persoalan baru, dikarenakan tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan Adi (2005) menunjukkan terjadi disparitas pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi antar daerah ((kabupaten dan kota) dalam

pelaksanaan desentralisasi fiskal. Nanga (2005) mengindikasikan terjadinya ketimpangan fiskal antar daerah dan bisa jadi hal ini mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam penciptaan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk di kembangkan menjadi sumber PAD. Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah – daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah (Halim, 2001). Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah pemerintah daerah juga dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor – sektor yang produktif di daerah.

Wong (2004) menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur industry mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah. Dengan terpenuhinya fasilitas publik maka masyarakat merasa nyaman dan dapat menjalankan usahanya dengan efisien dan efektif sehingga pada akhirnya akan meningkatkan partisipasi public dalam pembangunan. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002).

Untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal dan adanya kebutuhan pendanaan daerah yang cukup besar, pemerintah memberikan dana

perimbangan dan salah satu komponen dana ini yang memberikan kontribusi terbesar adalah Dana Alokasi Umum (2005). Dalam beberapa tahun berjalan, proporsi DAU terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibanding dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk PAD (Adi, 2006). Hal ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan

pemerintah daerah terhadap pasokan dana dari pemerintah pusat ini. Namun demikian, dalam jangka panjang, ketergantungan semacam ini harus menjadi semakin kecil. Berbagai investasi yang dilakukan pemerintah daerah diharapkan memberikan hasil positif yang tercermin dalam peningkatan PAD.

Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tidak akan memberikan arti apabila tidak diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Brata (2004) menyatakan bahwa terdapat dua komponen penerimaan

daerah yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Kedua komponen tersebut adalah PAD dan Bagian Sumbangan & Bantuan. Namun demikian, penelitian Brata (2004) belum mencakup periode setelah otonomi daerah sehingga hubungan PAD dan Pertumbuhan ekonomi dapat saja mengarah ke hubungan negatif jika daerah terlalu ofensif dalam upaya peningkatan penerimaan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi sering diukur dengan menggunakan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB/PDRB), namun demikian indikator ini dianggap tidak selalu tepat dikarenakan tidak mencerminkan makna pertumbuhan yang sebenarnya. Indikator lain, yaitu pendapatan perkapita dapat

digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi ini (Kuncoro,2004; Gaspersz dan Feonay, 2003). Indikator ini lebih komprehensif dalam mengukur pertumbuhan ekonomi dikarenakan lebih menekankan pada kemampuan negara/daerah untuk meningkatkan PDB/PDRB agar dapat melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Indikator ini secara simultan menunjukkan apakah pertumbuhan ekonomi yang terjadi mampu meningkatkan kesejahteraan seiring dengan semakin cepatnya laju pertambahan penduduk

Pemerintah, dalam perekonomian modern merupakan salah satu pelaku ekonomi yang semakin penting. Aktivitas ekonomi sektor pemerintah ditunjukkan oleh kebijakan fiskal melalui penetapan rencana anggaran penerimaan dan belanja negara. Fungsi pemerintah berbeda dengan fungsi rumah tangga atau perusahaan swasta. Rumah tangga memiliki faktor-faktor produksi (sumber daya alam, tenaga kerja, kapital, entrepreneurship) yang dijual di pasar faktor produksi, dengan imbalan berupa : sewa/harga lahan, upah/gaji, bunga, laba yang kesemuanya merupakan penghasilan untuk dibelikan barang dan jasa di pasar barang.

Kelompok pengusaha berfungsi sebagai produsen, menghasilkan barang dan jasa yang dijual di pasar barang dan jasa sehingga memperoleh pendapatan yang digunakan untuk membeli faktor produksi dan seterusnya. Proses tersebut berjalan berdasarkan konsep efisiensi, yaitu baik produsen maupun konsumen berupaya mendapatkan hasil tertentu dengan faktor/biaya seminimum mungkin. Di dalam perkembangannya terjadi kegagalan pasar karena berbagai hal seperti timbulnya monopoli, dan

informasi yang tidak sempurna. Kegagalan pasar terjadi apabila mekanisme pasar tidak dapat berfungsi secara efisien dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi secara efisien. Terjadinya *chaos* dan depresi sehingga masyarakat memandang perlu adanya aturan (*regulation*) dan dibentuklah pemerintah yang mewakili masyarakat untuk mengambil keputusan membenahi masalah yang dihadapi masyarakat. Pemerintah mengatur masyarakat dan kegiatan perekonomian disamping pembeli faktor dan penjual barang dan jasa kepada masyarakat (Reksohadiprodo, 1999:3-7).

Nurdjaman, (1992:45), agar dapat menjalankan fungsi-fungsi tersebut diatas dengan baik, pemerintah memerlukan dukungan anggaran (pajak dan pungutan lain) yang memadai guna melaksanakan kegiatan-kegiatan negara baik dalam bidang pemerintahan umum maupun dalam bidang pembangunan serta memelihara kehidupan dan kegiatan negara lainnya. Di sektor pemerintahan, anggaran (*budget*) adalah sebuah rencana atau proyeksi atas pendapatan dan belanja di masa mendatang. Sebuah anggaran pemerintah adalah suatu pernyataan tentang perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi dalam suatu periode di masa depan, didasarkan pada data dari pengeluaran dan penerimaan yang sungguh-sungguh terjadi di masa yang lalu. Sehingga secara terinci dapat dinyatakan bahwa : a) Anggaran negara adalah gambaran atau pilihan alternatif dari kebijaksanaan pemerintah yang dinyatakan dalam ukuran uang, yang meliputi baik kebijaksanaan pengeluaran pemerintah untuk suatu periode di masa depan maupun kebijaksanaan penerimaan pemerintah untuk menutup pengeluaran tersebut;

b) Dari anggaran negara dapat pula diketahui realisasi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah di masa yang lalu, dan c) Melalui anggaran negara pada akhirnya dapat diketahui tercapai atau tidaknya kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah di masa yang lalu, serta maju atau mundurnya kebijaksanaan yang hendak dicapai pemerintah di masa yang akan datang.

Anggaran bagi negara atau daerah pada hakekatnya merupakan rencana kerja pemerintah yang akan dilakukan dalam satu tahun (anggaran) yang dituangkan dalam angka-angka rupiah yang mencakup sisi penerimaan dan pengeluaran. Anggaran daerah yang merupakan realisasi kebijakan fiskal termasuk bagian dari kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan sehingga kebijaksanaan penganggaran daerah harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Pendapatan daerah diusahakan selalu meningkat sedangkan pengeluaran dilakukan seefisien mungkin. Fungsi anggaran harus dapat membiayai pembangunan disamping dapat membiayai kebutuhan rutin. Melalui anggaran, daerah dapat melakukan supervisi dengan ketat dan pengendalian terhadap penggunaan dana sehingga sumber-sumber dana daerah dapat dimanfaatkan dengan baik (Mardiasmo, 2004:25).

Undang-Undang No. 33 tahun 2004 secara tegas menyebutkan bahwa anggaran baik di tingkat pusat (negara) maupun daerah merupakan suatu rencana keuangan tahunan yang ditetapkan berdasarkan undang-undang (untuk APBN) dan peraturan daerah (untuk APBD). Musgrave and Musgrave, (1989:6) menyatakan bahwa meskipun setiap tindakan pemerintah (perpajakan dan pengeluaran) mempengaruhi perekonomian

dalam banyak cara dan dapat dirancang untuk berbagai maksud, fungsi anggaran belanja negara adalah sebagai berikut 1) Penyediaan barang sosial, atau proses pembagian keseluruhan sumber daya untuk digunakan sebagai barang pribadi dan barang sosial, dan bagaimana bauran/komposisi barang sosial ditentukan. Penyediaan ini dapat disebut sebagai fungsi alokasi dari kebijakan anggaran; 2) Penyesuaian terhadap distribusi pendapatan dan kekayaan untuk menjamin terpenuhinya apa yang dianggap oleh masyarakat sebagai suatu keadaan distribusi yang "merata" dan "adil" disebut sebagai fungsi distribusi, dan 3) Penggunaan kebijakan anggaran sebagai suatu alat untuk mempertahankan tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat stabilitas yang semestinya dan laju pertumbuhan ekonomi yang tepat, dengan memperhitungkan segala akibatnya terhadap perdagangan dan neraca pembayaran, sebagai fungsi stabilisasi.

Pengeluaran pemerintah yang tertuang dalam APBN/APBD mencerminkan kebijakan fiskal pemerintah, apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, maka pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Menurut Rostow, Musgrave dan Mangkoesoebroto (1997:171), model pengeluaran pemerintah adalah sebagai berikut : a) Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase inventasi pemerintah terhadap total investasi besar karena pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti pendidikan, kesehatan dan transportasi; b) Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar

dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin besar, dan c) Pada tingkat ekonomi lebih lanjut dalam pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti : program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya.

Wagner dalam Mangkoesoebroto (1997:172) menyebutkan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Tumbuhnya perekonomian berpengaruh pada hubungan antar industri, hubungan industri dengan masyarakat semakin kompleks. Sehingga peranan pemerintah menjadi sangat penting, karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya.

Peacock dan Wiseman dalam Mangkoesoebroto (1997:173), mendasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran, sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran tersebut. Masyarakat mempunyai tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Menurut Peacock dan Wiseman perkembangan ekonomi menyebabkan menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah, dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan

pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi besar.

Pengeluaran pemerintah dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain : jumlah pajak yang diterima, tujuan-tujuan ekonomi jangka pendek dan jangka panjang, serta pertimbangan politik dan keamanan. Sumber penerimaan untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah meliputi pajak, pungutan, dan pinjaman (Musgrave *and* Musgrave, 1989:226). Pajak dan pungutan yang ditarik dari sektor swasta tanpa mengakibatkan timbulnya kewajiban bagi pemerintah terhadap pihak pembayar. Pinjaman merupakan suatu penarikan yang dilakukan sebagai pengganti janji pemerintah untuk membayar kembali pada suatu hari di masa mendatang, serta untuk membayar bunga selama periode pinjaman. Diantara ketiga sumber penerimaan tersebut pajak merupakan bagian penerimaan yang paling besar.

Mangkoesoebroto (1997:181) menyebutkan sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran ada dua, yaitu dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan bukan pajak misalnya pinjaman, penerimaan dari badan usaha milik negara, penerimaan dari lelang. Pajak merupakan suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, berdasarkan undang-undang, pemungutannya dapat dipaksakan kepada subyek pajak, dengan tidak ada balas jasa langsung yang dapat ditunjukkan penggunaannya.

Pajak di samping berperan sebagai sumber pendapatan (*budgetary function*) yang utama juga berperan sebagai alat pengatur (*regulatory function*). Sistem pengenaan pajak dapat dibedakan menjadi sistem pajak yang progresif, sistem pajak proporsional, dan sistem pajak regresif. Sistem pajak progresif adalah sistem pengenaan pajak dimana dengan semakin tingginya dasar pajak (*tax base*) akan dikenai pungutan yang semakin tinggi persentasenya. Sistem pajak proporsional adalah tarif pajak yang dikenakan tetap sama besarnya walaupun nilai obyek pajaknya berbeda-beda. Sistem pajak regresif yaitu walaupun nilai atau harga obyek pajak meningkat namun persentase jumlah pajak yang dibayar semakin kecil.

E. Inflasi

Inflasi menyebabkan timbulnya sejumlah biaya sosial yang harus ditanggung oleh masyarakat. Pertama, inflasi menimbulkan dampak negatif pada distribusi pendapatan. Masyarakat golongan bawah dan berpendapatan tetap akan menanggung beban inflasi dengan turunnya daya beli mereka. Sebaliknya, masyarakat menengah dan atas yang memiliki aset-aset finansial seperti tabungan atau deposito dapat melindungi kekayaannya dari inflasi, sehingga daya beli mereka relatif tetap. Kedua, inflasi yang tinggi berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Tingkat inflasi yang tinggi sering diikuti oleh tingkat inflasi yang berfluktuasi, yang dalam jangka panjang memberikan dampak negatif terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Mengapa? Karena ketidakpastian tingkat inflasi menyebabkan investor cenderung untuk melakukan investasi finansial

jangka pendek yang bersifat spekulatif daripada melakukan investasi proyek riil yang bersifat produktif. Disamping itu, inflasi yang tinggi yang juga cermin dari ketidakpastian nilai uang menyebabkan tingginya premi resiko (*risk premium*) di pasar keuangan yang menyebabkan pasar keuangan tidak efisien dan tingginya biaya pendanaan investasi yang kemudian berdampak negatif pada pertumbuhan. Apalagi dalam perekonomian Indonesia yang bersifat terbuka (*small open economy*) dengan mobilitas modal luar negeri yang bebas, mengharuskan kita menjaga tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Dalam kondisi demikian, inflasi yang tinggi dan berfluktuatif merupakan faktor yang secara signifikan menyebabkan ketidakstabilan perekonomian seperti yang tercermin dari tingginya volatilitas nilai tukar, tidak stabilnya pasar keuangan, serta tingginya sensitivitas aliran modal.

Pertanyaannya kemudian, berapa tingkat inflasi yang mencerminkan kestabilan harga?

Bank Sentral Amerika, memberikan terminologi 'kestabilan harga' sebagai tingkat inflasi yang cukup rendah sehingga masyarakat tidak lagi secara material merasakan kehadiran inflasi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Para pengusaha tidak lagi memperhitungkan berapa persen harga jual barang harus mereka naikkan untuk menyesuaikan dengan inflasi. Para buruh tidak lagi menuntut kenaikan gaji untuk disesuaikan dengan kenaikan indeks harga. Para pensiunan tidak merasakan daya beli mereka semakin menurun. Dengan kriteria ini, banyak yang secara operasional menterjemahkannya sebagai 0-3%. Angka ini seringkali disebut sebagai tingkat inflasi yang optimal. Pertama, menjaga inflasi pada kisaran tersebut

tidak akan mendorong ekspektasi inflasi atau menurunkan kredibilitas bank sentral. Kedua, inflasi nol mendorong suku bunga nominal mendekati nol sehingga menjadikan kebijakan moneter menjadi tidak efektif seperti yang terjadi di Jepang. Lebih penting lagi, karena proses perhitungan inflasi tidak sempurna, yaitu adanya bias pengukuran, target inflasi di banyak negara sedikit lebih tinggi dari nol. Dengan asumsi bias pengukuran sekitar 2% maka target inflasi umumnya di atas 2%.

Berdasarkan data historis dari inflasi, beberapa studi yang dilakukan oleh Bank Indonesia menyimpulkan bahwa tingkat inflasi sekitar 4%-6% merupakan tingkat inflasi yang 'optimal'. Sementara di sejumlah negara berkembang, perekonomiannya sempat tumbuh tinggi namun pada akhirnya tidak berhasil dan diakhiri dengan gejolak di pasar keuangan yang terkadang disertai dengan krisis moneter. Adanya fakta ini dan ditunjang oleh berkembangnya teori-teori ekonomi moneter telah mengubah paradigma kebijakan moneter yang aktif mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi kebijakan moneter yang lebih diorientasikan pada pencapaian kestabilan harga (Burhanuddin Abdullah, 2003).

Lebih lanjut dikatakan bahwa, paling tidak ada tiga landasan intelektual yang mendasari perubahan paradigma tersebut, yaitu. Pertama, secara teoritis maupun empiris, dalam jangka panjang kebijakan moneter hanya berpengaruh pada inflasi. Kedua, kebijakan moneter yang secara aktif digunakan untuk mendorong pertumbuhan seringkali justru berdampak pada ketidakstabilan. Argumen ini didasarkan pada kenyataan bahwa dampak kebijakan moneter kepada perekonomian riil memerlukan waktu

yang cukup lama (adanya *time lag*) dan *time lag* ini selalu berubah dari waktu ke waktu dengan ketidakpastian yang tinggi (*long and variable lag*). Ketidakstabilan ini semakin meningkat terutama ketika bank sentral tidak independen dari pengaruh politisi yang seringkali kurang sabar melihat hasil dari suatu kebijakan.

Bank sentral yang tidak independen seringkali diintervensi untuk melakukan kebijakan yang lebih populer melalui penurunan suku bunga untuk mengatasi pengangguran. Ketiga, kebijakan moneter tanpa tujuan yang jelas pada kestabilan harga seringkali menjadi tidak kredibel. Tanpa tujuan yang jelas, bank sentral yang semula mempunyai komitmen untuk mengendalikan inflasi pada tingkat tertentu, seringkali tergoda untuk melakukan kebijakan moneter yang populer di mata masyarakat dengan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, tetapi berdampak inflasi di atas level yang sudah dijanjikan oleh bank sentral dan ekspektasi masyarakat.

Inflasi (*inflation*) adalah gejala yang menunjukkan kenaikan tingkat harga umum yang berlangsung terus menerus. Dari pengertian tersebut maka apabila terjadi kenaikan harga hanya bersifat sementara, maka kenaikan harga yang sementara sifatnya tersebut tidak dapat dikatakan inflasi. Semua negara di dunia selalu menghadapi permasalahan inflasi ini. Oleh karena itu, tingkat inflasi yang terjadi dalam suatu negara merupakan salah satu ukuran untuk mengukur baik buruknya masalah ekonomi yang dihadapi suatu negara. Bagi negara yang perekonomiannya baik, tingkat inflasi yang terjadi berkisar antara 2 sampai 4 persen per tahun. Tingkat

inflasi yang berkisar antara 2 sampai 4 persen dikatakan tingkat inflasi yang rendah. Selanjut tingkat inflasi yang berkisar antara 7 sampai 10 persen dikatakan inflasi yang tinggi. Namun demikian ada negara yang menghadapi tingkat inflasi yang lebih serius atau sangat tinggi, misalnya Indonesia pada tahun 1966 dengan tingkat inflasi 650 persen. Inflasi yang sangat tinggi tersebut disebut hiper inflasi (*hyper inflation*).

Didasarkan pada faktor-faktor penyebab inflasi maka ada tiga jenis inflasi yaitu: 1) inflasi tarikan permintaan (*demand-pull inflation*) dan 2) inflasi desakan biaya (*cost-push inflation*) 3) inflasi karena pengaruh impor (*imported inflation*). Inflasi tarikan permintaan (*demand-pull inflation*) atau inflasi dari sisi permintaan (*demand side inflation*) adalah inflasi yang disebabkan karena adanya kenaikan permintaan agregat yang sangat besar dibandingkan dengan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Karena jumlah barang yang diminta lebih besar dari pada barang yang ditawarkan maka terjadi kenaikan harga. Inflasi tarikan permintaan biasanya berlaku pada saat perekonomian mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi berjalan dengan pesat (*full employment and full capacity*).

Dengan tingkat pertumbuhan yang pesat/tinggi mendorong peningkatan permintaan sedangkan barang yang ditawarkan tetap karena kapasitas produksi sudah maksimal sehingga mendorong kenaikan harga yang terus menerus. Inflasi desakan biaya (*Cost-push Inflation*) atau inflasi dari sisi penawaran (*supply side inflation*) adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat dari adanya kenaikan biaya produksi yang pesat dibandingkan dengan

tingkat produktivitas dan efisiensi, sehingga perusahaan mengurangi *supply* barang dan jasa. Peningkatan biaya produksi akan mendorong perusahaan menaikkan harga barang dan jasa, meskipun mereka harus menerima resiko akan menghadapi penurunan permintaan terhadap barang dan jasa yang mereka produksi. Sedangkan inflasi karena pengaruh impor adalah inflasi yang terjadi karena naiknya harga barang di negara-negara asal barang itu, sehingga terjadi kenaikan harga umum di dalam negeri (Amir, 2006).

Hatta (2008), menyatakan bahwa keberadaan permasalahan inflasi dan tidak stabilnya sektor riil dari waktu ke waktu senantiasa menjadi perhatian sebuah rezim pemerintahan yang berkuasa serta otoritas moneter. Lebih dari itu, ada kecenderungan Inflasi dipandang sebagai permasalahan yang senantiasa akan terjadi. Hal ini tercermin dari kebijakan otoritas moneter dalam menjaga tingkat inflasi. Setiap tahunnya otoritas moneter senantiasa menargetkan bahwa angka atau tingkat inflasi harus diturunkan menjadi satu digit atau inflasi moderat.

Dengan paradigma berpikir seperti itu, otoritas moneter dalam upayanya menyelesaikan permasalahan inflasi cenderung "berkutut" pada bagaimana menurunkan tingkat inflasi yang tinggi, bukan berpikir bagaimana agar inflasi tidak terjadi. Upaya otoritas moneter mengendalikan inflasi memang sangatlah beralasan. Terutama disebabkan dampak inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari segi biaya, biaya yang harus ditanggung pemerintah dengan adanya inflasi sangatlah besar. Terjadinya inflasi dapat mendistorsi harga-harga relatif, tingkat pajak, suku bunga riil, pendapatan masyarakat akan terganggu, mendorong investasi yang keliru,

dan menurunkan moral. Maka dari itu, mengatasi inflasi merupakan sasaran utama kebijakan moneter.

Secara empirik, pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari krisis tahun 1997–1998 yang mengakibatkan terganggunya sektor riil. Krisis ini diawali dari krisis di sektor moneter (depresiasi nilai tukar rupiah dengan dolar) yang kemudian merambat kepada semua sektor tanpa terkecuali. Tingkat Inflasi ketika itu sebesar 77,60 % yang diikuti pertumbuhan ekonomi minus 13,20 %. Adapun terganggunya sektor riil tampak pada kontraksi produksi pada hampir seluruh sektor perekonomian. Tahun 1998, seluruh sektor dalam perekonomian (kecuali sektor listrik, gas, dan air bersih) mengalami kontraksi. Sektor konstruksi mengalami kontraksi terbesar yaitu 36,4 %. Disusul kemudian sektor keuangan sebesar 26,6 %.

Inflasi sesungguhnya mencerminkan kestabilan nilai sebuah mata uang. Stabilitas tersebut tercermin dari stabilitas tingkat harga yang kemudian berpengaruh terhadap realisasi pencapaian tujuan pembangunan ekonomi suatu negara, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan, perluasan kesempatan kerja, dan stabilitas ekonomi. Kestabilan nilai mata uang sangat penting untuk dijaga yang merupakan cerminan dari inflasi. Dalam rangka mengendalikan inflasi dan menjaga stabilnya nilai mata uang, maka dari segi moneter maka bank sentral akan menaikkan suku bunga dan pengetatan likuiditas perbankan, mengkaji efektivitas instrumen moneter dan jalur transmisi kebijakan moneter, menentukan sasaran akhir kebijakan moneter, mengidentifikasi

variabel yang menyebabkan tekanan-tekanan inflasi, memformulasikan respon kebijakan moneter.

F. Tingkat Suku Bunga

Tantangan utama bagi kebijakan moneter pasca krisis adalah kurang efektifnya kebijakan moneter dalam mempengaruhi aktivitas perekonomian. Permasalahan ini terutama berakar dari kondisi neraca perbankan yang masih belum sepenuhnya normal dan belum pulihnya intermediasi perbankan. Permasalahan ini menimbulkan dua penyakit kronis dalam sistem moneter yaitu : 1) perbankan tergantung pada sumber pendapatan dari surat-surat berharga seperti SBI dan obligasi pemerintah, 2) perbankan dalam kondisi kelebihan likuiditas yang dapat mengancam stabilitas nilai tukar, 3) dan sebagai dampaknya, biaya pengendalian moneter oleh Bank Indonesia menjadi mahal.

Dalam kondisi demikian, kebijakan moneter untuk mengurangi tekanan inflasi dan nilai tukar seringkali tidak direspon oleh kenaikan suku bunga deposito perbankan dengan seimbang karena perbankan cenderung memanfaatkan momentum kenaikan suku bunga SBI tersebut untuk mendapatkan margin keuntungan dari selisih antara suku bunga SBI dan obligasi variable rate sebagai instrumen penempatan dan deposito sebagai instrumen dana. Kondisi ini menyebabkan kebijakan moneter untuk menyerap kelebihan likuiditas di masyarakat dan dalam rangka menjaga *interest parity* menjadi tidak efektif. Hal ini seringkali menimbulkan dilema.

Di satu sisi, kebijakan perlu diterapkan secara hati-hati dan terukur untuk mencapai sasaran moneter dalam rangka menyerap kelebihan likuiditas agar tidak menambah tekanan terhadap inflasi dan melemahnya nilai tukar. Namun di sisi lain, upaya penyerapan eksekutif likuiditas tersebut agar efektif memerlukan perubahan *stance* kebijakan yang drastis yang dapat mengganggu momentum pemulihan ekonomi yang sedang berjalan (Abdullah, 2006).

Sedyadi (2007) menyatakan bahwa penurunan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) terus menerus hingga ke titik 8,25 persen, diyakini mempercepat pertumbuhan ekonomi selama 2007. Itu terlihat dari indikasi naiknya angka kredit hingga 4,43 persen, yang sebagian besar didominasi kredit sektor usaha kecil menengah (UKM). Lonjakan kredit diharapkan bisa menggerakkan perekonomian sektor riil. Jika sektor ini bergerak, maka banyak peluang kerja yang diciptakan sehingga pengangguran bisa dikurangi. Dengan berkurangnya pengangguran, daya beli masyarakat pun membaik dan aktivitas konsumsi pun meningkat. Lebih jauh dikatakan bahwa, semakin membaiknya perekonomian, mempercepat pertumbuhan di semua sektor seperti pertanian, perdagangan dan jasa, bangunan, angkutan, dan komunikasi.

G. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait penelitian ini adalah :

1. Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi

- a. **Amin Pujiati (2008)**, dengan judul Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Karesidenan Semarang Era Desentralisasi Fiskal. Ada dua pendekatan mendasar yang digunakan dalam menganalisa panel data. Pertama, pendekatan Fixed Effects dengan persamaan regresi, Metode analisis estimasi GLS (*Generalized Least Square*) dengan uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi. Variabel yang digunakan dalam penelitian Amin Pujiati ini adalah: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), 2) Pertumbuhan Ekonomi diproksi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Harga Konstan tahun 2003, 3) Dana Bagi Hasil atau dana perimbangan antara Daerah dengan Pusat, dan 4) Dana Alokasi Umum. Hasil estimasi regresi pengaruh pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di karesidenan Semarang adalah sebagai berikut: Pendapatan Asli daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan PAD yang dianggap sebagai modal, secara akumulasi akan lebih banyak menimbulkan eksternalitas yang bersifat positif dan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi, Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dana Alokasi Umum berpengaruh Negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan ini tidak mendukung teori pertumbuhan Neo Klasik

yang beranggapan bahwa modal akan mempercepat pertumbuhan. Persamaan penelitian Amin Pujiati ini dengan penelitian yang sedang diadakan ini adalah, sama-sama memiliki variabel Pendapatan Asli daerah (PAD) dan pertumbuhan ekonomi tingkat regional (propinsi), di mana PAD sama-sama dihipotesiskan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan Perbedaan penelitian ini adalah alat analisis yang dipergunakan, dan metode estimasi. Pada penelitian Amin Pujiati menggunakan metode estimasi GLS, sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode MaksimumLikelihood.data, lokasi penelitian Amin Pujiati di Karesidenan Semarang sedangkan penelitian ini di Kalimantan Timur. dan periode penelitian juga berbeda. Di samping itu, **Amin Pujiati**, 2008 menitik beratkan penelitiannya pada PAD, DAU, DBH yang berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

- b. Daslan Simanjuntak (2006).** Meneliti tentang Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Labuhan Batu Sumatra Utara. Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat otonomi fiskal dan pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Labuhan Batu pada pasca otonomi daerah periode 2001 - 2005. Hasil empiris menunjukkan sumber penerimaan PAD dari pajak dan retribusi daerah Kabupaten Labuhan Batu terus mengalami peningkatan.

Untuk tingkat otonomi fiskal dan Indeks Kemampuan Rutin (IKR), efektivitas serta efisiensi, kinerja pengelolaan anggaran keuangan Kabupaten Labuhan Batu berada pada skala interval sangat kurang. Berdasarkan statistik pertumbuhan ekonomi pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) pada tahun sebelumnya menunjukkan pengaruh positif yang signifikan. Sedangkan nilai elastisitas (nilai koefisien regresi) peranan Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi sumber pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Labuhan Batu pada periode 2001-2005. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan pentingnya mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat dengan menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah secara optimal dengan pengawasan dan pelaksanaan yang optimal sehingga terwujud ekonomi daerah yang lebih komprehensif.

- c. Darwanto, dan Yulia Yustikasari (2007), Variabel penelitian ini adalah: 1) Pertumbuhan Ekonomi, 2) Pendapatan Asli Daerah (PAD), 3) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai variabel bebas, sedangkan variabel Belanja Modal, merupakan variabel terikat. Pengujian hipotesis yang digunakan adalah menggunakan analisis pemodelan ekonometrika multiple regression dengan metode estimasi OLS (ordinary least square). Uji analisis data panel melalui uji parsial dan uji secara simultan. Model penelitian ini juga diuji Goodness of Fit Test. Pada Pengujian asumsi klasik diketahui bahwa data telah terdistribusi secara normal, bebas dari multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Hasil pengujian terhadap hipotesis-hipotesis menunjukkan bahwa secara simultan

variabel pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel belanja modal. Hasil pengujian terhadap hipotesis-hipotesis menunjukkan hasil perhitungan statistic uji F dengan hasil nilai signifikansi 0.01 yang berarti secara simultan seluruh variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel belanja modal.

Pengujian secara parsial variabel dependen yang digunakan dalam model menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal dalam APBD. Persamaan penelitian Darwanto Yulia Yustikasari, ini dengan penelitian yang sedang diadakan ini adalah, sama-sama memiliki variabel Pendapatan Asli daerah (PAD) dan pertumbuhan ekonomi tingkat regional (propinsi), di mana PAD sama-sama dihipotesiskan berpengaruh terhadap Belanja Publik. Sedangkan Perbedaan penelitian ini adalah: Bila penelitian Darwanto Yulia Yustikasari menghipotesiskan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Belanja Publik, sedangkan pada penelitian ini justru Belanja Publik berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. alat analisis yang dipergunakan, dan metode estimasi.

Pada penelitian Darwanto Yulia Yustikasari menggunakan metode estimasi OLS, sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode MaksimumLikelihood.data, dan periode penelitian juga berbeda. Di samping itu, Darwanto Yulia Yustikasari, 2007 menitik beratkan

penelitiannya pada PAD, DAU, Pertumbuhan Ekonomi yang berpengaruh terhadap Belanja Publik.

- d. **David Harianto dan Priyo Hari Adi (2007)**,. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Perkapita. Variabel penelitian ini adalah: 1) Pendapatan Perkapita, 2) Pendapatan Asli Daerah (PAD), 3) Dana Alokasi Umum (DAU) dan 4) Belanja Modal. Model yang dibuat dengan mengemukakan hipotesis: 1) *Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal*, 2) *Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)*, 3) *Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Pendapatan perkapita*, 4) *Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan perkapita*. Pengujian hipotesis yang digunakan adalah menggunakan analisis pemodelan ekonometrika multiple regression dengan metode estimasi ML (Maksimum Likelihood).

Uji analisis data panel melalui uji parsial dan uji secara simultan dengan pemodelan Path Analysis dengan menggunakan Structural Equation Modeling. Model penelitian ini juga diuji Goodness of Fit Test.

Pada Pengujian asumsi klasik diketahui bahwa data telah terdistribusi secara normal, bebas dari multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Hasil pengujian terhadap hipotesis-hipotesis menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum sangat berpengaruh terhadap Belanja Modal. Belanja modal mempunyai dampak yang signifikan dan negative terhadap pendapatan perkapita dalam hubungan langsung, tetapi juga

mempunyai hubungan yang positif dalam hubungan tidak langsung melalui Pendapatan Asli daerah.

Pendapatan Asli daerah sangat berpengaruh terhadap Pendapatan perkapita, tetapi pertumbuhan yang terjadi masih kurang merata sehingga banyak ketimpangan/jarak ekonomi antar daerah. Dana Alokasi Umum mempunyai dampak yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui Belanja Modal. Persamaan penelitian *David Harianto dan Priyo Hari Adi*, ini dengan penelitian yang sedang diadakan ini adalah, sama-sama memiliki variabel Pendapatan Asli daerah (PAD) dan Belanja Publik atau belanja modal. Penelitian ini sama-sama menggunakan pemodelan structural equation model (SEM) dengan persamaan simultan.

Sedangkan Perbedaan penelitian ini adalah: Bila penelitian *David Harianto dan Priyo Hari Adi* menghipotesiskan Belanja Modal berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, sedangkan pada penelitian ini justru Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal. Periode penelitian juga berbeda. Di samping itu, *David Harianto dan Priyo Hari Adi* menitik beratkan penelitiannya pada PAD, DAU, Belanj Publik yang berpengaruh terhadap Pendapatan Perkapita.

- e. **Joko Waluyo (2007)**, Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar daerah di Indonesia Tahun 2001-2005. Asumsi utama yang digunakan dalam model penelitian Joko Waluyo ini adalah tidak ada keterkaitan antar

daerah (tak ada migrasi penduduk antar daerah, pergerakan modal dan barang antar daerah). Teknik estimasi yang digunakan adalah Two Stage Least Square (TSLS). Evaluasi terhadap kualitas model dilakukan dengan menggunakan RMSE, MAE, MAP, dan TIC.

Data yang digunakan dalam penelitiannya adalah data atas dasar harga konstan tahun 2003 dan berupa data level pada tingkat propinsi. Sumber data utama berasal dari publikasi Biro Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI), dan Departemen Keuangan. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berdampak meningkatkan pertumbuhan ekonomi relatif lebih tinggi di daerah pusat bisnis dan daerah yang kaya sumber daya alam daripada daerah bukan pusat bisnis dan miskin sumber daya alam. Mekanisme transfer dana PKPD selama ini (UU No. 33 tahun 2000) lebih menguntungkan bagi daerah yang kaya sumber daya alam melalui mekanisme bagi hasil SDA. Alokasi dana bagi hasil SDA untuk investasi sektor kunci dalam perekonomian akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Mekanisme DBHP lebih menguntungkan daerah kota yang merupakan pusat bisnis dan industri, karena basis pajak daerahnya lebih tinggi.

Sedangkan daerah-daerah yang miskin SDA dan bukan pusat bisnis dan industri mengandalkan penerimaan daerahnya dari DAU, dan DAK. Di samping itu desentralisasi fiskal akan berdampak mengurangi ketimpangan pendapatan antardaerah terutama antara daerah-daerah di Pulau Jawa dengan Luar Pulau Jawa dan Antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Hal ini

disebabkan oleh mekanisme *equalizing transfer* melalui dana PKPD akan mengurangi pembangunan yang bersifat Jawa sentris. Tidak banyaknya SDA (Minyak, gas, dan kehutanan) yang terdapat di Pulau Jawa berdampak terhadap penerimaan dana bagi hasil SDA Pulau Jawa relatif lebih kecil daripada daerah kaya SDA di luar Pulau Jawa.

Walaupun diimbangi dengan lebih baiknya penerimaan dana bagi hasil pajak dan adanya DAU, dan DAK.

- f. **Hadi Sasana, Achma Hendra S. (2002).** Melakukan studi tentang Pengaruh Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat-daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klaten . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh hubungan fiskal pemerintah pusat-daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten. Variabel fiskal meliputi : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sumbangan dan bantuan, dan tenaga kerja. Data yang digunakan adalah data runtun waktu (*time series*) dari tahun 1979 sampai dengan tahun 2001. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda dengan diagnosis test.

Analisis ekonometrika berupa uji asumsi klasik, serta analisa ekonomi. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Pajak Bumi dan Bangunan, dan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB). Variabel PAD, dan variabel sumbangan bantuan, tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten. Hubungan fiskal pemerintah pusat-daerah Kabupaten

Klaten menunjukkan tingkat ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat.

- g. **Saragih (2003)** Analisis Strategi Peningkatan PAD kota Bau-bau. Hasilnya adalah bahwa peran PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan masih rendah meskipun perolehannya setiap tahun mengalami peningkatan.
- h. **Radianto (1997)** Peranan PAD dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah. penelitian yang dilakukan di Daerah Tingkat II Maluku mengatakan bahwa peranan PAD dalam membiayai pembangunan Daerah Tingkat II Maluku masih sangat rendah. Hal ini tercermin dari Indeks Kemampuan Rutin (IKR) Daerah Tingkat II Maluku yang masih berada jauh di bawah rata-rata IKR Daerah Tingkat II secara nasional. Misalnya selama kurun waktu Pelita V (1991/1992-1993/1994) IKR Daerah Tingkat II Maluku berturut-turut adalah sebesar 8,1 persen, 7,3 persen, dan 6,5 persen.
- i. **Kuncoro (2003)** memfokuskan pengamatannya pada kenyataan rendahnya PAD, sehingga ketergantungan keuangan Pemerintah Daerah sangat tinggi kepada Pemerintah Pusat. Untuk mengurangi beban subsidi Pemerintah Pusat, Kuncoro menganjurkan diberikannya otonomi keuangan daerah yang relatif luas, sehingga daerah mampu menggali sumber-sumber keuangan sendiri dan memanfaatkannya secara optimal. Lebih lanjut diungkapkan bahwa PAD menunjukkan kontribusi yang sangat rendah terhadap total penerimaan daerah di propinsi di Indonesia

rata-rata hanya 15,4 % selama tahun 1984/1985– 1990/1991. Artinya dibanding dengan PAD, subsidi dari Pemerintah Pusat lebih banyak dalam membiayai pengeluaran daerah. PAD hanya 30 % mampu membiayai pengeluaran rutin. Untuk Daerah Tingkat II, PAD hanya mampu membiayai pengeluarannya sebesar kurang dari 22 %. Sebagian besar Daerah Tingkat II di Indonesia prosentase PAD terhadap total belanja daerah kurang dari 15 %.

- j. **Mardiasmo dan Akhmad Muklifatih, (2000)** yang melakukan penelitian di Kabupaten Magelang menyimpulkan bahwa ketergantungan daerah terhadap sumber penerimaan dari sumbangan dan bantuan Pemerintah Pusat dan dari Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah masih sangat tinggi. Dalam era otonomi daerah akan semakin sulit mendapatkan sumbangan dan bantuan sehingga perlu biaya untuk meningkatkan pendapatan daerah sendiri, terutama dari pajak daerah dan retribusi daerah.
- k. **Miller dan Russek (1997)** meneliti semua negara bagian di Amerika Serikat mengenai struktur pajak dan pertumbuhan ekonomi, dan menemukan bahwa pajak dapat berpengaruh positif dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Implikasinya adalah Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah harus dapat mendorong penerimaan melalui pajak dan menggunakannya secara tepat untuk membiayai pengeluaran yang bersifat strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

2. Pertumbuhan Ekonomi Dalam Otonomi Daerah

- a. **Waluyo, Joko (2007).** Melakukan studi tentang pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan antar propinsi, dan kawasan sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia (tahun 2001 -2005). Hasil yang didapat menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berdampak meningkatkan pertumbuhan ekonomi relatif lebih tinggi di daerah pusat bisnis dan daerah yang kaya sumber daya alam daripada daerah bukan pusat bisnis dan miskin sumber daya alam.

Mekanisme transfer dana PKPD selama ini (UU No. 33 tahun 2000) lebih menguntungkan bagi daerah yang kaya sumber daya alam melalui mekanisme bagi hasil SDA. Alokasi dana bagi hasil SDA untuk investasi sektor kunci dalam perekonomian akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Mekanisme DBHP lebih menguntungkan daerah kota yang merupakan pusat bisnis dan industri, karena basis pajak daerahnya lebih tinggi. Sedangkan daerah-daerah yang miskin SDA dan bukan pusat bisnis dan industri mengandalkan penerimaan daerahnya dari DAU, dan DAK. Di samping itu desentralisasi fiskal akan berdampak mengurangi ketimpangan pendapatan antardaerah terutama antara daerah-daerah di Pulau Jawa dengan Luar Pulau Jawa dan Antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI).

- b. **M. Govinda Rao (2000).** Desentralisi Fiskal di Federasi India. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rao (2000), disimpulkan bahwa pada dasarnya pelaksanaan desentralisasi fiskal di India maupun

di Indonesia tidak berbeda jauh. Ada banyak potensi yang seharusnya masih bisa digali. Tetapi yang terjadi adalah banyaknya penyimpangan dalam pelaksanaan tersebut. Baik pada tingkat daerah maupun tingkat pusat.

Seharusnya dengan desentralisasi fiskal, akan lebih menguntungkan pemerintah daerah dalam usahanya untuk menaikkan pendapatan daerahnya sehingga mampu memenuhi kebutuhan warganya. Tetapi yang terjadi adalah adanya defisit fiskal. Agregat defisit fiskal jauh lebih tinggi dibanding yang dapat terukur. Hal ini tidak terlepas dari adanya *moral hazard* pada unsur aparat pemerintahan.

- c. **Martines-Vasquez dan Robert M. Mc Nab (2001).** Fiscal decentralization, macrostability and growth. Penelitian Martinez dan Robert M. McNab mengkaji tentang pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Dijelaskan bahwa hubungan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi belum tentu mempunyai dampak secara langsung. Ada potensi bermacam-macam efek dari desentralisasi tidak langsung pada pertumbuhan ekonomi melalui efisiensi konsumen, efisiensi produsen, distribusi sumber daya geografis, kestabilan makro ekonomi, korupsi. Desentralisasi akan mempunyai dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi apabila desentralisasi fiskal dipusatkan pada pengeluaran atau pembelanjaan public.

- d. **Bambang Brodjonegoro (2002)**. Penelitian Brodjonegoro dengan tema "*The impact of decentralization process to the Indonesia regional economies: a simultaneous economic approach*". Menggunakan model ekonometrika *two stage least squares model*. Hasil analisis menjelaskan bahwa dana transfer dari pemerintah yang meliputi dana alokasi umum, bagi hasil sumber daya alam dan PPh menyebabkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan.
- e. **Raksaka Mahi (2001)**. Mahi meneliti tentang dampak desentralisasi dengan judul "*Fiskal decentralization : It's Impact on Cities Growth*". Menggunakan model ekonometrika simultan *two stage least square model*. Variabel desentralisasi fiskal diukur dengan dana bagi hasil, DAU, dan DAK. Hasil penelitian disimpulkan bahwa (1) Dana Alokasi Umum lebih menjanjikan pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan yang lainnya walaupun kebijakan dana alokasi umum tidak mendukung pemerataan ekonomi antar daerah. (2) Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak menurunkan pertumbuhan ekonomi. (3) Kebutuhan Bagi Hasil Sumber Daya Alam berpotensi mengurangi tingkat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesenjangan antar daerah.
- f. **Arachi (2002)**. Penelitian Arachi (2002) tentang "*Fiskal decentralization and the Autonomy of Local Government in Italy*", bertujuan untuk menganalisis konsistensi antara tujuan peningkatan efisiensi melalui desentralisasi fiskal pada setiap daerah. Hasil penelitian disimpulkan bahwa reformasi mendasar di Italia telah menghilangkan banyak

inefisiensi dari sistem masa lalu tentang keuangan publik daerah. Banyak isu yang harus dikerjakan di masa mendatang, pertama prinsip keseragaman dalam standar kesehatan di seluruh penjuru negeri, dengan menghapuskan jenis pungutan keuangan apapun agar dapat memaksa tanggung jawab keuangan pemerintah daerah. Kedua, insentif-insentif untuk melakukan kebijakan-kebijakan pajak otonomus pada tingkat daerah bisa dihindari dengan mekanisme baru redistribusi antar wilayah,

- g. Kanokpan Lao-Araya (2002).** Penelitian Kanokpan Lao-Araya (2002) dengan tema "*Effect of Decentralization Strategy on Macroeconomic Stability in Thailand*" mengidentifikasi dua kekurangan penting dalam program desentralisasi di Thailand dan mengusulkan dua kemungkinan pemecahan yang dapat dilakukan oleh pemerintah Thailand. Masalah pertama adalah pendekatan *unbalanced* dalam desentralisasi fiskal, dimana pemerintah daerah dijamin memperoleh pendapatan melalui transfer dari pemerintah pusat namun disisi lain tidak menuntut tanggung jawab untuk mengendalikan pembelanjaan daerahnya. Hal ini mendorong otoritas pemerintah daerah untuk melakukan pembelanjaan secara kurang bertanggung jawab, dan kebijakan ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mencari pinjaman secara serampangan. Hal ini akhirnya dapat diprediksi akan mengakibatkan ketidakstabilan makro ekonomi. Masalah kedua, meskipun pemerintah daerah menikmati bagian pendapatan yang lebih besar dibanding pemerintah pusat, namun pemerintah daerah tidak secara serta merta dapat diasumsikan memiliki

tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas pelayanan publik yang sebelumnya disediakan oleh pemerintah pusat. Sehingga walaupun dalam jangka menengah pemerintah meningkatkan alokasi pendapatannya kepada pemerintah daerah namun hal tersebut akan selalu kurang karena pemerintah daerah memiliki kebijakan pembelanjaan yang berbeda-beda.

3. Investasi dan Petumbuhan Ekonomi

- a. **Purbadharmaja, Ida Bagus Putu (2003).** Meneliti tentang Implikasi Variabel Pengeluaran dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis variabel-variabel ekonomi yang mempengaruhi PDRB Propinsi Bali dan menginterpretasikan implikasi variabel-variabel ekonomi yang memberikan kontribusi utama terhadap PDRB Propinsi Bali. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa data deret waktu dari tahun 1999 sampai dengan 2002.

Data deret waktu diuji kestasioneritasnya dengan menggunakan *autocorrelation fuction* metode *correlogram*. Setelah itu dilakukan uji analisis faktor metode *principal component analisis* (PCA) untuk membentuk satu set variabel ortogonal yang bebas autokorelasi dan multikolinieritas. Dari variabel yang terbentuk lewat PCA kemudian dilihat bentuk model regresi bergandanya dengan melakukan uji mckinnon-white and davidson (MWD) apakah model berbentuk linier atau log linier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel ekonomi yang berpotensi mempengaruhi PDRB Propinsi Bali diidentifikasi sebagai variabel pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, nilai tukar rupiah terhadap US dollar, jumlah kredit modal kerja, ekspor netto, nilai hasil produksi pertanian, investasi swasta domestik, investasi swasta asing, jumlah angkatan kerja, dan jumlah wisatawan asing.

Setelah melewati metode PCA dan MWD diperoleh model berbentuk linier dengan hasil menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh nyata terhadap PDRB adalah variabel pengeluaran dengan nilai t statistik sebesar 19.79 (signifikan), sedangkan variabel yang tidak mempengaruhi PDRB secara nyata adalah variabel investasi dengan nilai t statistik sebesar 0.75 (nonsignifikan). Variabel investasi tidak signifikan terhadap PDRB disebabkan oleh investasi yang dilakukan di Bali tidak efisien. Interpretasi terhadap implikasi variabel ekonomi dalam model menunjukkan bahwa variabel ekonomi yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Propinsi Bali adalah nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Hal ini dimungkinkan terjadi karena adanya pola pikir *dollar minded* dalam masyarakat di Bali. Pengeluaran konsumsi pemerintah daerah yang tinggi menunjukkan tingginya ketergantungan keuangan pemerintah daerah pada pemerintah pusat.

- b. **Thomas G. Rawski (2002)**, Metode analisis penelitian ini menggunakan *Multiple Regression* dan *Deskriptif Analysis*, Data yang dipergunakan

adalah: China Economic Quarterly dari 1999-I s/d 2002-I perihal *The data for capital formation cover completed investment in fixed assets*. Penelitian *Rawski*, 2002 ini mengamati investasi yang terdapat di China dalam perspektif ekonomi makro dan ekonomi mikro. *Rawski* memperoleh kesimpulan bahwa dalam dua decade reformasi di China, mekanisme Investasi yang diterapkan mayoritas mempertahankan keistimewaan sistem perencanaan lama.

Dalam level makro ekonomi, terdapat fluktuasi musiman, pengembalian yang lambat (*low return*), *excess capacity*, dan tumpukan kerja konstruksi yang belum selesai (*constructions backlogs*), sedangkan pada level ekonomi mikro ditemukan adanya faktor harga-harga yang terdistorsi, keterlibatan pejabat pemerintah yang berlebihan mengakibatkan kemiskinan. Kesimpulan *Rawski* menyangkut sistem investasi menunjukkan adanya hambatan berinvestasi untuk pertumbuhan ekonomi China. Lokasi penelitian adalah di China, Hong kong, Taiwan dan Korea. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang diadakan ini adalah, sama-sama memiliki variabel investasi dan pertumbuhan ekonomi, di mana investasi sama-sama diduga memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Perbedaan penelitian ini adalah alat analisis yang dipergunakan, data, lokasi penelitian dan periode penelitian. Di samping itu, *Thomas G. Rawski* (2002) menitik beratkan penelitiannya dalam dua perspektif yaitu perspektif ekonomi makro dan perspektif ekonomi mikro.

c. **Rofikoh Rokhim (2007)**. Meneliti tentang Investasi bagi pertumbuhan berkelanjutan. Secara sederhana, tingkat investasi yang tinggi akan meningkatkan kapasitas produksi, yang pada akhirnya berujung pada pembukaan lapangan kerja baru. Dengan begitu, tingkat pengangguran bisa direduksi dan pendapatan masyarakat pun meningkat. Adanya investasi juga memungkinkan terjadinya transfer teknologi dan pengetahuan (knowledge) dari negara maju ke negara berkembang. Kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi bisa dilihat dari sisi permintaan dan penawaran.

Dari sisi permintaan, peningkatan investasi akan menstimulasi pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan permintaan yang efektif. Total permintaan efektif sendiri terdiri dari konsumsi, investasi domestik kotor, dan net ekspor. Kontribusi ketiga variabel tersebut terhadap pertumbuhan dapat diukur dari rasio peningkatan faktor-faktor tersebut terhadap peningkatan pengeluaran nasional kotor riil (real gross national expenditure (GNE)). Dari sisi penawaran, peningkatan investasi akan merangsang pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lebih banyak cadangan modal yang kemudian berkembang dalam bentuk peningkatan kapasitas produksi. Kontribusi tersebut akan bergantung pada proporsi pendapatan nasional yang diinvestasikan (tingkat investasi) dan peningkatan rasio output terhadap modal (efisiensi investasi).

d. **Amiruddin AT (2005)**. Meneliti tentang Pengaruh Investasi di Sektor Industri terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi

Kota Batam. Permasalahan yang perlu didalami adalah: (1) Bagaimana pengaruh Investasi sektor Industri terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Batam (2) Bagaimana pengaruh Investasi Sektor Industri terhadap Pembentukan Nilai Tambah Per Tenaga Kerja di Kota Batam. (3) Bagaimana pengaruh investasi sektor Industri terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Batam (4) Bagaimana Penyerapan Tenaga Kerja berpengaruh terhadap Pembentukan Nilai Tambah Per Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Batam (5) Bagaimana Pengaruh Inflasi, Tingkat Bunga, Kurs Mata Uang Asing terhadap Investasi Sektor Industri di Kota Batam (6) Bagaimana pengaruh inflasi, Tingkat Bunga, Kurs Mata Uang Asing terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Batam (7) Bagaimana pengaruh Inflasi, Tingkat Bunga, Kurs Mata Uang Asing terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Batam. (8) Bagaimana pengaruh Pembentukan Nilai Tambah Per Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Batam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, laju pertumbuhan ekonomi Kota Batam pada tahun 2000 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2000 pertumbuhan ekonomi Kota Batam mencapai 7,72 persen, sedangkan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 1999, pertumbuhan ekonomi Kota Batam mencapai 6,38 persen. jika dilihat dan struktur perekonomian Kota Batam menurut lapangan usaha Tahun 2001, sebesar 69,70% didominasi oleh sektor Industri, diikuti sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan sebesar 5,69%,, sedangkan sektor Pertambangan dan Penggalan hanya 0,81 %. Kedua, pertumbuhan Investasi di Pulau

Batam menunjukkan angka yang tinggi, yaitu sebesar 184 % dan tahun 1990 s/d tahun 1999. Ketiga, nilai investasi yang ditanamkan pihak swasta, sektor Industri menjadi primadona yang menyerap tak kurang dari 50 persen. Keempat, hasil analisis dengan regresi berganda menunjukkan bahwa (a) Kenaikan nilai investasi pada sektor Industri ternyata secara signifikan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Kenaikan Investasi pada sektor Industri berpengaruh negatif terhadap pembentukan nilai tambah dan pengaruh ini signifikan. (b) Kenaikan investasi juga berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan Investasi belum mampu memacu pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan oleh adanya krisis ekonomi (c) Penyerapan tenaga kerja berpengaruh negatif terhadap pembentukan nilai tambah di Kota Batam. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga kerja yang terserap pada sektor Industri belum mampu memberikan nilai tambah yang positif terhadap perekonomian di Kota Batam. (d) Pengaruh suku bunga dan inflasi terhadap investasi tidak signifikan. (e) Pengaruh tingkat Inflasi, dan suku bunga terhadap penyerapan tenaga kerja di kota Batam ternyata tidak signifikan, sedangkan kurs rupiah berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. (f) Pengaruh tingkat inflasi dan suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Batam ternyata tidak signifikan, sedangkan kurs rupiah berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Batam. (g) Pengaruh

pembentukan nilai tambah terhadap pertumbuhan ekonomi ternyata signifikan.

- e. **Toni Eko Sucahyo (2003).** Meneliti tentang Pengaruh PMDN, PMA, tenaga kerja dan ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi (menggunakan indikator PDRB) di Propinsi Jawa Tengah (1986.I-2002.IV). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah PMDN, PMA, Tenaga Kerja dan Ekspor berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Jawa Tengah. Penelitian ini merupakan analisis terhadap data sekunder. Data yang digunakan adalah data deret waktu (*time series*) dari tahun 1986 kuartal I sampai tahun 2002 kuartal IV.

Alat analisis yang digunakan adalah model dinamis *Partial Adjustment Model* (PAM), dimana pertumbuhan ekonomi menggunakan indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai variabel dependen dan PMDN, PMA, Tenaga Kerja (L) dan Ekspor (X) sebagai variabel independen. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : PMDN, PMA, Tenaga Kerja (L) dan Ekspor (X) berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Propinsi Jawa dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Berdasarkan uji *Partial Adjustment Model* (PAM) bahwa dalam jangka pendek semua variabel, yaitu: PMDN, PMA, L dan X secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Propinsi Jawa Tengah. Tetapi secara parsial, hanya variabel PMA dan Tenaga Kerja yang berpengaruh signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi (PDRB) Propinsi Jawa Tengah. Besarnya koefisien regresi konstanta model PAM jangka pendek sebesar -3,3992. Hal ini berarti dalam jangka pendek pertumbuhan ekonomi (PDRB) sebesar -3,3992 juta Rupiah tanpa dipengaruhi oleh PMDN, PMA, L dan X. Jika PMDN dan PMA masing-masing naik 1%, maka pertumbuhan ekonomi (PDRB) akan naik masing-masing sebesar 0,0032% (*inelastis*) dan 0,0071% (*inelastis*).

Pertumbuhan ekonomi (PDRB) akan naik 1% bila L naik sebesar 0,3119% (*inelastis*). Demikian juga pertumbuhan ekonomi (PDRB) naik sebesar 1% apabila X naik sebesar 0,0266% (*inelastis*). Pengujian dengan model PAM menunjukkan besarnya koefisien penyesuaian adalah sebesar $= (1 - 0,864) = 0,136$. Hal ini menunjukkan bahwa 13,6% merupakan perbedaan antara pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya dengan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan tercapai dalam satu periode. Dengan nilai koefisien ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang masing-masing koefisien lebih besar dibanding koefisien dalam jangka pendek.

Besarnya koefisien regresi konstanta dalam jangka panjang sebesar -25,0078. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi (PDRB) dalam jangka panjang adalah -25,0078 juta Rupiah tanpa dipengaruhi PMDN, PMA, L dan X. Nilai koefisien elastisitas jangka panjang masing-masing variabel adalah: PMDN = 0,0238 (*inelastis*), PMA = 0,0522 (*inelastis*), L = 2,2948 (*elastis*), dan X = 0,1956 (*inelastis*). Saran yang diberikan dalam penelitian ini antara lain, untuk menggalakkan investasi swasta (PMDN

dan PMA). (i) Pemerintah harus tetap meningkatkan iklim investasi yang kondusif bagi terlaksananya berbagai proyek investasi. Langkah yang ditempuh antara lain dengan penyederhanaan birokrasi dalam proses penanaman modal, keterpaduan koordinasi kebijakan investasi di tingkat pusat dan daerah, stabilitas ekonomi yang mantap, penegakan supermasi hukum, penambahan dan perawatan infrastruktur, serta faktor keamanan yang kondusif. (ii) Mengoptimalkan sistem informasi yang lengkap dan mudah di akses, yang berguna untuk mempromosikan potensi suatu daerah sehingga akan membuka peluang investasi.

Sementara dalam rangka peningkatan mutu tenaga kerja, langkah yang harus ditempuh ialah (i) Pemerintah harus dapat mengalokasikan dana pendidikan yang lebih besar dalam APBD. (ii) Pemerintah dapat mendorong sektor swasta untuk berinvestasi pada sumber daya manusia (*human capital investment*). Terakhir dalam upaya peningkatan peranan ekspor, (i) pemerintah harus meningkatkan jumlah komoditas ekspor yang kandungan bahan baku impornya rendah dan prosesnya dikuasai oleh pihak domestik. (ii) Meningkatkan ketrampilan dan keahlian tenaga kerja dalam upaya meningkatkan kualitas komoditas ekspor yang berdaya saing tinggi. (iii) Meningkatkan pengembangan sektor UKM yang berorientasi ekspor. Untuk itu pemerintah dapat memberikan kebijakan berupa penyederhanaan birokrasi ekspor, peningkatan daya saing ekspor dan memberikan kredit ekspor untuk pengembangan modal, khususnya kemudahan persyaratan untuk memperoleh kredit dari lembaga keuangan formal.

4. Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi

- a. **Arif, Muhammad Yusuf (2008).** Melakukan studi tentang Analisis Pengaruh Investasi, Inflasi, Pengeluaran Pemerintah, Penawaran Uang, dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1981-2006". Hasil penelitian menunjukkan bahwa 78,8 persen variasi dari variabel pertumbuhan ekonomi yang terlihat dari angka Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dapat dijelaskan oleh variabel Investasi (I), variabel Inflasi (INF), variabel Pengeluaran Pemerintah (G), variabel jumlah uang beredar (M1) dan variabel ekspor (X). Sedangkan sisanya yaitu 21,2 persen dijelaskan oleh variabel-variabel bebas lain di luar model yang diestimasi.
- b. **Amiri Amir (2006).** Meneliti tentang Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara tingkat pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi. Apabila pertumbuhan ekonomi meningkat 1 persen maka pengangguran akan meurun sekitar 0,46 persen. Dengan demikian, penggambaran kurva Phillip yang menghubungkan inflasi dengan tingkat pengangguran untuk kasus Indonesia tidak tepat untuk digunakan sebagai kebijakan untuk menekan tingkat pengangguran. Hasil analisis statistik pengujian pengaruh inflasi terhadap pengangguran selama periode 1980 – 2005 seperti terlihat hasil analisis statistik di bawah ini juga membuktikan secara meyakinkan

bahwa tidak ada pengaruh yang nyata antara inflasi dengan tingkat pengangguran.

- c. **Erna Gayanti (2004)**. Melakukan studi tentang Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pasca Krisis di Indonesia (Januari 1999-Desember 2003). menunjukkan bahwa inflasi untuk jangka pendek memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien sebesar $-0,770305$, sedangkan dalam jangka panjang mempunyai pengaruh positif dan signifikan dengan koefisien sebesar $0,245843$. Variabel Kurs jangka pendek mempunyai pengaruh negatif dan signifikan dengan koefisien sebesar $-2,430408$, sedangkan dalam jangka panjang mempunyai pengaruh negatif dan signifikan dengan koefisien sebesar $-1,190790$. Variabel JUB menunjukkan untuk jangka pendek mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan sebesar $-0,952125$ sedangkan untuk jangka panjang mempunyai pengaruh positif dan signifikan dengan koefisien sebesar $0,067834$. Variabel SBI untuk jangka pendek mempunyai pengaruh negatif dan signifikan dengan koefisien sebesar $-1,032986$ dan dalam jangka panjang mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan dengan koefisien sebesar $-1,190790$.

5. Tingkat Suku Bunga dan Pertumbuhan Ekonomi

- a. **Fathurrahman Anwar (2008)**. Meneliti tentang Pengaruh Tingkat Bunga SBI Terhadap Dunia Bisnis. Central Bank Rate (SBI di Indonesia) pada dasarnya dimaksudkan untuk mengontrol inflasi (peningkatan harga

barang/ jasa secara umum) dan laju pertumbuhan ekonomi, dua hal yang tidak selalu akur. Laju pertumbuhan yang tinggi bisa memacu inflasi. Logika yang sering dibayangkan adalah saat terjadi pertumbuhan yang tinggi, daya beli masyarakat meningkat sehingga permintaan barang dan jasa meningkat. Kalau peningkatan jumlah barang dan jasa ini tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah jasa yang disediakan, dalam jangka pendek akan terjadi inflasi. Inflasi tentu saja buruk karena bisa mengurangi kemampuan beli setiap orang. SBI bisa digunakan untuk dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dengan tingkat inflasi yang relatif rendah. Saat BI melihat tingkat inflasi yang terlalu tinggi, BI biasanya akan mengintervensi dengan meningkatkan suku bunga.

Peningkatan suku bunga di satu sisi akan membuat biaya utang yang harus ditanggung pengusaha meningkat. Ini berkaitan dengan peningkatan tingkat bunga atas dana yang bersedia disalurkan Bank. Peningkatan SBI dengan sendirinya akan diikuti dengan peningkatan tingkat bunga atas dana yang disediakan Bank Komersial. Ini terjadi karena peningkatan tingkat bunga SBI akan mendorong pihak Bank untuk meningkatkan pembelian SBI. Pihak Bank komersial berfikir bahwa dari pada menyalurkan uang kepada pengusaha yang punya resiko gagal bayar, lebih baik uang tersebut di belikan SBI yang resiko rendah karena dijamin pemerintah dan memiliki tingkat bunga yang relatif tinggi. Akibatnya jumlah dana yang bersedia mereka pinjamkan ke investor menurun. Sebagaimana hukum pasar, penurunan jumlah uang yang

bersedia disalurkan bank tersebut, yang tidak disertai dengan penurunan jumlah permintaan pinjaman, dalam jang pendek akan berakibat pada meningkatnya tingkat bunga pinjaman. Dengan kata lain dana pinjaman relatif mahal buat para pengusaha.

- b. **Sucahyo, Indra Budi (2008).** Meneliti tentang Analisis Hubungan Suku Bunga SBI, Pertumbuhan Ekonomi, dan *Financial Deepenn* di Indonesia. Penelitian ini berusaha melihat hubungan suku bunga SBI sebagai instrumen kebijakan moneter oleh Bank Indonesia terhadap kedalaman sektor keuangan (*financial deepening*) serta pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan periode tahun 1997-2006. Arah dan strategi kebijakan Bank Indonesia pada tahun 2007 akan mendorong proses pendalaman sektor keuangan nasional (*financial deepening*) melalui penciptaan instrumen baru dan penggunaan kebijakan moneter yang telah ada yaitu suku bunga SBI. Secara teoritis, pertumbuhan ekonomi dan *financial deepening* memiliki hubungan dua arah dan saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga secara tidak langsung suku bunga SBI memiliki hubungan dengan pertumbuhan ekonomi dan ini seseuai dengan sasaran kerangka kebijakan moneter Bank Indonesia.

Hasil penelitian dari *impulse response* dan *variance decomposition* menunjukkan suku bunga SBI memiliki hubungan positif dengan *financial deepening*, sedangkan hubungan *financial deepening* dan pertumbuhan ekonomi bersifat *supply-leading relationship*. Selain itu, suku bunga SBI memiliki hubungan yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

c. **Sunny Naury (2005).** Meneliti tentang Analisis Uang Beredar, Suku Bunga dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 1997-2002. Metode yang digunakan dalam penelitian ini OLS yang dikembangkan oleh Granger (1996), hasil estimasi dari akar-akar unit, variabel jumlah uang beredar, suku bunga dan pertumbuhan ekonomi stasioner pada derajat turunan pertama. Variabel-variabel dalam penelitian ini dilakukan uji derajat integrasi pada tingkat kepercayaan tertentu. Nilai yang dihasilkan dari estimasi OLS kemudian digunakan dalam uji Granger Causality. Untuk mengetahui hubungan kausalitas antara jumlah uang beredar dan suku bunga dan hubungan kausalitas antara jumlah uang beredar dengan pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan data M_2 , suku bunga deposito dan PDB di Indonesia selama periode 32 tahun. Selanjutnya penelitian ini menggunakan tes diagnosis sebagai pelengkap dari akhir penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan dari uji akar-akar unit dan derajat integrasi dari variabel penelitian adalah stasioner dalam tingkat kepercayaan 1. Pada uji kausalitas Granger menemukan bahwa jumlah uang beredar memiliki hubungan dengan tingkat bunga (i) dan pertumbuhan ekonomi (PDB) memiliki hubungan dengan jumlah uang beredar (M_2) secara signifikan. Dimana, peningkatan M_2 akan menyebabkan peningkatan nilai dari suku bunga dan peningkatan dari pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan peningkatan dari jumlah uang beredar M_2 . Hasil dari penelitian ini tidak sesuai dengan teori Keynes yang menjadi dasar dalam analisis penelitian.

Tabel 2.1. Rekapitulasi Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Aspek Yang Diteliti	Lokasi	Tahun
1.	Daslan Simanjuntak	Pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Labuhan Batu	2006
2	Waluyo, Joko	Pertumbuhan Ekonomi dan Ketipangan Pendapatan	Indonesia	2007
3	Hadi Sasana	Pengaruh Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat-daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klaten	Klaten	2007
4	Saragih	Desentralisasi Fiskal dan Keuangan daerah dalam Otonomi	Indonesia	2003
5	Radianto	Peranan PAD dalam Mernbiayai Pembangunan Daerah	Maluku	1997
6	Kuncoro	Peranan PAD dan Tingkat Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah	Indonesia	2003
7	Mardiasmo dan Akhmad Mukhlifatih	Ketergantungan Pemerintah daerah terhadap sumber penerimaan dari Sumbangan Pemerintah Puat	Magelang	2000
8	Miller dan Russek	Struktur Pajak dan Pertmbuhan Ekonomi	Amerika Serikat	1997
9	Govinda Rao	Desentralisasi Fiskal di Cina dan India	India & China	2004
10	Martines-Vasquez dan Robert M. McNab	Pengaruh Desentralisasi- iskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Indonesia	2001
11	Bambang Brodjonegoro	<i>The Impact of decentralization process to the Indonsian regional economics: a stimulanuou economic approach</i>	Indonesia	2002
12	Raksaka mahi	<i>Fiskal decentralization : It's Impact on Cities Growth</i>	Indonesia	2001
13	Arachi	<i>Fiskal decentralization and the Autonomy of Local Government in Italy</i>	Italy	2002
14	Kanokpan Lao-Araya	<i>Effect of Decentralization Strategy on Macroeconomic Stability in Thailand</i>	Thailand	2002
15	Purbadharmaja, Ida Bagus Putu	Implikasi Variabel Pengeluaran dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Bali	2003
16	Rofikoh Rokhim	Investasi bagi pertumbuhan berkelanjutan	Indonesia	2007
17	Amiruddin AT	Pengaruh Investasi di Sektor Industri terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi	Batam	2005
18	Toni Eko Sucahyo	Pengaruh PMDN, PMA, tenaga kerja dan ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi (menggunakan indikator PDRB)	Jawa Tengah	2003

19	Arif, Muhammad Yusuf	Pengaruh Investasi, Inflasi, Pengeluaran Pemerintah, Penawaran Uang, dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Indonesia	2008
20	Amri Amir	Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran	Indonesia	2006
21	Ema Gayanti	Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pasca Krisis	Indonesia	2004
22	Fathurrahman Anwar	Tingkat Bunga SBI Terhadap Dunia Bisnis. Central Bank Rate	Indonesia	2008
23	Sucahyo, Indra Budi	Analisis Hubungan Suku Bunga SBI, Pertumbuhan Ekonomi, dan Finansial Deepenn	Indonesia	2008
24	Sunny Naury	Analisis Uang Beredar, Suku Bunga dan Pertumbuhan Ekonomi	Indonesia	2005

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN

A. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan dan arah hubungan antar konsep sebagai landasan utama penelitian yang akan dilaksanakan. Konsep dan hubungan antar konsep diperoleh dari teori dan hasil penelitian sebelumnya. Sebelum menyusun kerangka konseptual, studi ini menjelaskan terlebih dahulu kerangka proses berpikir. Kerangka proses berpikir dimaksudkan untuk memberi tuntunan berpikir deduktif melalui teori dan konsep yang telah ada, serta memberikan tuntunan induktif untuk memperluas wawasan dalam melakukan analisis melalui studi empiris. Berdasarkan kerangka berfikir dan kerangka konseptual, maka akan dibuat hipotesis penelitian sebagai usaha agar penelitian ini dapat mencapai tujuannya.

Pertumbuhan ekonomi dapat terjadi melalui peningkatan peranan sektor – sektor ekonomi dan dari segi permintaan yaitu sektor konsumsi yang terdiri dari belanja modal dan belanja barang. Dari pertumbuhan melalui segi permintaan diperankan oleh sektor perbankan dalam bentuk pemberian kredit konsumsi sedangkan pertumbuhan ekonomi melalui pendekatan pengeluaran lewat investasi swasta (sektor riil).

Dalam otonomi daerah, pemerintah pusat melakukan kebijakan desentralisasi fiskal dalam bentuk Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan sumber pendapatan yang sah. Dana-dana

tersebut diberikan kepada daerah untuk meningkatkan pembangunan disegala bidang pada akhirnya tercermin pada pertumbuhan ekonomi pada pihak yang bersangkutan.

Pada tingkat daerah, pemerintah daerah berpeluang meningkatkan pembangunan ekonomi melalui peranan Pendapatan Asli Daerah. Diharapkan Dana dari PAD akan menjadi sumber pengeluaran pemerintah untuk investasi sehingga memperbesar peranan PAD, sedangkan Investasi Swasta diharapkan memperbesar laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur. Dana Perimbangan Keuangan Daerah terutama DAU terdiri dari Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan harus dibelanjakan secara efisien dan efektif. Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari penerimaan pajak dan retribusi, diharapkan dapat mendorong peningkatan pembangunan daerah yang selanjutnya bersama pihak swasta mampu memperbesar perannya terhadap sektor-sektor ekonomi yang secara nyata dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Pertumbuhan ekonomi melalui segi permintaan yang diperankan oleh sektor perbankan dalam bentuk pemberian kredit konsumsi, sedangkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan penawaran lewat investasi swasta (sektor riil). Di Indonesia pertumbuhan ekonomi lebih banyak bersumber dari segi permintaan.

Dalam otonomi daerah pemerintah pusat melaksanakan kebijakan disentralistis fiskal dalam bentuk DAU, dana bagi hasil, dana alokasi khusus dan sumber lainnya. Dana tersebut diberikan kepada daerah untuk

meningkatkan pembangunan disegala bidang pada akhirnya hal tersebut tercermin pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Pada tingkat Daerah dimana Pemerintah Daerah berpeluang untuk meningkatkan Pembangunan Ekonomi melalui peranan PAD sehingga diharapkan dana PAD akan menjadi sumber Pengeluaran Pemerintah untuk investasi. Jadi membesarnya peranan PAD, dana perimbangan keuangan dan investasi swasta secara bersama-sama diharapkan dapat memperbesar laju pertumbuhan ekonomi. DAU terdiri dari belanja rutin dan belanja pembangunan dibelanjakan secara efisien dan efektif. Dilain pihak pertumbuhan ekonomi meningkatkan PAD dan bersumber pada pajak dan retribusi, selanjutnya pihak swasta mampu untuk memperbesar berharap sektor-sektor ekonomi secara nyata dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Dari konsep yang diajukan ini apabila Dana Perimbangan digunakan secara efisien dan terarah PAD diperbesar peranannya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan penambahan retribusi secara bersama-sama akan mendorong pertumbuhan ekonomi mengikat setiap tahun.

Pemikiran tersebut di atas dipadukan dengan penelusuran kepustakaan pada BAB II Tinjauan Pustaka, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, dijadikan bahan rujukan untuk menyusun model konseptual penelitian ini. Pada Tabel 3.1 dan Tabel 3.2 berikut ini dipaparkan secara singkat struktur hubungan dan pengaruh antar berbagai variabel dengan posisi sebagai bagian variabel yang mendahului (*antecedence variable*), variabel yang antara (*mediating variable*), dan variabel akibat

(*consequent variable*), dengan sumber tunjangan teori yang mendasari pemilihan variabel relevan yang dipertimbangkan.

**Tabel 3.1 Struktur Hubungan Antar Variabel Relevan
(Rujukan Teori *Antecedent Variable*)**

Teori	Nama Variabel		
	Variabel Pendahulu	Variabel Antara	Variabel Akibat
1	2	3	4
<p>Teori Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terkait Investasi, Belanja Publik, Belanja Rutin, dan Pertumbuhan Ekonomi:</p> <p>Suparmoko (2003), Ekonomi Publik., Rivas, L. A (2003)., Ding L.U (2002), Jonsson M. dan Klein P. (2003)., Syafrizal (2008) Ekonomi Regional. UU RI No 32 / 2004 Tentang Pemerintah Daerah. UU RI No. 33 / 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.</p>	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	(1) Belanja Publik (2) Belanja Rutin	Pertumbuhan Ekonomi
<p>Teori Inflasi Terkait Investasi, Belanja Publik, Belanja Rutin, dan Pertumbuhan Ekonomi:</p> <p>Mankiew (2005), Samuelson (1998), Donsbuch (2003), Manurung (2003), Orphanides A. dan Wieland V. (2000), Gali, J., Gertler M., dan Lopez-Salido D.L. (2001), Amato J. D. dan Gerlach S.(2002), Svenson L.E.O (2002). Dai M (2009).</p>	Inflasi	(1) Investasi (2) Belanja Publik (3) Belanja Rutin	Pertumbuhan Ekonomi
<p>Teori Suku Bunga Terkait Investasi, dan Pertumbuhan Ekonomi:</p> <p>Mankiew (2005), Samuelson (1998), Donsbuch (2003) Manurung (2003)</p>	Suku Bunga Kredit	(1) Investasi	Pertumbuhan Ekonomi

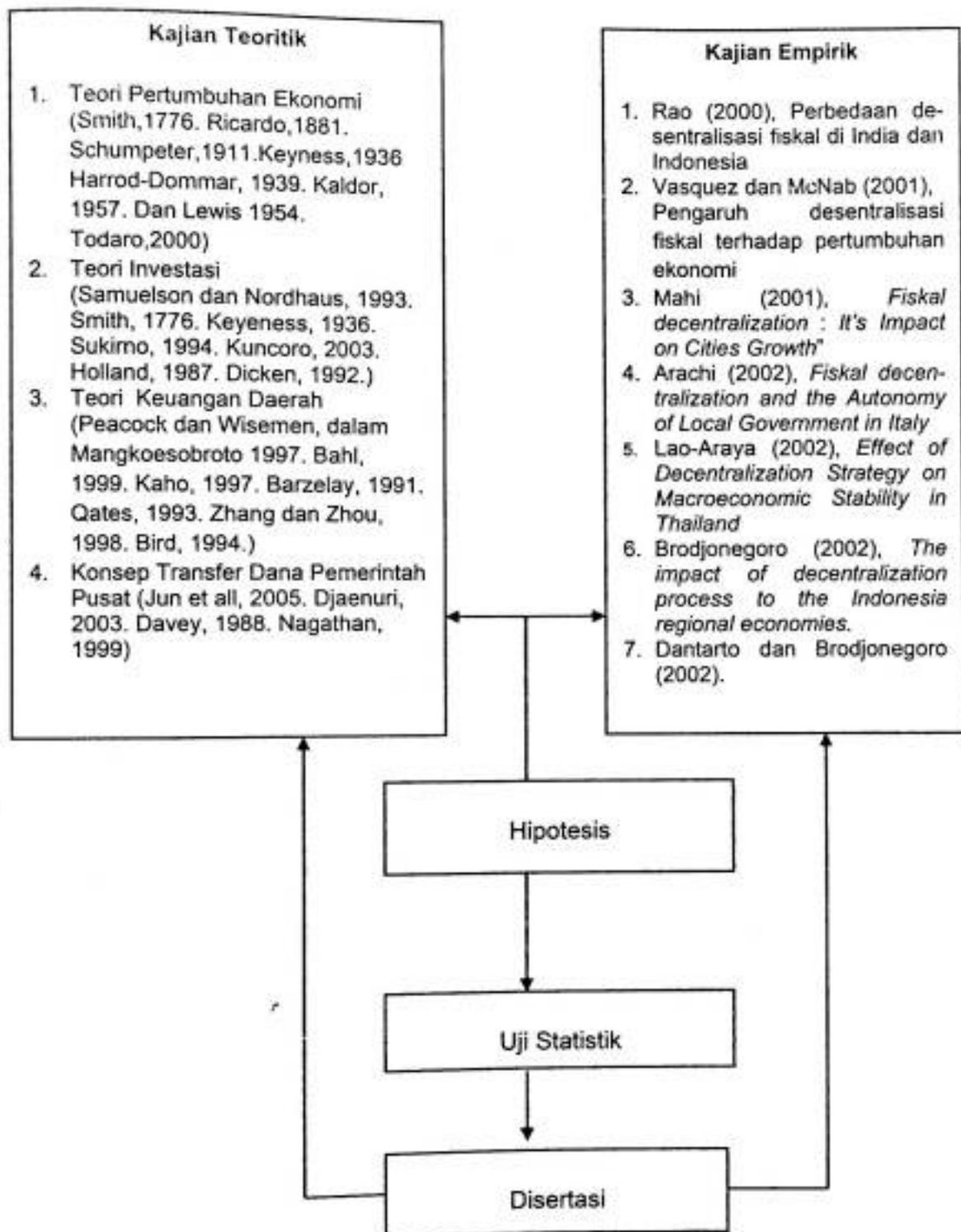
Uraian mengenai pendapatan asli daerah (PAD) terdapat pada paragraph ke dua pasal 157 Undang-Undang Republik Indonesia yang menyebutkan sumber pendapatan asli daerah, selain itu Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah. Suparmoko (2003) mengemukakan peranan PAD sebagai sumber pendapatan daerah dalam mengatur Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) serta kaitannya dengan belanja pembangunan serta pertumbuhan ekonomi daerah. Syafrizal (2008) mengemukakan PAD sebagai sumber pendapatan daerah dan dipergunakan untuk pembangunan daerah dalam menunjang pertumbuhan ekonomi daerah.

**Tabel 3.2 Struktur Hubungan Antar Variabel Relevan
(Rujukan Teori *Mediating Variable* dan *Consequent Variable*)**

Catatan/Teori	Nama Variabel		
	Variabel Pendahulu	Variabel Antara	Variabel Akibat
1	2	3	4
Investasi Terkait Pertumbuhan Ekonomi. Samuelson dan Nordhaus, (1993). Smith, (1776). Keynes, (1936). Sukimo, (1994). Kuncoro, (2003). Holland, (1987). Dicken, (1992).	(1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) (2) Inflasi (3) Suku Bunga Kredit	Investasi.	Pertumbuhan Ekonomi
Belanja Publik Terkait Pertumbuhan Ekonomi. • Suparmoko (2003), Peacock dan Wisemen, dalam Mangkoesobroto (1997). Bahl, (1999). Kaho, (1997). Barzelay, (1991). Oates, (1993). Zhang dan Zhou, (1998). Bird, (1994). Syafrizal (2008) Ekonomi Regional. • UU RI No 32 / 2004 Tentang Pemerintah Daerah. • UU RI No. 33 / 2004	(1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) (2) Inflasi	Belanja Publik	Pertumbuhan Ekonomi
Belanja Rutin Terkait Pertumbuhan Ekonomi. Suparmoko (2003) Peacock dan Wisemen, dalam Mangkoesobroto (1997). Bahl, (1999). Kaho, (1997). Barzelay, (1991). Oates, (1993). Zhang dan Zhou, (1998). Bird, (1994). Syafrizal (2008) UU RI No 32 / 2004 Tentang Pemerintah Daerah. • UU RI No. 33 / 2004	(1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) (2) Inflasi	Belanja Rutin Upah,	Pertumbuhan Ekonomi

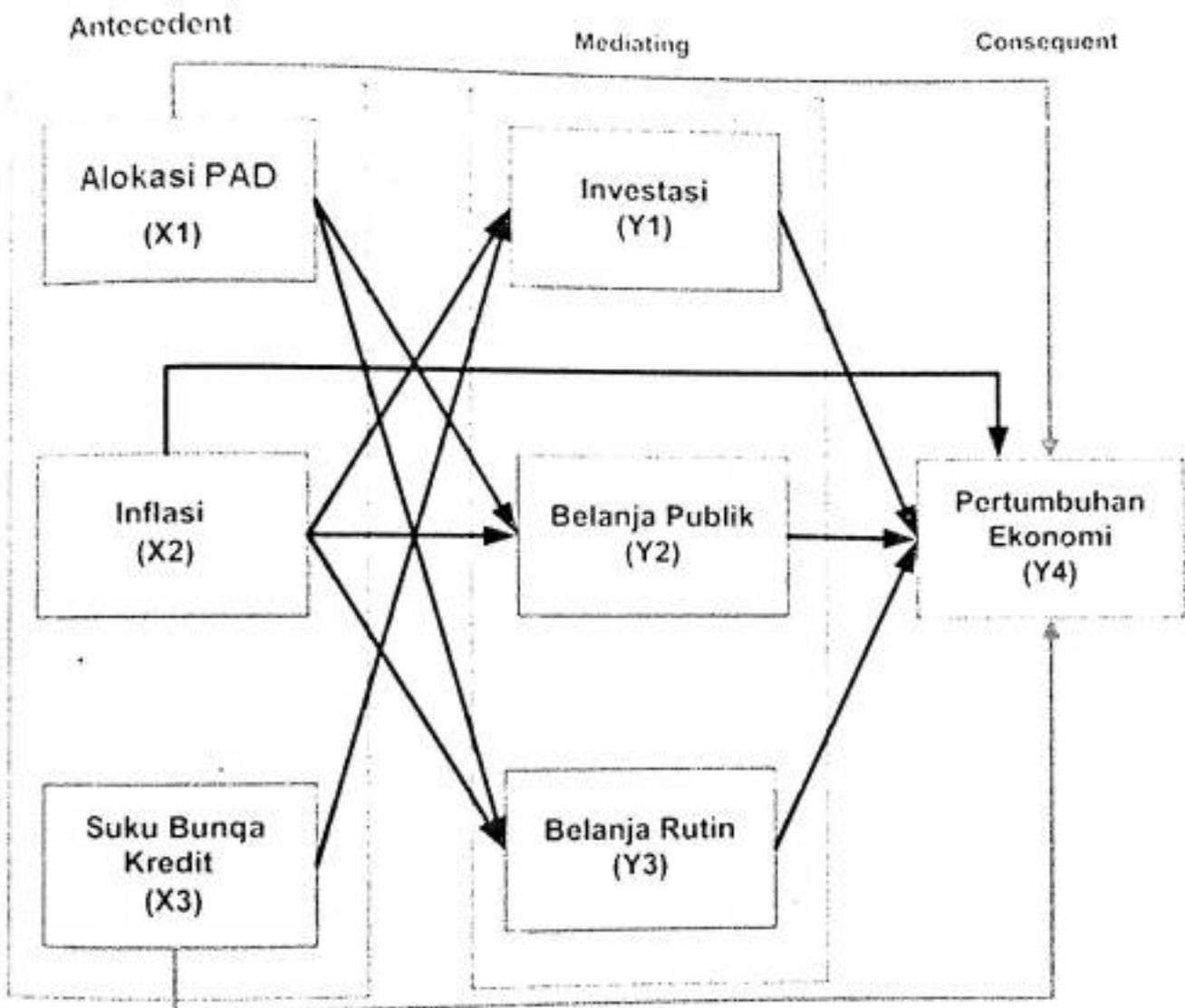
Gambar 3. Kerangka Proses Berfikir



Kerangka proses berpikir dalam penelitian ini dimulai dari studi teoritik, yakni teori Ekonomi Regional sebagai *Grand Theory*, berserta teori-teori pendukung, yaitu: Teori Pertumbuhan Ekonomi, Teori Investasi, dan Teori Keuangan Daerah. Lalu Teori-teori ini dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun konsep disertasi dengan proses berpikir deduktif, karena teori mempunyai kajian yang bersifat umum yang dapat diterapkan pada kasus-kasus khusus.

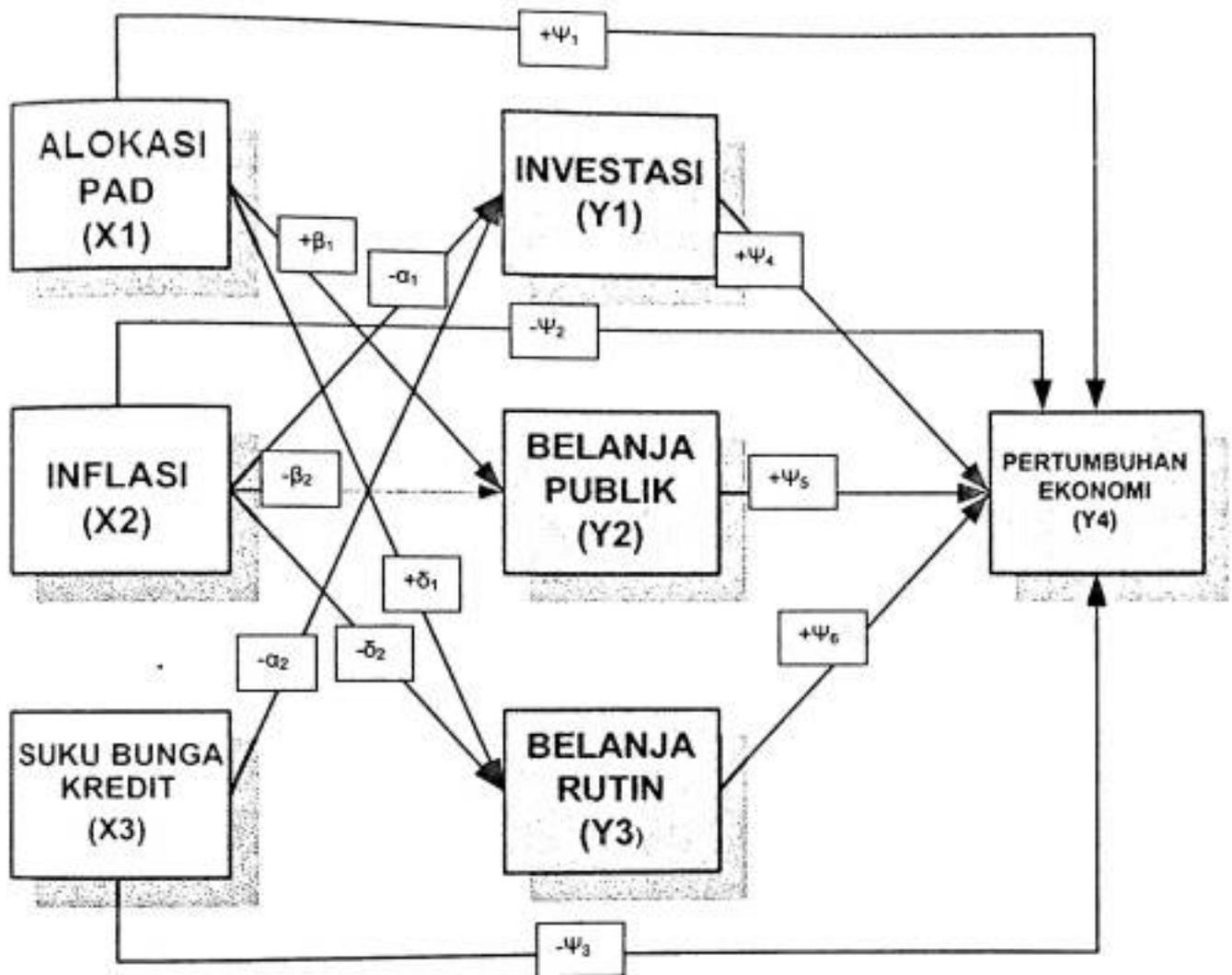
Konseptual penelitian ini berawal dari penelaahan kajian teori yang tersusun pada Bab II Kajian Pustaka tulisan ini mengenai teori-teori, *issue-issue*, ataupun catatan-catatan tentang (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (2) Inflasi, (3) Suku Bunga Kredit, yang selanjutnya di dalam konseptual penelitian diposisikan sebagai *antecedence variable*. Ketiga variabel yang mendahului tersebut diduga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur melalui variabel-variabel antara seperti halnya; (1) Investasi, (2) Belanja Publik dan (3) Belanja Rutin. Variabel-variabel yang mendahului tersebut, selain berpengaruh tidak langsung terhadap durasi kerja (yaitu melalui *mediating variable*), *antecedence variables* tersebut berpengaruh langsung secara bersama-sama terhadap variabel pertumbuhan ekonomi, sehingga akan muncul pengaruh total dari *antecedence variables* tersebut, yang mana di dalam penelitian ini yang dimaksudkan dengan pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi regional di Kalimantan Timur. Berikut dikemukakan model konseptual (Gambar 3.1)

Gambar 3.1 Model Konseptual Penelitian



Pengaruh dari dan antar variabel tersebut dengan dengan hubungan total yang diestimasi, dapat digambarkan diagram alurnya sebagai model operasional di dalam penelitian ini sebagai Gambar 3.2.

Gambar 3.2 Model Operasional Penelitian



Sesuai dengan kerangka konseptual pada Gambar 3.1, maka model yang dibangun adalah:

$$Y_1 = f(X_2, X_3) \quad (1)$$

$$Y_2 = f(X_1, X_2) \quad (2)$$

$$Y_3 = f(X_1, X_2) \quad (3)$$

$$Y_4 = f(X_1, X_2, X_3, Y_1, Y_2, Y_3) \quad (4)$$

Sehingga persamaan (4) dapat ditulis ulang menjadi:

$$Y_4 = f(X_1, X_2, X_3, Y_1(X_2, X_3), Y_2(X_1, X_2), Y_3(X_1, X_2)) \quad (4a)$$

dimana:

X_1 = PAD

X_2 = Inflasi

X_3 = Suku Bunga Kredit

Y_1 = Investasi

Y_2 = Belanja Publik

Y_3 = Belanja Rutin

Y_4 = Pertumbuhan Ekonomi

Persamaan (4a) merupakan fungsi difungsi (sistem persamaan simultan), dimana model yang dikembangkan adalah:

1. Pengaruh faktor inflasi dan suku bunga kredit terhadap Investasi:

$$Y_1 = \alpha_0 + \alpha_1 X_2 + \alpha_2 X_3 + \varepsilon_1 \quad (5)$$

Dimana: α_0 , α_1 , dan α_2 adalah parameter yang akan ditaksir dan ε_1 adalah *error term* Investasi.

2. Pengaruh PAD, Inflasi terhadap keputusan belanja publik

$$Y_2 = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon_2 \quad (6)$$

Dimana: β_0 , β_1 , dan β_2 adalah parameter yang akan ditaksir dan ε_2 adalah *error term* belanja publik.

3. Pengaruh PAD dan Inflasi terhadap Belanja Rutin:

$$Y_3 = \delta_0 + \delta_1 X_1 + \delta_2 X_2 + \varepsilon_3 \quad (7)$$

Dimana: δ_0 , δ_1 , dan δ_2 adalah parameter yang akan ditaksir dan ε_3 adalah *error term* belanja rutin.

4. Pengaruh PAD, Inflasi, Suku Bunga Kredit, Investasi, Belanja Publik dan Belanja Rutin terhadap Pertumbuhan Ekonomi :

$$Y_4 = \psi_0 + \psi_1 X_1 + \psi_2 X_2 + \psi_3 X_3 + \psi_4 Y_1 + \psi_5 Y_2 + \psi_6 Y_3 + \varepsilon_4 \quad (8)$$

Dimana: ψ_0 , ψ_1 , ψ_2 , ψ_3 , ψ_4 , ψ_5 dan ψ_6 adalah parameter yang akan ditaksir dan ε_4 adalah *error term* Pertumbuhan Ekonomi. Persamaan (8) dapat disederhanakan menjadi:

$$\begin{aligned} Y_4 &= \psi_0 + \psi_1 X_1 + \psi_2 X_2 + \psi_3 X_3 + \psi_4 (\alpha_0 + \alpha_1 X_2 + \alpha_2 X_3 + \varepsilon_1) + \psi_5 (\beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon_2) + \psi_6 (\delta_0 + \delta_1 X_1 + \delta_2 X_2 + \varepsilon_3) + \varepsilon_4 \\ Y_4 &= (\psi_0 + \psi_4 \alpha_0 + \psi_5 \beta_0 + \psi_6 \delta_0) + (\psi_1 + \psi_5 \beta_1 + \psi_6 \delta_1) X_1 + (\psi_2 + \psi_4 \alpha_1 + \psi_5 \beta_2 + \psi_6 \delta_2) X_2 + (\psi_3 + \psi_4 \alpha_2) X_3 + (\psi_4 \varepsilon_1 + \psi_5 \varepsilon_2 + \psi_6 \varepsilon_3 + \varepsilon_4) \\ Y_4 &= \Omega_0 + \Omega_1 X_1 + \Omega_2 X_2 + \Omega_3 X_3 + \mu_1 \end{aligned} \quad (9)$$

Keterangan:

1. Konstanta

α_0 = konstanta untuk Y_1

β_0 = konstanta untuk Y_2

δ_0 = konstanta untuk Y_3

$\Omega_0 = \Psi_0 + \Psi_4\alpha_0 + \Psi_5\beta_0 + \Psi_6\delta_0$ = konstanta untuk Y_4

2. Pengaruh langsung (*direct effect*)

α_1 = Pengaruh langsung X_2 terhadap Y_1

α_2 = Pengaruh langsung X_3 terhadap Y_1

β_1 = Pengaruh langsung X_1 terhadap Y_2

β_2 = Pengaruh langsung X_2 terhadap Y_2

δ_1 = Pengaruh langsung X_1 terhadap Y_3

δ_2 = Pengaruh langsung X_2 terhadap Y_3

Ψ_1 = Pengaruh langsung X_1 terhadap Y_4

Ψ_2 = Pengaruh langsung X_2 terhadap Y_4

Ψ_3 = Pengaruh langsung X_3 terhadap Y_4

Ψ_4 = Pengaruh langsung Y_1 terhadap Y_4

Ψ_5 = Pengaruh langsung Y_2 terhadap Y_4

Ψ_6 = Pengaruh langsung Y_3 terhadap Y_4

3. Pengaruh tak langsung (*indirect effect*)

$\Psi_4\alpha_1$ = Pengaruh tak langsung X_2 terhadap Y_4 melalui Y_1

$\Psi_4\alpha_2$ = Pengaruh tak langsung X_3 terhadap Y_4 melalui Y_1

$\Psi_5\beta_1$ = Pengaruh tak langsung X_1 terhadap Y_4 melalui Y_2

$\Psi_5\beta_2$ = Pengaruh tak langsung X_2 terhadap Y_4 melalui Y_2

$\Psi_6\delta_1$ = Pengaruh tak langsung X_1 terhadap Y_4 melalui Y_3

$\Psi_6\delta_2$ = Pengaruh tak langsung X_2 terhadap Y_4 melalui Y_3

4. Pengaruh total (*total effect*)

$\Omega_1 = (\Psi_1 + \Psi_5\beta_1 + \Psi_6\delta_1) =$ Pengaruh total X_1 terhadap Y_4

$\Omega_2 = (\Psi_2 + \Psi_4\alpha_1 + \Psi_5\beta_2 + \Psi_6\delta_2) =$ Pengaruh total X_2 terhadap Y_4

$\Omega_3 = (\Psi_3 + \Psi_4\alpha_2) =$ Pengaruh total X_3 terhadap Y_4

5. Error term

$\epsilon_1 =$ Error term dari Y_1

$\epsilon_2 =$ Error term dari Y_2

$\epsilon_3 =$ Error term dari Y_3

$\mu_1 = (\Psi_4\epsilon_1 + \Psi_5\epsilon_2 + \Psi_6\epsilon_3 + \epsilon_4) =$ Error term dari Y_4

Melalui kerangka konseptual penelitian dan persamaan fungsi tersebut maka dapat dirinci untuk prediksi sifat pola hubungan atau pengaruh antar variabel penelitian, dengan membandingkan dengan teori dan hasil kajian penelitian sebelumnya. Hal ini dengan jelas ditampilkan pada Tabel 3.3

Tabel 3.3 : Kedudukan Variabel Penelitian, Sifat Penelitian, Sifat Pengaruh antar Variabel dan teori/ Penelitian yang mendukung:

No.	Variabel yang mempengaruhi	Variabel yang dipengaruhi	Sifat prediksi pengaruh	Teori/penelitian pendukung sebelumnya
1	PAD	Belanja Publik	Positif	Darwanto & Yulia (2007), David Harianto dan Priyo Hari (2007), Saragih (2003), Radianto (1997), Kuncoro (2003)
2	PAD	Belanja Rutin	Positif	Darwanto & Yulia (2007), David Harianto dan Priyo Hari (2007)
3	PAD	Pertumbuhan Ekonomi	Positif	Amin Pujlati (2008), Daslan Simanjuntak (2006), Neo Klasik, Samuelson dan Nordhaus, (1993). Smith, (1776). Keyeness, (1936). Sukimo, (1994). Kuncoro, (2003). Holland, (1987). Dicken, (1992).
4	Inflasi	Investasi	Negatif	Sukimo, (1994). Kuncoro, (2003). Holland, (1987). Dicken, (1992).
5	Inflasi	Belanja Publik	Negatif	Suparmoko (2003), Peacock dan Wisemen, dalam Mangkoesobroto (1997). Bahl, (1999). Kaho, (1997). Barzelay, (1991). Qates, (1993). Zhang dan Zhou, (1998). Bird, (1994). Syafrizal (2008) Ekonomi Regional
6	Inflasi	Belanja Rutin	Negatif	Suparmoko (2003) Peacock dan Wisemen, dalam Mangkoesobroto (1997). Bahl, (1999). Kaho, (1997). Barzelay, (1991). Qates, (1993). Zhang dan Zhou, (1998). Bird, (1994). Syafrizal (2008) Ekonomi Regional.
7	Inflasi	Pertumbuhan Ekonomi	Negatif	Arif M Yusuf (2008), Erna G (2004), Suparmoko (2003), Peacock dan Wisemen, dalam Mangkoesobroto (1997). Bahl, (1999). Kaho, (1997). Barzelay, (1991). Qates, (1993). Zhang dan Zhou, (1998). Bird, (1994). Syafrizal (2008) Ekonomi Regional
8	Suku Bunga Kredit	Investasi	Negatif	Faturrahman Anwar (2008)
9	Suku Bunga Kredit	Pertumbuhan Ekonomi	Negatif	Erna G (2004), Sucahyo (2008), Sunny (2005), Samuelson dan Nordhaus, (1993). Smith, (1776). Keyeness, (1936). Sukimo, (1994). Kuncoro, (2003). Holland, (1987). Dicken, (1992).
10	Investasi	Pertumbuhan Ekonomi	Positif	Thomas G. Rawski (2002), Rofikoh Rokhim (2007), Toni Eko (2003), Arif M Yusuf (2008), Samuelson dan Nordhaus, (1993). Smith, (1776). Keyeness, (1936). Sukimo, (1994). Kuncoro, (2003). Holland, (1987). Dicken, (1992).
11	Belanja Publik	Pertumbuhan Ekonomi	Positif	Kaho, (1997). Barzelay, (1991). Qates, (1993). Zhang dan Zhou, (1998). Bird, (1994). Syafrizal (2008)
12	Belanja Rutin	Pertumbuhan Ekonomi	Positif	Kaho, (1997). Barzelay, (1991). Qates, (1993). Zhang dan Zhou, (1998). Bird, (1994). Syafrizal (2008)

B. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kajian pustaka, dan kerangka konseptual penelitian, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Inflasi dan suku bunga kredit berpengaruh langsung terhadap investasi di Daerah Propinsi Kalimantan Timur
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Inflasi berpengaruh langsung terhadap Belanja Publik di Daerah Propinsi Kalimantan Timur
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Inflasi berpengaruh langsung terhadap Belanja Rutin di Daerah Propinsi Kalimantan Timur .
4. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Inflasi, Suku bunga kredit, Investasi, Belanja Publik dan Belanja Rutin berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi

BAB IV

METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan berbagai hal yang berhubungan dengan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang digunakan dalam pengujian hipotesis, antara lain rancangan penelitian, instrumen penelitian, metode pengumpulan data, cara pengolahan data, analisis data dan pengujian hipotesis.

A. Jenis dan Rancangan Penelitian

Berdasarkan tipe, maka penelitian ini merupakan penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel atau yang disebut penelitian eksplanatori (*explanatory research*) yaitu penelitian untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh antar variabel yang ada dan dilanjutkan dengan pengujian hipotesis. Selain itu, penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif, karena memberikan penjelasan secara deskriptif mengenai variabel-variabel yang hendak diteliti. Dalam penelitian ini akan dianalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Investasi Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur.

Penelitian ini menggunakan data sekunder secara *time series* dan data *cross section* atau *pooled data*. Data *time series* akan menggambarkan data Pendapatan Asli Daerah (PAD), Inflasi, Suku Bunga Kredit dan Investasi (Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA)), besar Belanja Publik dan besar Belanja Rutin, terhadap

Pertumbuhan Ekonomi selama kurun waktu dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2007, sedangkan data *cross section* berupa data penunjang latar belakang penelitian dan penunjang hasil analisis data.

B. Instrumen Penelitian

Tahapan awal penyusunan instrumen pengumpulan data pada penelitian ini dimulai dari penetapan variabel-variabel yang ditetapkan untuk diteliti. Dari variabel-variabel tersebut diberikan definisi operasionalnya, dan selanjutnya ditentukan indikator yang akan diukur. Dari indikator ini kemudian dijabarkan menjadi daftar / tabel isian data, Sugiyono (2002). Daftar / tabel isian data tersebut menjadi instrumen penelitian sebagai media pengambilan data primer dari responden.

Selain instrumen pengumpulan data berupa daftar / tabel isian data, pengambilan data juga dilakukan dengan *men-download* data skunder berupa data sosial ekonomi Propinsi Kalimantan Timur, data keuangan daerah Propinsi Kalimantan Timur, *Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur* beserta seluruh kota dan kabupatennya, data Inflasi, data suku bunga kredit, dan lain-lainnya.

Instrumen penelitian ini dilengkapi dengan rekaman data berupa cakram / *compact disk* penyimpan data yang bertujuan untuk pengamanan data selama proses penelitian berlangsung.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari 12 Kabupaten/Kota dengan rincian empat kota (Samarinda, Balikpapan, Tarakan, dan Bontang) serta delapan kabupaten (Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Bulungan, Berau, Pasir, Nunukan, dan Malinau). Mengingat variabel dalam penelitian ini adalah *Pendapatan Asli Daerah (PAD)*, *Inflasi*, *Suku Bunga Kredit* dan *Investasi* (Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA)), besar *Belanja Publik* dan besar *Belanja Rutin*, serta *Pertumbuhan Ekonomi*, maka penelitian ini menggunakan data-data *time series* dari seluruh populasi.

Data yang dikumpulkan dari 12 kabupaten/kota yang menjadi lokasi penelitian untuk mengisi model kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari jenis :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Inflasi
3. Suku Bunga Kredit
4. Investasi
5. Belanja Publik
6. Belanja Rutin
7. Pertumbuhan Ekonomi

Beberapa alasan tidak digunakannya sampel atau diambilnya data seluruh populasi dalam penelitian ini, adalah karena:

1. Data yang digunakan adalah data yang bersumber dari data sekunder.
2. Data yang digunakan adalah data panel dari 12 kabupaten/kota (*crossing data*), dan selama tujuh tahun (2001 s.d 2007) atau *time series data*. Dengan demikian data merupakan gabungan antara data *time series* dan data *cross section* atau data panel atau pooling data. Pooling data/panel data adalah kombinasi antara data runtut waktu, yang memiliki observasi temporal biasa pada suatu unit analisis, dengan data silang tempat, yang memiliki observasi-observasi pada pada suatu unit analisis pada suatu titik waktu tertentu (Kuncoro, 2007)
3. Data berasal atau bersumber dari data sekunder yang waktu pengumpulannya tidak tergantung waktu seperti data yang bersumber dari data primer.

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dimulai dari persiapan instrument penelitian dan pencarian data dari data terpublikasi baik lewat dokumen yang diterbitkan instansi berkompeten, berwenang dan dapat dipercaya seperti halnya data-data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik Propinsi Kalimantan Timur, atau data-data keuangan yang sudah dipublikasikan oleh Pemerintah daerah Propinsi Kalimantan Timur, maupun data-data yang terpublikasikan oleh lembaga keuangan Negara seperti Bank Indonesia.

Data yang terpublikasikan berupa *hard copy* dipilih sesuai kepentingan penelitian dan diolah kembali. Disamping data berupa *hard copy*, data juga diperoleh melalui pencarian di situs internet seperti halnya www.bi.go.id dan situs pemerintah daerah Propinsi Kalimantan Timur.

Kelengkapan data yang juga dipakai sebagai verifikasi data adalah pencarian data langsung ke lokasi kantor pemerintah daerah atau ke kantor BPS Kalimantan Timur ataupun kantor Bank Indonesia setempat, dan perolehan data tersebut setelah dilengkapi, di bandingkan, dan diverifikasi, dibuat data panel yang siap untuk diolah dan dianalisis sesuai kepentingan penelitian ini.

Adapun data yang dikumpulkan baik untuk dituangkan kedalam model kuantitatif, maupun data lainnya, yang paling diutamakan dalam penelitian ini terdiri dari tujuh ragam data yaitu:

1. Data Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur
2. Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Timur
3. Anggaran Belanja Publik Provinsi Kalimantan Timur
4. Anggaran Belanja Rutin Provinsi Kalimantan Timur
5. Investasi Swasta Provinsi Kalimantan Timur
6. Suku Bunga Kredit Daerah
7. Inflasi Daerah

Ketujuh ragam data tersebut diperoleh pada tiap-tiap kabupaten/kota yang berjumlah 12 Kabupaten/Kota yang terdiri dari yaitu :

1. Kota Balikpapan
2. Kota Samarinda

3. Kota Bontang
4. Kota Tarakan
5. Kabupaten Kutai Kertanegara
6. Kabupaten Kutai Timur
7. Kabupaten Bulungan.
8. Kabupaten Berau
9. Kabupaten Nunukan
10. Kabupaten Malinau
11. Kabupaten Kutai Barat
12. Kabupaten Pasir

Periode dari ragam data yang diperlukan adalah dalam rentang mulai berlakunya era otonomi daerah, yaitu mulai dari tahun anggaran 2000 sampai dengan tahun anggaran 2007.

E. Metode dan Alat Analisis

Mengingat model yang disusun dalam penelitian ini merupakan model jalur dengan persamaan simultan, dan data yang diperoleh berupa data *ratio*, maka metode analisis data yang dirasa paling tepat untuk menganalisa data tersebut adalah *path analysis*.

Analisis jalur yang dikenal dengan *path analysis* dikembangkan pertama tahun 1920-an oleh seorang ahli genetika yaitu Sewal Wright (joreskog & Sorbom, 1996; Johnson & Wichern, 1992). *Path analysis* diartikan oleh Bohrnstedt (1974 dalam kusnendi, 2005:1) sebagai teknik untuk mengestimasi pengaruh dari sekumpulan variabel-variabel bebas terhadap

variabel terikat dari sekumpulan korelasi yang teramati (*observed correlations*), yang dihipotesiskan karena adanya hubungan asimetris antar variabel. Sedangkan tujuan utama *path analysis* adalah sebagai metode untuk dapat mengukur pengaruh langsung maupun tidak langsung dan pengaruh total dari suatu hubungan simultan (Maruyama, 1998:16).

Jadi, model *path analysis* digunakan untuk menganalisis pola hubungan antar variable dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung seperangkat variable bebas (eksogen) terhadap variable terikat (endogen). Model *path analysis* yang dibicarakan adalah pola hubungan sebab akibat atau "*a set of hypothesized causal asymmetric relation among the variables*". Oleh sebab itu, rumusan masalah penelitian dalam kerangka *path analysis* berkisar pada: (1) Apakah variable eksogen ($X_1, X_2, \dots \dots \dots X_k$) berpengaruh terhadap variable endogen Y? dan (2) berapa besar pengaruh kausal langsung, kausal tidak langsung, kausal total maupun simultan seperangkat variable eksogen ($X_1, X_2, \dots \dots \dots X_k$) terhadap variable endogen Y?

Pertimbangan manfaat lain model *path analysis* digunakan dalam penelitian ini adalah untuk: (1) penjelasan (*explanation*) terhadap fenomena yang dipelajari atau permasalahan yang diteliti; (2) prediksi nilai variable terikat (Y) berdasarkan nilai variable bebas (X), dan prediksi dengan nilai *path analysis* ini bersifat kualitatif; (3) faktor determinan yaitu penentuan variable bebas (X) mana yang berpengaruh dominan terhadap variable terikat (Y), juga dapat digunakan untuk menelusuri mekanisme (jalur-jalur) pengaruh variable bebas (X) terhadap variable terikat (Y); (4) pengujian

model, menggunakan *theory trimming*, baik untuk uji reliabilitas (uji keajegan) konsep yang sudah ada ataupun uji pengembangan konsep baru.

Asumsi yang mendasari *path analysis* yang sejalan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Pada model *path analysis*, hubungan anatar variable adalah bersifat linear, adaptif dan bersifat normal; (2) Hanya sistem aliran kausal ke satu arah artinya tidak ada arah kausalitas yang berbalik; (3) Variable terikat (*endogen*) minimal dalam skala ukur interval dan *ratio*; (4) Menggunakan sampel *probability sampling* yaitu tehnik pengambilan sampel untuk memberikan peluang yang sama pada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel; (5) *Observed variable* diukur tanpa kesalahan (instrumen pengukuran *valid* dan *reliable*) artinya variable yang diteliti dapat diobservasi secara langsung ; (6) Model yang dianalisis dispesifikasikan diidentifikasi) dengan benar berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep yang relevan artinya model teori yang dikaji atau diuji dibangun berdasarkan kerangka teoritas tertentu yang mampu menjelaskan hubungan kausalitas antar variabel yang diteliti.

Di dalam Penelitian ini juga dipergunakan persamaan struktural atau juga disebut model struktural yaitu apabila setiap variabel terikat/*endogen* (Y) secara unik keadaannya ditentukan oleh seperangkat variabel bebas/*eksogen* (X). selanjutnya gambar yang meragakan struktur hubungan kausal antar variabel disebut diagram jalur (*path diagram*). Jadi, persamaan nilai $Y = F(X_1, X_2, \dots, X_k)$ dan $Z = F(X_1, X_2, \dots, X_k)$ merupakan persamaan struktural karena setiap persamaaan menjelaskan hubungan

kausal yaitu variabel *eksogen* X_1, X_2, \dots, X_k . terhadap variabel *endogen* Y .

Jadi, secara sistematis *path analysis* mengikuti pola model struktural, sehingga langkah awal untuk mengerjakan atau penerapan model *path analysis* yaitu dengan merumuskan persamaan struktural dan diagram jalur yang berdasarkan kajian teori tertentu yang telah diuraikan di atas. Menurut Lomax (2005) "informasi diberikan apabila tujuan penelitian ingin mendapatkan model untuk kepentingan prediksi, maka yang tepat digunakan adalah model struktural. Model ini mirip dengan *path analysis*, yang membedakan adalah kalau di dalam *path analysis* data yang dianalisis adalah data baku (*standardize*), sedangkan di dalam model struktural menggunakan data mentah (*raw data*).

Path analysis walupun cukup lama dikembangkan, tetapi baru dikenal secara luas oleh para ahli ilmu-ilmu sosial setelah sosiolog Otis D. Duncan pada tahun 1966 memperkenalkannya dalam literatur sosiologi lewat tulisannya "*Path Analysis: Sociological Example*" yang dimuat dalam *AJS (American Journal of sociology)*. Sejak itulah, *path analysis* banyak dibicarakan, khususnya oleh para ahli sosiologi, bahkan diantaranya ada yang menganggap *path analysis* sebagai "*the modus operandi of sociological research*" (Miller & Stokes, 1975:193). Sekarang *path analysis* bukanlah monopoli para sosiolog lagi. *Path analysis* telah menjadi model analisis para ilmuwan sosial lainnya. Bahkan pada tahun 1970-an, Karl G. Joreskog dan Dag Sorbom dari departemen statistika Universitas Uppsala Swedia, telah dikembangkan model *path analysis* menjadi model yang sekarang dikenal

sebagai LISREL (*LI-near S-rtuctural REL-ationship*) atau sering disebut SEM (*Structural Equation Modeling*).

Teknik analisis jalur di dalam penelitian ini akan digunakan dalam menguji besarnya sumbangan (kontribusi yang ditunjukkan oleh koefisien jalur pada setiap diagram jalur dari hubungan kausal antar variabel X_1, X_2, \dots, X_k terhadap Y_1, Y_2, \dots, Y_i serta dampaknya terhadap Y_x . Analisis korelasi dan regresi yang merupakan dasar dari perhitungan koefisien jalur. Kemudian, dalam perhitungan digunakan jasa computer berupa software dengan program SPSS ver 17, Excel 2007, ataupun LISREL Ver 7.8.

Riduwan dan Kuncoro (2007) mengatakan bahwa dalam penelitian sosial tidak semata-mata hanya mengungkapkan hubungan variabel sebagai terjemahan statistic dari hubungan antara variabel alami, tetapi terfokus pada upaya untuk mengungkapkan hubungan kausal antar variabel.

Pada diagram jalur digunakan dua macam anak panah yaitu: (a) anak panah satu arah yang menyatakan pengaruh langsung dari sebuah variabel eksogen [variabel penyebab (X)] terhadap sebuah variabel endogen [variabel akibat (Y)], misalnya: X_1 berpengaruh terhadap Y dan (b) anak panah dua arah yang menyatakan hubungan korelasional antara variabel eksogen, misalnya: X_1 berkorelasi dengan X_2 .

Langkah-langkah menguji path analysis menurut Ridwan dan Kuncoro (2007) adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan hipotesis dan persamaan *structural*
2. Menghitung koefisien jalur yang didasarkan pada koefisien regresi

- a. Gambarkan diagram jalur lengkap, tentukan sub-sub strukturnya dan rumuskan persamaan strukturnya yang sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Hipotesis: Naik turunnya variabel endogen (Y) dipengaruhi secara signifikan oleh variabel eksogen (X)
- b. Menghitung koefisien regresi untuk struktur yang telah dirumuskan, yaitu persamaan regresi ganda misalnya: $Y_2 = \alpha_2 + \rho_{x_2y_2}X_2 + \rho_{x_3y_2}X_3 + \rho_{x_4y_2}X_4 + \mu_2$

Pada dasarnya koefisien jalur (*path*) adalah koefisien regresi yang distandarkan yaitu koefisien regresi yang dihitung dari basis data yang telah diset dalam angka baku Z-score (data yang diset dengan nilai rata-rata = 0 dan standar deviasi = 1). Koefisien jalur yang distandarkan ini digunakan untuk menjelaskan besarnya pengaruh variabel bebas (eksogen) terhadap variabel lain yang diberlakukan sebagai variabel terikat (endogen).

Khusus untuk program SPSS menu analisis regresi, koefisien path ditunjukkan oleh *output* yang dinamakan koefisien yang dinyatakan sebagai *standardized coefficient* atau dikenal dengan nilai beta (β). Jika variabel eksogen dengan variabel endogen, maka koefisien *path*-nya adalah sama dengan koefisien korelasi r sederhana.

3. Menghitung koefisien jalur secara simultan (keseluruhan)

Uji secara keseluruhan hipotesis statistik dirumuskan sebagai berikut:

$$H_a: \rho_{y_1 \dots x_1 \dots i} \neq 0$$

$$H_0: \rho_{y_1 \dots x_1 \dots i} = 0$$

Kaidah pengujian signifikansi menggunakan program SPSS maupun LISREL 8.7 adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai probabilitas 0.05 lebih kecil atau sama dengan nilai probabilitas sig atau $[0.05 \leq \text{Sig}]$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya tidak signifikan.
2. Jika nilai probabilitas 0.05 lebih besar atau sama dengan nilai probabilitas sig atau $[0.05 \geq \text{Sig}]$, maka H_0 diterima dan H_a diterima, artinya signifikan.

Perhitungan menggunakan analisis jalur dengan model dekomposisi pengaruh kausal antar variabel dapat dibedakan menjadi tiga sebagai berikut:

1. *Direct causal effects* (Pengaruh Kausal Langsung = PKL) adalah pengaruh satu variabel eksogen terhadap variabel endogen yang terjadi tanpa melalui variabel endogen lainnya.
2. *Indirect causal effects* (Pengaruh Kausal Tidak Langsung = PKTL) adalah pengaruh satu variabel eksogen terhadap variabel endogen yang terjadi melalui variabel endogen lain yang terdapat dalam satu model kausalitas yang sedang dianalisis.
3. *Total causal effects* (Pengaruh Kausal Total = PKT) adalah dan pengaruh kausal langsung (PKL) dan Pengaruh Kausal Tidak Langsung (PKTL) atau $\text{PKT} = \text{PKL} + \text{PKTL}$.

Sesuai dengan model penelitian yang telah dikemukakan pada Bab III penelitian ini, telah disusun model penelitian berupa diagram alur (*path*

diagram) yang digambarkan kembali dengan dilengkapi notasi matematis dari persamaan struktural agar lebih mudah menterjemahkannya kedalam persamaan ekonometrika dalam bentuk persamaan *reduced form*.

Adapun *reduced form* yang digunakan berdasarkan kerangka konseptual sebagai berikut :

1. Pengaruh faktor inflasi daerah dan suku bunga kredit terhadap Investasi:

$$Y_1 = \alpha_0 + \alpha_1 X_2 + \alpha_2 X_3 + \varepsilon_1 \quad (5)$$

2. Pengaruh PAD, Inflasi daerah terhadap keputusan belanja publik

$$Y_2 = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon_2 \quad (6)$$

3. Pengaruh PAD dan Inflasi daerah terhadap Belanja Rutin:

$$Y_3 = \delta_0 + \delta_1 X_1 + \delta_2 X_2 + \varepsilon_3 \quad (7)$$

4. Pengaruh PAD, Inflasi, Suku Bunga Kredit, Investasi, Belanja Publik dan Belanja Rutin terhadap Pertumbuhan Ekonomi :

$$Y_4 = \Omega_0 + \Omega_1 X_1 + \Omega_2 X_2 + \Omega_3 X_3 + \mu_1 \quad (9)$$

5. Konstanta

$$\alpha_0 = \text{konstanta untuk } Y_1$$

$$\beta_0 = \text{konstanta untuk } Y_2$$

$$\delta_0 = \text{konstanta untuk } Y_3$$

$$\Omega_0 = \Psi_0 + \Psi_4 \alpha_0 + \Psi_5 \beta_0 + \Psi_6 \delta_0 = \text{konstanta untuk } Y_4$$

6. Pengaruh langsung (*direct effect*)

$$\alpha_1 = \text{Pengaruh langsung } X_2 \text{ terhadap } Y_1$$

$$\alpha_2 = \text{Pengaruh langsung } X_3 \text{ terhadap } Y_1$$

$$\beta_1 = \text{Pengaruh langsung } X_1 \text{ terhadap } Y_2$$

$$\beta_2 = \text{Pengaruh langsung } X_2 \text{ terhadap } Y_2$$

- $\delta_1 =$ Pengaruh langsung X_1 terhadap Y_3
 $\delta_2 =$ Pengaruh langsung X_2 terhadap Y_3
 $\psi_1 =$ Pengaruh langsung X_1 terhadap Y_4
 $\psi_2 =$ Pengaruh langsung X_2 terhadap Y_4
 $\psi_3 =$ Pengaruh langsung X_3 terhadap Y_4
 $\psi_4 =$ Pengaruh langsung Y_1 terhadap Y_4
 $\psi_5 =$ Pengaruh langsung Y_2 terhadap Y_4
 $\psi_6 =$ Pengaruh langsung Y_3 terhadap Y_4

7. Pengaruh tak langsung (indirect effect)

- $\psi_4\alpha_1 =$ Pengaruh tak langsung X_2 terhadap Y_4 melalui Y_1
 $\psi_4\alpha_2 =$ Pengaruh tak langsung X_3 terhadap Y_4 melalui Y_1
 $\psi_5\beta_1 =$ Pengaruh tak langsung X_1 terhadap Y_4 melalui Y_2
 $\psi_5\beta_2 =$ Pengaruh tak langsung X_2 terhadap Y_4 melalui Y_2
 $\psi_6\delta_1 =$ Pengaruh tak langsung X_1 terhadap Y_4 melalui Y_3
 $\psi_6\delta_2 =$ Pengaruh tak langsung X_2 terhadap Y_4 melalui Y_3

8. Pengaruh total (total effect)

- $\Omega_1 = (\psi_1 + \psi_5\beta_1 + \psi_6\delta_1) =$ Pengaruh total X_1 terhadap Y_4
 $\Omega_2 = (\psi_2 + \psi_4\alpha_1 + \psi_5\beta_2 + \psi_6\delta_2) =$ Pengaruh total X_2 terhadap Y_4
 $\Omega_3 = (\psi_3 + \psi_4\alpha_2) =$ Pengaruh total X_3 terhadap Y_4

9. Error term

- $\epsilon_1 =$ Error term dari Y_1
 $\epsilon_2 =$ Error term dari Y_2
 $\epsilon_3 =$ Error term dari Y_3
 $\mu_1 = (\psi_4\epsilon_1 + \psi_5\epsilon_2 + \psi_6\epsilon_3 + \epsilon_4) =$ Error term dari Y_4

Pemetaan hubungan kausalitas yang dirinci dalam bentuk tabel pengaruh langsung dapat dilihat pada Tabel 4.1, pengaruh tidak langsung dapat dilihat pada tabel 4.2, dan pengaruh total dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.1 : Pengaruh Langsung antar Variabel

NO	PENGARUH LANGSUNG	KOEFISIEN REGRESI
1	Pengaruh langsung Pendapatan Asli Daerah /PAD (X1) terhadap Belanja Publik (Y2)	β_1
2	Pengaruh langsung Pendapatan Asli Daerah /PAD (X1) terhadap Belanja Rutin (Y3)	δ_1
3	Pengaruh langsung Pendapatan Asli Daerah /PAD (X1) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y4)	ψ_1
4	Pengaruh langsung Inflasi (X2) terhadap Investasi (Y1)	α_1
5	Pengaruh langsung Inflasi (X2) terhadap Belanja Publik (Y2)	β_2
6	Pengaruh langsung Inflasi (X2) terhadap Belanja Rutin (Y3)	δ_2
7	Pengaruh langsung Inflasi (X2) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y4)	ψ_2
8	Pengaruh langsung Suku Bunga Kredit (X3) terhadap Investasi (Y1)	α_2
9	Pengaruh langsung Suku Bunga Kredit (X3) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y4)	ψ_3
10	Pengaruh langsung Investasi(Y1) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y4)	ψ_4
11	Pengaruh Belanja Publik (Y2) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y4)	ψ_5
12	Pengaruh Belanja Rutin (Y3) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y4)	ψ_6

Tabel 4.2 : Pengaruh Tak Langsung antar Variabel

NO	PENGARUH TIDAK LANGSUNG	KOEFISIEN REGRESI
1	Pengaruh tidak langsung Pendapatan Asli Daerah /PAD (X1) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y4) melalui Belanja Publik (Y2)	$\psi_5\beta_1$
2	Pengaruh tidak langsung Pendapatan Asli Daerah /PAD (X1) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y4) melalui Belanja Rutin (Y3)	$\psi_6\delta_1$
3	Pengaruh tidak langsung Inflasi (X2) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y4) melalui Investasi (Y1)	$\psi_4\alpha_1$
4	Pengaruh tidak langsung Inflasi (X2) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y4) melalui Belanja Publik (Y2)	$\psi_5\beta_2$
5	Pengaruh tidak langsung Inflasi (X2) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y4) melalui Belanja Rutin (Y3)	$\psi_6\delta_2$
6	Pengaruh tidak langsung Suku Bunga Kredit (X3) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y4) melalui Investasi (Y1)	$\psi_4\alpha_2$

Tabel 4.3 : Pengaruh Total antar Variabel

NO	PENGARUH TOTAL	KOEFISIEN REGRESI
1	Pengaruh total Pendapatan Asli Daerah /PAD (X1) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y4)	$\Omega_1 = (\Psi_1 + \Psi_5\beta_1 + \Psi_6\delta_1)$
2	Pengaruh total Inflasi (X2) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y4)	$\Omega_2 = (\Psi_2 + \Psi_4\alpha_1 + \Psi_5\beta_2 + \Psi_6\delta_2)$
3	Pengaruh total Suku Bunga Kredit (X3) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y4)	$\Omega_3 = (\Psi_3 + \Psi_4\alpha_2)$

Uji kesesuaian model (*goodness-of fit test*) dimaksudkan untuk menguji apakah model yang diusulkan memiliki kesesuaian (*fit*) dengan data atau tidak. Shumacker & Lomaks, (1996:43) dan Kusnendi, (2005:19) mengatakan bahwa analisis jalur untuk suatu model yang diusulkan dikatakan *fit* dengan data apabila matriks korelasi sampel tidak jauh berbeda dengan matriks korelasi estimasi (*reproduced correlation matriks*) atau korelasi yang diharapkan (*expected correlation matriks*). Oleh karena itu, menurut Bachrudin & Harapan Tobing, (2003:37) rumusan hipotesis statistik kesesuaian model analisis jalur dirumuskan seperti berikut.

Ha : $R = R(\circ)$: Matriks korelasi estimasi **berbeda** dengan matriks korelasi sampel.

Ho : $R = R(\circ)$: Matriks korelasi estimasi **tidak berbeda (sama)** dengan matriks korelasi sampel.

Shumacker & Lomaks (1996:64-45) memberikan petunjuk bagaimana menguji kesesuaian model analisis jalur? Hal ini dapat digunakan uji statistik

Kesesuaian model koefisien Q dengan rumus : $Q = \frac{1-R_m^2}{1-M}$

Dimana Q = Koefisien Q

$$R_m^2 = 1 - (1 - R_1^2) \cdot (1 - R_2^2) \cdot \dots \cdot (1 - R_p^2)$$

$M = R_m^2$ Setelah dilakukan *trimming*

Apabila $Q = 1$ mengindikasikan model *fit* sempurna. Jika $Q < 1$, untuk menentukan *fit* tidaknya model maka statistic koefisien Q perlu diuji dengan statistic W yang dihitung dengan rumus:

$$W_{hitung} = -(N - d) \ln(Q)$$

Keterangan :

N = Menunjukkan ukuran sampel.

D = Banyaknya koefisien jalur yang tidak signifikan sama dengan *degree of freedom* = derajat bebas)

R_m^2 = koefisien determinasi multiple untuk model yang diusulkan.

M = Menunjukkan koefisien determinan multipel (R_m^2) setelah koefisien determinan jalur yang tidak signifikan yang dihilangkan.

Dasar Pengambilan Keputusan :

Jika W hitung $\geq X^2 (df, \alpha)$, tolak H_0 (berarti matriks korelasi sampel **berbeda** dengan matriks korelasi estimasi), maksudnya kedua model tersebut **signifikan**.

Jika W hitung $\leq X^2 (df, \alpha)$, terima H_0 (berarti matriks korelasi sampel **tidak berbeda (sama)** dengan matriks korelasi estimasi), maksudnya kedua model tersebut **tidak signifikan**.

F. Defenisi Operasional Variabel dan Pengukuran

Definisi operasional adalah suatu definisi yang didasarkan atas kriteria-kriteria, hal yang didefinisikan dapat diamati (diobservasi) dan diuji secara khusus. Istilah-istilah harus mempunyai rujukan-rujukan empiris, rincian-rincian dan prosedur-prosedurnya harus demikian jelas sehingga setiap orang yang kompeten akan memakainya akan mengkalisifikasikan obyeknya dengan cara yang sama (Coper dan Emory, 1996:37).

Definisi operasional dari variabel-variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang dimaksudkan sebagai PAD adalah alokasi sumber pendapatan yang diperoleh pemerintah kabupaten/kota yang menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada Pasal 5, terdiri dari:
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - d. lain-lain PAD yang sahLain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksudkan adalah meliputi:
 - a. hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan
 - b. jasa giro
 - c. pendapatan bunga
 - d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing

e. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah

PAD yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah PAD selama periode sejak mulainya era otonomi daerah diaplikasikan, yaitu sejak tahun 2000 sampai tahun 2000. Pengukuran PAD diperoleh berupa data ratio.

2. Variabel Inflasi, Yang dimaksudkan dengan Inflasi adalah besaran inflasi dalam periode bulan dan tahun pada setiap daerah kota/kabupaten pada Propinsi Kalimantan Timur sepanjang tahun sejak mulai dilaksanakannya otonomi daerah, yaitu sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2007. Hasil pengukuran nilai inflasi daerah adalah dalam bentuk prosentase, atau data ratio.
3. Variabel Suku bunga kredit, Yang dimaksudkan dengan suku bunga kredit daerah adalah besaran bunga kredit dalam periode bulan dan tahun pada setiap daerah kota/kabupaten pada Propinsi Kalimantan Timur sepanjang tahun sejak mulai dilaksanakannya otonomi daerah, yaitu sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2007. Hasil pengukuran nilai suku bunga kredit daerah adalah dalam bentuk prosentase, atau data ratio.
4. Variabel Investasi, yaitu investasi swasta yang berupa pengeluaran atau perbelanjaan baik oleh penanam-penanam modal domestic (dalam negeri) atau penanam modal asing untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi dalam usaha menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa dalam

perekonomian di Propinsi Kalimantan Timur termasuk duabelas kota/kabupaten yang ada di dalamnya. Investasi Swasta diukur dengan satuan rupiah, dalam bentuk data ratio. Investasi Swasta terdiri dari :

- a. Investasi Asing (PMA)
 - b. Investasi Dalam Negeri / Domestik (PMDN)
5. Variabel Belanja Publik, yang dimaksudkan dengan belanja public adalah belanja yang manfaatnya cenderung lebih besar atau secara langsung dinikmati oleh masyarakat, yang didalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai anggaran pembangunan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di setiap kota/kabupaten di Propinsi Kalimantan Timur, selama periode waktu sejak dimulainya era otonomi daerah, yaitu pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2007. Jenis data yang diperoleh adalah data ratio.
6. Variabel Belanja Rutin, yang dimaksudkan dengan belanja rutin adalah belanja aparatur yang manfaatnya cenderung lebih besar dinikmati oleh aparatur pemerintah daerah, yang didalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai anggaran belanja rutin daerah yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di setiap kota/kabupaten di Propinsi Kalimantan Timur, selama periode waktu sejak dimulainya era otonomi daerah, yaitu pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2007. Jenis data yang diperoleh adalah data ratio.
7. Variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap kota/kabupaten di Propinsi Kalimantan Timur per tahun menurut harga

konstan, Jenis data yang diperoleh dari pertumbuhan ekonomi ini adalah data ratio dalam bentuk persentase, periode pengambilan datanya dimulai sejak periode waktu sejak dimulainya era otonomi daerah, yaitu pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2007. Pertumbuhan Ekonomi ini dinyatakan dalam rumus pertumbuhan ekonomi sebagai berikut.

$$\text{PE tahun ke } t = \frac{PDRB_t - PDRB_{(t-1)}}{PDRB_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan	$PDRB_t$	adalah	$PDRB$ tahun ke-t
	$PDRB_{(t-1)}$	adalah	$PDRB$ tahun ke (t-1)

BAB V

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Geografi

Menurut data BPS Kalimantan timur (2007), Geografi Propinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut: Kalimantan Timur dengan luas wilayah daratan 198.441,17 km² dan luas pengelolaan laut 10.216,57 km² terletak antara 113°44' Bujur Timur dan 119°00' Bujur Timur serta diantara 4°24' Lintang Utara dan 2°25' Lintang Selatan. Dengan adanya perkembangan dan pemekaran wilayah, provinsi terluas kedua setelah Papua ini dibagi menjadi 9 (sembilan) kabupaten, 4 (empat) kota, 135 kecamatan dan 1.404 desa/kelurahan. Kesembilan kabupaten tersebut adalah Paser dengan ibukota Tanah Grogot, Kutai Barat dengan ibukota Sendawar, Kutai Kartanegara dengan ibukota Tenggarong, Kutai Timur dengan ibukota Sangatta, Berau dengan ibukota Tanjung Redeb, Malinau dengan ibukota Malinau, Bulungan dengan ibukota Tanjung Selor, Nunukan dengan ibukota Nunukan, dan Penajam Paser Utara dengan ibukota Penajam. Sedangkan keempat kota adalah Balikpapan, Samarinda, Tarakan dan Bontang. Kalimantan Timur merupakan salah satu pintu gerbang pembangunan di wilayah Indonesia bagian timur. Daerah yang juga dikenal sebagai gudang kayu dan hasil per-tambangan ini mempunyai ratusan sungai yang tersebar pada hampir semua

kabupaten/kota dan merupakan sarana angkutan utama di samping angkutan darat, dengan sungai yang terpanjang Sungai Mahakam.

Provinsi Kalimantan Timur terletak di sebelah paling timur Pulau Kalimantan dan sekaligus merupakan wilayah perbatasan dengan Negara Malaysia, khususnya Negara Sabah dan Sarawak. Tepatnya provinsi ini berbatasan langsung dengan Negara Malaysia di sebelah utara, Laut Sulawesi dan Selat Makasar di sebelah timur, Kalimantan Selatan di sebelah selatan, dan dengan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah serta Malaysia di sebelah barat.

Daratan Kalimantan Timur tidak terlepas dari pegunungan dan bukit yang terdapat hampir di seluruh kabupaten. Sedang untuk danau yang berjumlah sekitar 18 buah, sebagian besar berada di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan danau yang paling luas yaitu Danau Semayang dan Danau Melintang dengan luas masing-masing 13.000 hektar, dan 11.000 hektar.

2. Pemerintahan

Dari sebanyak 1.404 desa definitif terdapat 118 desa yang masih berstatus swadaya, 607 desa swakarsa dan 679 desa swasembada. Sedangkan dari sejumlah desa definitif tersebut, 384 desa mempunyai LKMD (Lembaga Keamanan Masyarakat Desa) kategori I, 338 Desa kategori II dan 682 desa kategori III.

Pada tahun 2006, jumlah Hansip di Kalimantan Timur adalah 21.964 yang keseluruhannya adalah dari satuan Linmas. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 24.836 jiwa

Banyaknya kecamatan, desa / kelurahan dan luas wilayah menurut kabupaten kota pada tahun 2006 menurut Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur dan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur, dapat di lihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Banyaknya Kecamatan, Desa / Kelurahan dan Luas Wilayah Menurut Kabupaten Kota th. 2006

Kabupaten/Kota <i>Regency/City</i>	Banyaknya Kecamatan <i>Number of Districts</i>	Banyaknya Desa/ Kelurahan <i>Number of Villages</i>	Luas Wilayah Daratan <i>Land Area</i>	
			km ²	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pasir	10	121	10.936,38	5,51
2. Kutai Barat	21	223	30.943,79	15,59
3. Kutai Kartanegara	18	221	26.326,00	13,27
4. Kutai Timur	18	136	31.884,59	16,07
5. Berau	13	107	22.521,71	11,35
6. Malinau	12	108	39.799,88	20,06
7. Bulungan	13	104	17.249,61	8,69
8. Nunukan	8	223	13.875,42	6,99
9. Penajam Paser U	4	46	3.209,66	1,62
10. Balikpapan	5	27	560,70	0,28
11. Samarinda	6	53	718,23	0,36
12. Tarakan	4	20	251,81	0,13
13. Bontang	3	15	163,39	0,08
Jumlah	135	1.404	198.441,17	100,00

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur dan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur.

3. Penduduk

Penduduk Kalimantan Timur dari tahun ke tahun mencatat kenaikan yang cukup berarti. Jumlah penduduk pada tahun 2000 sebesar 2.436.545 jiwa, meningkat menjadi 2.936.388 jiwa pada tahun 2006. Berarti dalam periode tersebut penduduk Kalimantan Timur telah bertambah lebih dari 83 ribu orang setiap tahunnya.

Pertumbuhan penduduk Kalimantan Timur sebenarnya tidak merata sepanjang tahun. Sebagai contoh, pertumbuhan penduduk pada periode 2002-2003 sebesar 5,72 persen, periode 2003-2004 sebesar 1,68 persen, pada periode 2004-2005 sebesar 3,29 persen, sedangkan periode 2005-2006 sebesar 3,36 persen.

Pada tahun 2005-2006 pertumbuhan penduduk di setiap kabupaten/kota menunjukkan peningkatan. Secara persentase, peningkatan tertinggi terjadi di Kota Tarakan sebesar 6,75 persen, sedangkan kabupaten/kota lainnya pertumbuhannya berkisar 1,35-6,18 persen.

Sebagaimana pertumbuhan penduduk, persebaran penduduk di Kalimantan Timur juga tidak merata. Tetapi penduduk yang semula lebih banyak tinggal di pedesaan sejak tahun 1995 sudah lebih dari 50 persen menetap di daerah perkotaan. Pada tahun 2006 sebagian besar penduduk Kalimantan Timur berada di Kota Samarinda (20,02%), yang merupakan ibukota Provinsi di Kalimantan Timur. Selebihnya berada di Kabupaten Kutai Kartanegara (17,21%), Kota Balikpapan (16,55%) dan

tersebar di kabupaten/kota lain berkisar 1-7 persen. Pola persebaran penduduk seperti ini sejak tahun 1990 tidak banyak berubah.

Pola persebaran penduduk Kalimantan Timur menurut luas wilayah sangat timpang, sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat kepadatan penduduk antar daerah yang mencolok, terutama antar daerah kabupaten dengan daerah Kota. Wilayah kabupaten dengan luas 98,87 persen dari wilayah Kalimantan Timur dihuni oleh sekitar 53,51 persen dari total penduduk Kalimantan Timur. Sedangkan selebihnya, yaitu sekitar 46,49 persen menetap di daerah kota dengan luas 1,13 persen dari luas wilayah Kalimantan Timur seluruhnya. Akibatnya kepadatan penduduk di daerah kabupaten hanya berkisar 133 jiwa/km² dibanding kepadatan penduduk di Kota Balikpapan sebanyak 629,54 jiwa/km², Kota Samarinda 818,32 jiwa/km², Kota Tarakan 247,50 jiwa/km² dan Kota Bontang 294,09 jiwa/km². Sedangkan kepadatan penduduk Kalimantan Timur adalah 12,77 jiwa/km².

Ditinjau dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki di Kalimantan Timur masih lebih banyak, dibanding perempuan. Ini terlihat dari rasio jenis kelamin laki-laki yang lebih besar dibandingkan wanita.

4. Perindustrian, Pertambangan, Energi

a. Perindustrian

Penggolongan sektor industri berdasarkan jumlah tenaga kerjanya dibedakan menjadi industri besar, industri sedang, industri

kecil dan industri kerajinan rumah tangga. Data mengenai Industri besar, sedang dan industri kecil tersedia setiap tahun, sedangkan data mengenai industri rumah tangga tidak tersedia pada publikasi ini.

Banyaknya perusahaan Industri Besar dan Sedang di Kalimantan Timur pada tahun 2005 tercatat 117 perusahaan dengan menyerap 54.897 tenaga kerja, dengan total pengeluaran untuk tenaga kerja berkisar Rp. 1,23 trilyun. Dilihat dari jumlah perusahaan dan penyerapan tenaga kerja, tahun 2005 menurun dibanding tahun 2004, akan tetapi pengeluaran untuk tenaga kerja meningkat sebesar Rp. 4 milyar.

b. Pertambangan

Kegiatan pertambangan di Kalimantan Timur mencakup pertambangan migas dan non-migas. Dari kegiatan tersebut, minyak bumi dan gas alam merupakan hasil tambang yang sangat besar pengaruhnya dalam perekonomian Kalimantan Timur khususnya dan Indonesia pada umumnya, karena hingga kini kedua hasil tambang tersebut merupakan komoditi ekspor utama.

Perkembangan produksi batu bara misalnya, sejak tahun 2001 terus meningkat setiap tahunnya dan pada tahun 2006 produksi batubara mencapai 86.699.226,64 ton.

Sementara itu, selama periode 2002-2006 produksi emas cenderung menurun, produksi tertinggi terjadi pada tahun 2002 sebesar 16,78 ton, tahun 2003 turun menjadi 14,40 ton, tahun 2004

turun kembali menjadi 10,02 ton dan terendah 0,088 ton terjadi pada tahun 2006.

Sedang untuk produksi perak, perkembangannya terlihat menurun, dari 10,92 ton pada tahun 2001 menjadi 10,84 ton pada 2002 dan turun lagi pada tahun 2003 sebesar 10,66 ton, 2004 sebesar 9,03 ton dan tahun 2005 produksinya hanya 1,26 ton, dan tahun 2006 turun lagi menjadi 0,022 ton.

Produksi pengilangan minyak untuk bahan bakar minyak premium pada tahun 2006 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dari 16,85 juta barrel menjadi 15,38 juta barrel. Sedangkan produksi minyak tanah juga mengalami penurunan dari 16,48 juta barrel menjadi 14,93 juta barrel.

Produksi Minyak Bumi dan Gas Bumi pada tahun 2006 mengalami penurunan masing-masing dari 45.573,76 MMSTB menjadi 41.137,58 MMSTB dan Gas Bumi dari 910.067,15 MMSCF menjadi 869.757,9 MMSCF.

c. Energi Listrik

Listrik adalah komoditas penting bagi keberlangsungan sendi-sendi kehidupan manusia saat ini. Tanpa pasokan energi listrik, hampir dipas-tikan banyak dunia usaha, rumah tangga maupun sektor yang lain lumpuh karenanya. Sebagian besar sumber energi listrik di Provinsi Kalimantan Timur hingga saat ini masih dipasok oleh Perusahaan Umum Listrik Negara.

Selama tahun 2006, tenaga listrik yang diproduksi sebesar 1.536.817,78 MWH, terjual 1.355.974,77 MWH, dipakai sendiri 32.514,18 MWH dan mengalami penyusutan sebesar 148.329 MWH.

5. Keuangan

Realisasi penerimaan untuk daerah otonom menurut kabupaten/kota pada tahun anggaran 2006 sebesar Rp. 8,6 trilyun, jumlah tersebut belum termasuk Kutai Barat, Kutai Timur, Penajam dan Tarakan. Penerimaan terbesar adalah kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 3,1 trilyun. Pada tahun anggaran 2006, porsi pengeluaran pembangunan lebih besar dari pengeluaran rutin yaitu sebesar 69,54 persen dari seluruh realisasi pengeluaran pada tahun 2006.

Pada tahun anggaran 2006 bagian terbesar pendapatan asli daerah tingkat I bersumber dari pajak daerah (*local tax*) sebesar Rp. 788 milyar atau mencapai 63,51 persen dari total PAD yang berjumlah sekitar Rp. 1,2 trilyun. Nilai PAD tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp. 897 milyar. Sumbangan retribusi daerah terhadap PAD hanya sebesar 8,76 persen dan sisanya merupakan PAD yang bersumber dari bagian laba BUMD dan penerimaan lain-lain.

Pada tahun 2006, terjadi kenaikan jumlah proyek pada penanaman modal dari dalam negeri yaitu 26 proyek dibanding tahun 2005 yang hanya 13 proyek. Dari 26 proyek tersebut menyerap modal sebesar Rp. 51,55 trilyun atau naik signifikan sebesar Rp. 49,77 trilyun

dibanding penyerapan modal pada tahun sebelumnya yang mempunyai 13 proyek.

Sementara penanaman modal asing mengalami penurunan dari 59 proyek pada tahun 2005 menjadi 54 proyek pada tahun 2006. Modal yang ditanamkan juga mengalami penurunan yang cukup berarti dari US\$ 548,07 juta menjadi sebesar US\$ 536,26 juta.

Lembaga keuangan di Kalimantan Timur yang berbentuk kantor bank 2006 berjumlah 295 unit. Meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 254 unit. Dari 295 unit kantor bank tersebut 109 unit berada di Kota Balikpapan, 90 unit di Kota Samarinda, 25 unit di Kota Bontang, 18 unit di Kota Tarakan dan lainnya tersebar di 9 kabupaten lain. Posisi kredit bank yang telah disalurkan pada tahun 2006 berjumlah Rp. 21,99 trilyun, dengan jumlah kredit terbesar pada sektor lainnya sebesar Rp. 6,28 trilyun, diikuti oleh sektor angkutan sebesar Rp. 3,38 trilyun, sektor pertambangan Rp. 3,12 trilyun dan selebihnya adalah untuk sektor Listrik, Gas dan Air, konstruksi, perdagangan, perindustrian dan Pertanian. Posisi tersebut diatas hampir semua sektor ekonomi mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, kecuali sektor perdagangan.

Sedangkan posisi deposito bank dirinci menurut Dati II, sampai dengan Desember 2006 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, dari 8,46 trilyun menjadi 10,98 trilyun. Untuk tabungan pada tahun 2006 (periode Januari-Desember) tercatat sekitar 1,5 juta penabung

dengan nilai tabungan sebesar Rp. 10,09 trilyun, berarti setiap penabung mempunyai nilai tabungan rata-rata sebesar Rp. 6,69 juta.

Dengan melihat perkembangan nilai tabungan di Kalimantan Timur yang mempunyai kecenderungan meningkat diharapkan pada tahun-tahun yang akan datang baik jumlah penabung maupun nilai tabungan akan semakin meningkat, mengingat begitu pentingnya tabungan dalam membantu pembiayaan pembangunan nasional.

6. Konsumsi

Sebagian besar pengeluaran penduduk di Kaltim digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan, sedang selebihnya konsumsi bukan makanan seperti perumahan, sadang, aneka barang dan jasa, dan lain-lain. Hal ini dapat dilihat dari persentase pengeluaran penduduk untuk makanan pada tahun 2006 sebesar 50,97 persen, masih lebih tinggi dibandingkan pengeluaran untuk non makanan, sedangkan pada tahun 2005 pengeluaran untuk makanan juga lebih tinggi dari pada pengeluaran non makanan sebesar 50,92 persen.

Berdasarkan tipe daerah, secara umum tingkat pengeluaran penduduk perkotaan jauh lebih tinggi dibanding penduduk pedesaan. Di perkotaan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan sebesar Rp. 526.021 sedangkan di pedesaan hanya sekitar Rp. 335.974. Sementara rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk daerah perkotaan dan pedesaan mencapai Rp. 439.546 dengan rincian Rp. 224.016 untuk konsumsi makanan dan Rp. 215.530 untuk konsumsi bukan makanan.

Dari total pengeluaran untuk konsumsi makanan 16,63 persen digunakan untuk konsumsi padipadian, 16,35 persen untuk konsumsi lainnya. Sedangkan pengeluaran konsumsi bukan makanan terutama digunakan untuk perumahan (57,35 persen) dan aneka barang dan jasa sebesar 26,33 persen.

Krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997 telah berdampak negatif pada seluruh tatanan ekonomi dan sosial di Indonesia. Pada tahun 1996 jumlah penduduk miskin sebanyak 224 561 jiwa melonjak menjadi 392 137 jiwa pada tahun 2001. Bahkan pada tahun 1999 dan 2000 jumlah penduduk miskin lebih tinggi dibanding tahun 2001 yaitu 401 760 jiwa dan 532 751 jiwa. Sedangkan pada tahun 2002 turun menjadi 313,040 jiwa, tahun 2003 sebanyak 328.597 jiwa dan tahun 2004 turun lagi menjadi 318.200 jiwa, Sedangkan untuk tahun 2006 naik kembali menjadi 607.538 jiwa.

Pada tahun 2006 sebagian besar di kabupaten/kota mengalami kenaikan penduduk miskin, hal ini sebagai akibat dari adanya program pemerintah yang memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin, sehingga mengakibatkan masyarakat berlomba-lomba untuk mendapatkan bantuan tersebut dengan menganggap dirinya sebagai penduduk miskin.

Pada tahun 2006, persentase penduduk miskin Kalimantan Timur dibandingkan keseluruhan penduduk adalah 19,79 persen. Angka ini jauh meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2005 persentasenya sebesar 16,34 persen.

Gambaran mengenai pengeluaran rata-rata perkapita sebulan menurut kabupaten/kota selama tahun 2005 dan 2006 di Propinsi Kalimantan Timur dapat di lihat pada Tabel 5.2.

TABEL 5.2 : Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Menurut Kabupaten/Kota (Rp) 2005 – 2006

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	2005	2006
(1)	(2)	(3)
1. Pasir	286.299	337.294
2. Kutai Barat	314.635	345.335
3. Kutai Kartanegara	296.652	360.727
4. Kutai Timur	319.523	469.623
5. Berau	368.664	377.284
6. Malinau	330.723	409.131
7. Bulungan	243.793	293.076
8. Nunukan	283.851	288.956
9. Penajam Paser U	283.136	314.844
10. Balikpapan	498.440	617.377
11. Samarinda	436.269	473.219
12. Tarakan	543.436	487.161
13. Bontang	500.549	540.128
KALIMANTAN TIMUR	382.390	439.546

Sumber : Badan Pusat Statistik Jakarta.

11. Produk Domestik Regional Bruto

Sejak pertengahan tahun 1997 mata uang rupiah mengalami depresiasi terhadap dollar Amerika. Tetapi pada tahun 2006 ini, nilai rupiah terhadap dollar Amerika semakin stabil. Dampak dari turunnya nilai rupiah ini tidak hanya dirasakan dalam skala nasional tetapi juga dalam skala regional. Walaupun demikian, sepanjang tahun 2006 sudah mulai nampak adanya tahap pemulihan dari pertumbuhan

ekonomi Kalimantan Timur. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2006 laju pertumbuhan sebesar 2,82 persen dengan migas dan tanpa migas sebesar 10,79 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 3,17 persen dengan migas dan tanpa migas 8,07 persen maka pada tahun 2006 terjadi penurunan laju pertumbuhan pada PDRB dengan migas.

Sebagian sektor ekonomi di Kalimantan Timur telah mengalami laju pertumbuhan yang lebih tinggi dari sebelumnya dan sebagian lagi juga mengalami penurunan. Diantaranya yang paling tinggi adalah sektor Perdagangan, hotel dan restaurant yang pada tahun sebelumnya sebesar 7,51 persen menjadi 12,60 persen. Sektor Pertambangan tanpa migas juga mengalami peningkatan yang signifikan dari 12,70 persen menjadi 17,70 persen. Sektor bangunan tahun 2005 sebesar 5,49 persen dan pada tahun 2006 menjadi 7,92 persen.

Struktur ekonomi Kalimantan Timur di tahun 2006 baik dengan migas maupun tanpa migas tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, hanya mengalami fluktuasi yang sangat kecil. PDRB dengan migas menunjukkan bahwa sektor ekonomi yang sangat berperan dalam pembentukan PDRB Kalimantan Timur adalah sektor pertambangan (41,65 persen), industri pengolahan (36,16 persen), sektor pertanian (5,32 persen), serta sektor perdagangan, Hotel & Restoran (6,48 persen). Untuk PDRB tanpa migas didominasi oleh

lima sektor yang masing-masing mempunyai peranan berkisar antara 8 – 34 persen, lima sektor tersebut adalah sektor pertambangan (33,43 persen), sektor Perdagangan, hotel dan restoran (15,89 persen), sektor Pertanian (13,05 persen), sektor industri pengolahan (12,13 persen), serta sektor pengangkutan dan komunikasi (8,56 persen). Dengan jumlah penduduk pertengahan tahun sebesar 2.936.388 jiwa, pendapatan perkapita netto atau pendapatan yang diterima penduduk Kalimantan Timur pada tahun 2006 sebesar Rp.10.222.212,- (dengan migas) yang berarti mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp. 8.795.118,-, sedangkan pendapatan perkapita tanpa migas dari Rp 5.444.032,- menjadi Rp 5.849.928,- di tahun 2006. Dengan melihat besarnya pendapatan perkapita penduduk Kalimantan Timur di tahun 2005 dan 2006, maka pertumbuhan pendapatan perkapita penduduk Kalimantan Timur di tahun 2006 adalah 16,23 persen dengan migas dan minus 7,46 persen tanpa migas.

B. Gambaran Umum PAD, Inflasi, Suku Bunga, Investasi, Belanja Publik, Belanja Rutin dan Pertumbuhan Ekonomi

Variabel penelitian ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi, Inflasi, Suku Bunga Kredit, Investasi baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN), Belanja Publik, Belanja Rutin, dan Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Timur yang terdiri dari PAD empat Kota dan delapan kabupaten.

Tabel 5.3 Descriptive Statistics Variabel Penelitian

Variabel	N	Range	Mean		Std. Deviation	Variance
			Statistic	Std. Error		
PAD	98	21.89	9.0490	.57041	5.64674	31.886
SUKUBUNG	98	21.48	6.7918	.32299	3.19749	10.224
INFLASI	98	3.77	1.3085	.07798	.77199	.596
B.PUB	98	30.12	12.9356	.69399	6.87011	47.198
B. RUTIN	98	28.10	12.1467	.67719	6.70389	44.942
INVEST	98	28.06	14.9395	.58859	5.82676	33.951
GROWTH	98	4.51	1.3581	.09751	.96531	.932
Valid N (listwise)	98					

Sumber : BPS Kaltim, data diolah 2009

Nilai deskriptif pada Tabel 5.3 di atas menunjukkan bahwa jumlah seri data yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah sebanyak 98 *series* data. Data yang memiliki standar deviasi terbesar adalah variabel B.PUB (belanja publik) yaitu sebesar 6.87011 hal ini berarti bahwa deviasi data belanja

publik adalah terbesar dari rata-rata data yang dipergunakan di dalam penelitian ini, kemudian disusul oleh belanja rutin sebesar 6.70389, dan seterusnya hingga deviasi terkecil dimiliki oleh data variabel inflasi. Seiring dengan simpangan baku data, variance data juga memiliki perilaku yang sama. Dari hasil perhitungan statistik deskriptif ini kita bisa mendapatkan gambaran bahwa variabel belanja publik memiliki sebaran variansi data yang paling besar yaitu dengan variance data sebesar 47.198, kemudian disusul oleh sebaran data pada variabel belanja rutin dengan variance sebesar 44.942, berikutnya adalah variance data variabel Investasi yaitu sebesar 33.951 dan seterusnya hingga variance data terkecil dimiliki oleh sebaran data variabel inflasi. Dari gambaran tersebut di atas maka dapat kita lihat struktur data yang dianalisa.

C. Hubungan Fungsional PAD, Inflasi, Suku Bunga Kredit, Investasi, Belanja Publik, Belanja Rutin dan Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil analisis *structural equation modelling* yang sudah memenuhi kriteria *goodness of fit*, kemudian dilakukan uji signifikansi hubungan fungsional antar variable sebagaimana pada lampiran. Untuk memudahkan dalam menganalisis hubungan fungsional antar variable kemudian nilai koefisien disusun dalam bentuk tabel sebagaimana di tampilkan pada Tabel 5.4 di bawah ini :

Tabel 5.4: Hubungan Fungsional Variabel Bebas dengan Variabel Terikat

Variabel Bebas	Variabel terikat	Simbol	Estimate	T value
PAD (X1)	1 Belanja Publik (Y2)	β_1	0.66	8.35
	2 Belanja Rutin (Y3)	δ_1	0.73	10.29
	3 Pertumbuhan Ekonomi (Y4)	ψ_1	0.1	8.78
Inflasi (X2)	1 Investasi (Y1)	α_1	-0.6	-7.56
	2 Belanja Publik (Y2)	β_2	-0.37	-6.37
	3 Belanja Rutin (Y3)	δ_2	-0.39	-7.65
	4 Pertumbuhan Ekonomi (Y4)	ψ_2	-0.03	-2.62
Suku Bunga Kredit (X3)	1 Investasi (Y1)	α_2	-1.48	-3.17
	2 Pertumbuhan Ekonomi (Y4)	ψ_3	-0.14	-2.41
Investasi (Y1)	1 Pertumbuhan Ekonomi (Y4)	ψ_4	0.132	54.56
Belanja Publik (Y2)	1 Pertumbuhan Ekonomi (Y4)	ψ_5	0.135	33.81
Belanja Rutin (Y3)	1 Pertumbuhan Ekonomi (Y4)	ψ_6	0.139	34.74

Sumber : Lampiran, data diolah 2009

1. Pengaruh Inflasi dan Suku Bunga Kredit terhadap Investasi

Pertama, Koefisien elastisitas variabel Inflasi terhadap Investasi adalah sebesar -0.60. Hal ini berarti bahwa Inflasi berhubungan negatif terhadap Investasi. Ini mengindikasikan bahwa jika Inflasi dapat ditekan sebesar 1 % akan diikuti peningkatan Investasi sebesar 0.60 %.

Berdasarkan nilai T value Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar -7.56 atau lebih besar dari T tabel -1.96. Hal ini berarti bahwa Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Investasi. Dengan demikian **hipotesis 1 yang menyatakan Inflasi berpengaruh langsung terhadap Investasi di Propinsi Kalimantan Timur dapat diterima.**

Kedua, Koefisien elastisitas variabel Suku Bunga Kredit terhadap Investasi adalah sebesar -1.48. Hal ini berarti bahwa Suku Bunga Kredit

berhubungan negatif terhadap Investasi. Ini mengindikasikan bahwa jika Suku Bunga Kredit diturunkan sebesar 1 % akan diikuti peningkatan Investasi sebesar 1.48 %.

Berdasarkan nilai T value Suku Bunga Kredit terhadap Investasi adalah sebesar -1.48 atau lebih besar dari T tabel -1.96. Hal ini berarti bahwa Suku Bunga Kredit berpengaruh signifikan terhadap Investasi. **Dengan demikian hipotesis 1 yang menyatakan Suku Bunga Kredit berpengaruh langsung terhadap Investasi di Propinsi Kalimantan Timur dapat diterima**

2. Pengaruh PAD dan Inflasi terhadap Belanja Publik

Pertama, Koefisien elastisitas variabel PAD terhadap Belanja Publik adalah sebesar 0.66. Hal ini berarti bahwa PAD berhubungan positif terhadap Belanja Publik. Ini mengindikasikan bahwa jika PAD meningkat 1 % akan diikuti peningkatan Belanja Publik sebesar 0.66 %.

Berdasarkan nilai T value PAD terhadap Belanja Publik adalah sebesar 8.35 atau lebih besar dari T tabel 1.96. Hal ini berarti bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Publik. **Dengan demikian hipotesis 2 yang menyatakan PAD berpengaruh langsung terhadap Belanja Publik di Propinsi Kalimantan Timur dapat diterima.**

Kedua, Koefisien elastisitas variabel Inflasi terhadap Belanja Publik adalah sebesar -0.37. Hal ini berarti bahwa Inflasi berhubungan negatif terhadap Belanja Publik. Ini mengindikasikan bahwa jika Inflasi dapat

ditekan sebesar 1 % akan diikuti peningkatan Belanja Publik sebesar 0.37 %.

Berdasarkan nilai T value Inflasi terhadap Belanja Publik adalah sebesar -6.37 atau lebih besar dari T tabel -1.96. Hal ini berarti bahwa Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Belanja Publik. **Dengan demikian hipotesis 2 yang menyatakan Inflasi berpengaruh langsung terhadap Belanja Publik di daerah Propinsi Kalimantan Timur dapat diterima.**

3. Pengaruh PAD dan Inflasi terhadap Belanja Rutin

Pertama, Koefisien elastisitas variabel PAD terhadap Belanja Rutin adalah sebesar 0.73. Hal ini berarti bahwa PAD berhubungan positif terhadap Belanja Rutin. Ini mengindikasikan bahwa jika PAD meningkat 1 % akan diikuti peningkatan Belanja Rutin sebesar 0.73 %.

Berdasarkan nilai T value PAD terhadap Belanja Rutin adalah sebesar 10.29 atau lebih besar dari T tabel 1.96. Hal ini berarti bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Rutin. **Dengan demikian hipotesis 3 yang menyatakan PAD berpengaruh langsung terhadap Belanja Rutin di daerah Propinsi Kalimantan Timur dapat diterima.**

Kedua, Koefisien elastisitas variabel Inflasi terhadap Belanja Rutin adalah sebesar -0.39. Hal ini berarti bahwa Inflasi berhubungan negatif terhadap Belanja Rutin. Ini mengindikasikan bahwa jika Inflasi dapat ditekan sebesar 1 % akan diikuti peningkatan Belanja Rutin sebesar 0.39 %.

Berdasarkan nilai T value Inflasi terhadap Belanja Rutin adalah sebesar -7.65 atau lebih besar dari T tabel -1.96. Hal ini berarti bahwa Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Belanja Rutin. Dengan demikian **hipotesis 3 yang menyatakan Inflasi berpengaruh langsung terhadap Belanja Rutin di Propinsi Kalimantan Timur dapat diterima.**

4. Pengaruh PAD, Inflasi, Suku Bunga Kredit, Investasi, Belanja Publik, dan Belanja Rutin terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pertama, Koefisien elastisitas variabel PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar 0.10. Hal ini berarti bahwa PAD berhubungan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Ini mengindikasikan bahwa jika PAD meningkat 1 % akan diikuti peningkatan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0.10 %.

Berdasarkan nilai T value PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar 8.78 atau lebih besar dari T tabel 1.96. Hal ini berarti bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dengan demikian **hipotesis 4 yang menyatakan PAD berpengaruh langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Kalimantan Timur dapat diterima.**

Kedua, Koefisien elastisitas variabel Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar -0.03. Hal ini berarti bahwa Inflasi berhubungan negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Ini mengindikasikan bahwa jika Inflasi dapat ditekan sebesar 1 % akan diikuti peningkatan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0.03 %.

Berdasarkan nilai T value Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar -2.62 atau lebih besar dari T tabel -1.96. Hal ini berarti bahwa Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. **Dengan demikian hipotesis 4 yang menyatakan Inflasi berpengaruh langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Kalimantan Timur dapat diterima.**

Ketiga, Koefisien elastisitas variabel Suku Bunga Kredit terhadap Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar -0.14. Hal ini berarti bahwa Suku Bunga Kredit berhubungan negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Ini mengindikasikan bahwa jika suku bunga kredit dapat diturunkan sebesar 1 % akan diikuti peningkatan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0.14 %.

Berdasarkan nilai T value Suku Bunga Kredit terhadap Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar -2.41 atau lebih besar dari T tabel -1.96. Hal ini berarti bahwa Suku Bunga Kredit berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. **Dengan demikian hipotesis 4 yang menyatakan Suku Bunga Kredit berpengaruh langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Kalimantan Timur dapat diterima.**

Keempat, Koefisien elastisitas variabel Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar 0.132. Hal ini berarti bahwa Investasi berhubungan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Ini mengindikasikan bahwa jika Investasi meningkat 1 % akan diikuti peningkatan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0.132 %.

Berdasarkan nilai T value Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar 54.56 atau lebih besar dari T tabel 1.96. Hal ini berarti bahwa Investasi berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Kelima, Koefisien elastisitas variabel Belanja Publik terhadap Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar 0.135. Hal ini berarti bahwa Belanja Publik berhubungan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Ini mengindikasikan bahwa jika Belanja Publik meningkat 1 % akan diikuti peningkatan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0.135 %.

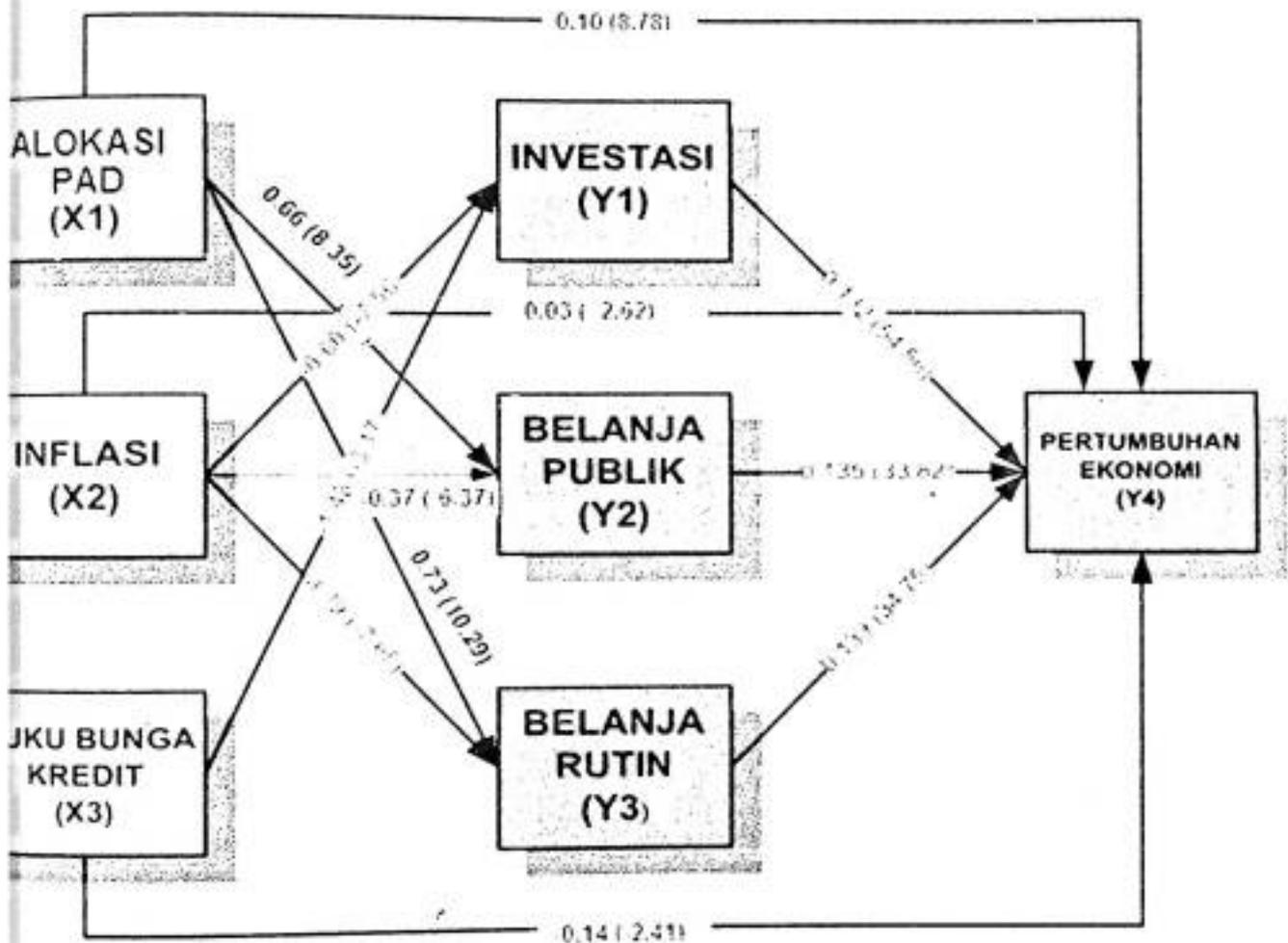
Berdasarkan nilai T value Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar 33.81 atau lebih besar dari T tabel 1.96. Hal ini berarti bahwa Belanja Publik berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Keenam, Koefisien elastisitas variabel Belanja Rutin terhadap Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar 0.139. Hal ini berarti bahwa Belanja Rutin berhubungan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Ini mengindikasikan bahwa jika Belanja Publik meningkat 1 % akan diikuti peningkatan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0.139 %.

Berdasarkan nilai T, value Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar 34.74 atau lebih besar dari T tabel 1.96. Hal ini berarti bahwa Belanja Rutin berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Hubungan fungsional PAD, Inflasi, Suku Bunga Kredit, Investasi, Belanja Publik, Belanja Rutin dan Pertumbuhan Ekonomi lebih jelas ditampilkan pada gambar berikut :

Gambar 5.3 : Koefisien Estimasi Menurut Jalur



D. Pengaruh Langsung, Tidak Langsung dan Total Pengaruh PAD, Inflasi, Suku Bunga Kredit, Investasi, Belanja Publik dan Belanja Rutin terhadap Pertumbuhan Ekonomi

1. Pengaruh langsung (*Direct Effect*)

Jalur langsung (direct effect) merupakan pengaruh langsung dari satu variabel bebas ke satu variabel tidak bebas, atau dalam model path digambarkan dengan satu anak panah. Sedangkan jalur tidak langsung melalui satu variabel interverning atau variabel antara. Variabel interverning atau dalam terminology keuangan disebut variabel control yaitu variabel yang memiliki kemampuan untuk merubah arah, koefisien maupun tingkat signifikan dari suatu pengaruh atau hubungan ketika ada satu atau lebih variabel yang dimasukkan dalam model.

Untuk mengetahui suatu hubungan secara langsung adalah berpengaruh signifikan, dapat dilihat pada nilai t value dibandingkan dengan t tabel.

Pengaruh langsung hubungan kausal dari data yang telah di analisis menggunakan path analysis tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.4 di atas. Dari hasil perhitungan statistik pada Tabel 5.4 memiliki makna sebagai berikut:

- a. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh langsung positif dan signifikan terhadap variabel Belanja Publik
- b. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh langsung positif dan signifikan terhadap variabel Belanja Rutin

- c. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh langsung positif dan signifikan terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi
- d. Variabel Inflasi memiliki pengaruh langsung negatif dan signifikan terhadap variabel Investasi
- e. Variabel Inflasi memiliki pengaruh langsung negatif dan signifikan terhadap variabel Belanja Publik.
- f. Variabel Inflasi memiliki pengaruh langsung negatif dan signifikan terhadap variabel Belanja Rutin.
- g. Variabel Inflasi memiliki pengaruh langsung negatif terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi.
- h. Variabel Suku Bunga Kredit memiliki pengaruh langsung negatif dan signifikan terhadap variabel Investasi.
- i. Variabel Suku Bunga Kredit memiliki pengaruh langsung negatif dan signifikan terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi
- j. Variabel Investasi memiliki pengaruh langsung positif dan signifikan terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi.
- k. Variabel Belanja Publik memiliki pengaruh langsung positif dan signifikan terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi.
- l. Variabel Belanja Rutin memiliki pengaruh langsung positif dan signifikan terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi.

2. Pengaruh Tidak Langsung

Pengaruh tidak langsung hubungan kausal dari data yang telah di analisis menggunakan path analysis tersebut dapat di tuliskan sebagaimana Tabel 5.5 di bawah ini:

Tabel 5.5: Pengaruh Tidak Langsung

	PENGARUH TIDAK LANGSUNG	Simbol	Nilai
1	Pengaruh tidak langsung Pendapatan Asli Daerah /PAD (X1) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y4) melalui Belanja Publik (Y2)	$\psi_5\beta_1$	0.0891
2	Pengaruh tidak langsung Pendapatan Asli Daerah /PAD (X1) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y4) melalui Belanja Rutin (Y3)	$\psi_6\delta_1$	0.10147
3	Pengaruh tidak langsung Inflasi (X2) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y4) melalui Investasi (Y1)	$\psi_4\alpha_1$	-0.0792
4	Pengaruh tidak langsung Inflasi (X2) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y4) melalui Belanja Publik (Y2)	$\psi_5\beta_2$	-0.04995
5	Pengaruh tidak langsung Inflasi (X2) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y4) melalui Belanja Rutin (Y3)	$\psi_6\delta_2$	-0.05421
6	Pengaruh tidak langsung Suku Bunga Kredit (X3) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y4) melalui Investasi (Y1)	$\psi_4\alpha_2$	-0.05148

umber : Lampiran, Data diolah 2009

- a. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh tidak langsung terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi melalui belanja publik dengan nilai sebesar 0.0891. Ini berarti bahwa saat PAD meningkat 1 % akan meningkatkan Pertumbuhan ekonomi sebesar 0.0891 % yang merupakan dampak peningkatan belanja publik.
- b. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh tidak langsung terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi melalui belanja rutin dengan nilai sebesar 0.101. Ini berarti bahwa saat PAD meningkat 1 % akan meningkatkan Pertumbuhan ekonomi sebesar 0.101 % yang merupakan dampak peningkatan belanja rutin.

- c. Variabel Inflasi memiliki pengaruh tidak langsung terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi melalui Investasi dengan nilai sebesar -0.079 . Ini berarti bahwa saat Inflasi dapat ditekan sebesar 1% akan meningkatkan Pertumbuhan ekonomi sebesar 0.079% yang merupakan dampak dari peningkatan investasi .
- d. Variabel Inflasi memiliki pengaruh tidak langsung terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja rutin dengan nilai sebesar -0.0542 . Ini berarti bahwa saat Inflasi dapat ditekan sebesar 1% akan menaikkan Pertumbuhan ekonomi sebesar 0.542% yang merupakan dampak peningkatan belanja rutin .
- e. Variabel Suku Bunga Kredit memiliki pengaruh tidak langsung terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi melalui Investasi dengan nilai sebesar -0.05148 . Ini berarti bahwa saat Suku Bunga Kredit dapat diturunkan sebesar 1% akan menaikkan Pertumbuhan ekonomi sebesar 0.05148% yang merupakan dampak peningkatan Investasi.

3. Pengaruh Total

Pengaruh total hubungan kausal dari data yang telah di analisis menggunakan path analysis tersebut dapat di tuliskan sebagaimana Tabel 5.6 di bawah ini:

Tabel 5.6: Pengaruh Total

PENGARUH TOTAL	KOEFISIEN REGRESI	Nilai
Pengaruh total Pendapatan Asli Daerah /PAD (X1) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y4)	$\Omega_1 = (\Psi_1 + \Psi_5\beta_1 + \Psi_6\delta_1)$	0.1
Pengaruh total Inflasi (X2) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y4)	$\Omega_2 = (\Psi_2 + \Psi_4\alpha_1 + \Psi_5\beta_2 + \Psi_6\delta_2)$	-0.03
Pengaruh total Suku Bunga Kredit (X3) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y4)	$\Omega_3 = (\Psi_3 + \Psi_4\alpha_2)$	-0.14

ber : Lampiran, data diolah 2009

- a. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh total terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0.10. Dengan demikian maka variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh total yang positif dan signifikan terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi .
- b. Variabel Inflasi memiliki pengaruh total terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi sebesar -0.03. Dengan demikian maka variabel Inflasi memiliki pengaruh total negatif dan signifikan terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi .
- c. Variabel Suku Bunga Kredit memiliki pengaruh total terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi sebesar -0.14. Dengan demikian maka variabel Suku Bunga Kredit memiliki pengaruh total negatif dan signifikan terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi .

BAB VI

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Pengaruh PAD dan Inflasi terhadap Belanja Publik

1. Pengaruh PAD terhadap Belanja Publik

PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim, 2002: 64), seperti pajak, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah, dan lain-lain. Besarnya PAD menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan memelihara serta mendukung hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang (Mamesah, 1995) (dalam Abdullah dan Halim, 2003).

Halim (2002:72) mengatakan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan. Selanjutnya belanja modal dibagi menjadi:

1. Belanja publik, yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum. Contoh belanja publik: pembangunan jembatan dan jalan raya, pembelian alat transportasi massa, dan pembelian mobil ambulans;
2. Belanja aparatur, yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur. Contoh

belanja aparatur: pembelian kendaraan dinas, pembangunan gedung pemerintahan, dan pembangunan rumah dinas.

Hasil dari penelitian ini bahwa PAD berhubungan positif dan signifikan terhadap Belanja Publik. Ini mengindikasikan bahwa jika PAD meningkat 1 % akan diikuti peningkatan Belanja Publik sebesar 0.66 %.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Aziz et al, 2000; Blackley, 1986; Joulfaian & Mokeerjee, 1990; Legrensi & milas, 2001; Von Furstenberg et al, 1986 dengan risetnya tentang studi tentang pengaruh pendapatan daerah (local own source revenue) terhadap pengeluaran daerah. Juga dengan temuan dari Darwanto & Yulia (2007), David Harianto dan Priyo Hari (2007), Saragih (2003), Radianto (1997), Kuncoro (2003) yang menyatakan terdapat pengaruh positif PAD terhadap Belanja Publik.

Hasil ini juga sejalan dengan teori dasar perekonomian, dimana pada saat Pendapatan Asli Daerah meningkat, maka akan meningkat pula alokasi anggaran yang dapat dipergunakan pada rencana anggaran dan pendapatan belanja daerah di tahun berikutnya. Khusus untuk belanja daerah maka pada pos belanja publik akan meningkat. Itulah sebabnya kenapa pendapatan asli daerah akan mampu mendorong belanja publik daerah menjadi meningkat pula.

2. Pengaruh Inflasi terhadap Belanja Publik

Inflasi adalah kecenderungan kenaikan harga secara umum dan terus menerus. Jika inflasi meningkat maka harga barang di dalam negeri terus mengalami kenaikan. Naiknya inflasi menyebabkan biaya produksi barang akan semakin tinggi, begitupula sebaliknya dengan turunnya inflasi akan menyebabkan biaya produksi menurun. Dengan turunnya harga barang mengakibatkan belanja publik akan meningkat, begitupula sebaliknya dengan kata lain Inflasi berpengaruh negatif terhadap belanja publik.

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa tingkat inflasi memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap Belanja Publik sebesar - 0.37 tersebut mengindikasikan bahwa saat inflasi dapat ditekan sebesar 1 % akan diikuti peningkatan Belanja Publik 0.37%, begitupula sebaliknya.

Hasil ini sejalan dengan teori terdahulu yang mempertimbangkan harga-harga akan mulai menanjak naik dengan adanya peningkatan nilai inflasi. Dengan meningkatnya harga-harga di suatu daerah tentunya akan menurunkan daya beli dengan nominal yang sama. Sehingga anggaran belanja publik akan mengalami penurunan daya beli dengan jumlah atau nilai yang sama dengan terjadinya peningkatan nilai inflasi.

Adapun penelitian terdahulu yang sejalan adalah Suparmoko (2003), Peacock dan Wisemen, dalam Mangkoesobroto (1997).

Bahl, (1999). Kaho, (1997). Barzelay, (1991). Oates, (1993). Zhang dan Zhou, (1998). Bird, (1994). Syafrizal (2008) Ekonomi Regional.

3. Dampak dan Implikasi Pengaruh PAD dan Inflasi terhadap Belanja Publik

a. PAD sangat mempengaruhi belanja publik dimana saat PAD meningkat akan meningkatkan belanja publik begitupula sebaliknya disaat PAD menurun akan menurunkan belanja publik.

Menurut Ratih dan Ichsan (1990) (dalam Hetty, 2003: 12) pendapatan asli daerah adalah seluruh penerimaan yang masuk ke kas daerah, yang diatur dengan peraturan yang berlaku, yang digunakan untuk menutupi pengeluaran daerah.

PAD merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dalam memenuhi belanja daerah, selain itu merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana (subsidi) dari pemerintah pusat.

Sumber PAD merupakan penerimaan murni daerah dan peranannya merupakan indikator sejauh mana telah dilaksanakan otonomi tersebut secara luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Sumber-sumber pendapatan asli daerah adalah: (a) Hasil pajak daerah; (b) Hasil retribusi daerah; (c) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan; (d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dalam meningkatkan belanja publik demi kepentingan masyarakat maka PAD Kalimantan Timur perlu lebih diefektifkan yaitu diperoleh dari pajak daerah, retribusi serta perusahaan daerah yang ada di Kalimantan Timur.

Berdasarkan data dari dinas pendapatan daerah provinsi Kaltim, upaya keras Pemprov Kaltim menarik sumber penerimaan daerah berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB/BBNKB) alat-alat berat dan besar pada tahun ini dan mendatang.

Sampai tahun 2008 ini, potensi PAD Kaltim sekitar Rp 1,3 triliun dan bakal meningkat menjadi Rp 2 triliun tahun 2009. Penambahan PAD itu bakal didapat dari asumsi perhitungan dari sumber PKB/BBNKB alat-alat berat dan besar.

Potensi PAD dari PKB/BBNKB alat-alat berat dan besar semua sektor di Kaltim seperti perkebunan, pertanian, kehutanan, pertambangan batu bara dan lain-lain setiap tahunnya mencapai Rp 55-60 miliar lebih. Jika potensi PKB/BBNKB alat-alat berat dan besar itu dihitung dari formulasi akumulasi tunggakan-tunggakan 5-6 tahun terakhir ini, maka angkanya sekitar Rp 500 miliar ke atas. Asumsi perkiraan sementara dengan dibayarnya PKB/BBNKB alat-alat berat dan besar beserta tunggakannya 5-6 tahun ini, maka PAD Kaltim bakal naik menjadi Rp 2 triliun per tahun. PAD Kaltim dari PKB/BBNKB alat berat ini memberi

kontribusi bertambah PAD mencapai 45 persen. (Dispenda Pemrov Kaltim, 2009)

Pencapaian penerimaan PAD kemudian disusun sebuah anggaran belanja daerah yang terdiri atas belanja rutin (operasional), belanja pembangunan (belanja modal) dan pengeluaran tidak terduga.

Salah satu bentuk pembangunan adalah belanja publik yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat.

Belanja publik merupakan belanja modal yang berupa investasi fisik (pembangunan infrastruktur) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun dan mengakibatkan terjadinya penambahan aset daerah.

Provinsi Kaltim merupakan salah satu provinsi dengan postur APBD terbesar di kawasan timur Indonesia. Total belanja tahun 2009 ini Rp5,39 triliun atau defisit Rp332 miliar. Pendapatan daerah ini bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp1,58 triliun, dana transfer Rp3,14 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sekitar Rp281,2 miliar.

Pemerintah memproyeksikan anggaran belanja dipakai untuk belanja modal operasi Rp3,12 triliun, belanja modal Rp1,72 triliun, belanja tak terduga Rp5 miliar, dan transfer bagi hasil ke kabupaten/kota/desa Rp533,35 miliar. Selain itu, belanja jalan dan irigasi, bangunan dan gedung, peralatan dan mesin, tanah,

bantuan keuangan, dan bantuan sosial. Ada pula belanja hibah, barang, dan belanja pegawai.

- b. Pada umumnya pengertian inflasi adalah kenaikan tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam suatu tahun tertentu di suatu negara. Ada beberapa pengertian mengenai inflasi menurut beberapa tokoh :

1) Menurut Mc Nabb dan McKenna (1990:2) :

- a) Merupakan suatu kenaikan harga barang secara umum.
- b) Berlangsung secara terus-menerus di dalam jangka waktu tertentu.

2) Menurut Weston dan Copeland (1988:250) :

"Suatu keadaan ekonomi yang mengalami kenaikan tingkat harga tertinggi dan tidak bisa dicegah atau dikendalikan lagi".

Inflasi yang terjadi dapat disebabkan dari dua sektor, yaitu : sektor pemerintah dan sektor swasta.

Berdasarkan data dari Pemprov Kaltim bahwa sepanjang Oktober 2009 terjadi inflasi di Kaltim yang mencapai 0,04 persen, sehingga secara keseluruhan sejak Januari - Oktober inflasi mencapai angka 3,69 persen. Inflasi ini terjadi menyusul kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari angka 120,88 di September 2009 menjadi 120,93 pada Oktober 2009.

Beberapa kota di Kaltim secara keseluruhan mengalami inflasi, kecuali Tarakan. Di Tarakan terjadi deflasi sebesar 0,74 persen.

Sedangkan Balikpapan dan Samarinda masing-masing mengalami inflasi sebesar 0,12 persen dan 0,20 persen.

Kelompok pengeluaran dalam IHK hanya kelompok bahan makanan yang prosentasenya dibawah nol, yakni -0,80 persen. Sementara untuk kelompok pengeluaran seperti makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau, perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, rekreasi dan olahraga, transport dan komunikasi, terjadi inflasi.

Berdasarkan data dari Biro pusat statistik, secara umum semua kabupaten/kota mengalami inflasi, kecuali Tarakan. Deflasi di Tarakan, bukan karena faktor tertentu yang bergerak signifikan, tetapi lebih karena inflasi bulan-bulan sebelumnya yang cukup tinggi. Selebihnya kondisi cenderung stabil, hingga terjadi deflasi di Tarakan

Pemerintah pusat dan daerah mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan-kegiatan yang konkrit berupa penggunaan barang-barang dan jasa atau sumber daya ekonomi. Dalam penggunaan sumber daya tersebut pada umumnya dinyatakan dalam bentuk belanja publik yang mana saat terjadi kenaikan harga atau inflasi anggaran belanja publik menjadi defisit dari sebelumnya.

Untuk lebih jelas dampak dan implikasi pengaruh PAD dan Inflasi terhadap belanja publik dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut:

Tabel 6.1 : Intisari pengaruh PAD dan Inflasi terhadap Belanja Publik

Temuan	Alasan	Dampak	Saran Implikasi Kebijakan
Pengaruh PAD (X1) terhadap Belanja Publik (Y2)	Sesuai teori/mendukung penelitian sebelumnya	<p>kecenderungan terjadi penurunan PAD Kaltim seiring dengan masih banyaknya tunggakan dari PKB/BBNKB alat-alat berat dan besar</p> <p>Pemerintah memproyeksikan anggaran belanja dipakai untuk jalan dan irigasi, bangunan dan gedung, peralatan dan mesin, tanah, bantuan keuangan, dan bantuan sosial</p>	<p>Agar tidak terjadi penurunan pada belanja daerah maka disarankan Pihak Pemprof lebih mengefektifkan sumber PAD Potensi PAD dari PKB/BBNKB alat-alat berat dan besar semua sektor di Kaltim seperti di perkebunan, pertanian, kehutanan, pertambangan batu bara</p>
Pengaruh Inflasi (X2) terhadap Belanja Publik (Y1)	Sesuai teori/mendukung penelitian sebelumnya	<p>Kecenderungan terjadi inflasi menyusul kenaikan indeks harga konsumen</p> <p>Pemerintah memproyeksikan anggaran belanja dipakai untuk jalan dan irigasi, bangunan dan gedung, peralatan dan mesin, tanah, bantuan keuangan, dan bantuan sosial</p>	<p>Seiring terjadinya inflasi disarankan agar pemerintah melakukan penyesuaian atau revisi anggaran atas belanja publik yang telah dianggarkan, karena dengan kenaikan harga akan diikuti penurunan belanja daerah</p>

ber : diolah dari hasil penelitian 2009

B. Pengaruh PAD dan Inflasi terhadap Belanja Rutin

1. Pengaruh PAD terhadap Belanja Rutin

Anggaran belanja rutin adalah anggaran yang disediakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang sifatnya lancar dan terus menerus, yang dimaksudkan untuk menjaga kelancaran roda pemerintahan dan memelihara hasil-hasil pembangunan. Dengan telah diberikannya kewenangan untuk mengelola keuangan daerah, maka belanja rutin diprioritaskan pada optimalisasi fungsi dan tugas rutin perangkat daerah.

Perencanaan belanja rutin sedapat mungkin menerapkan pendekatan anggaran kinerja (berorientasi pada output). Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan analisa dan evaluasi hubungan antara kebutuhan dan hasil serta manfaat yang diperoleh

Belanja rutin terdiri dari:

a. Belanja administrasi umum

- 1) Belanja Pegawai,
- 2) Belanja barang,
- 3) Belanja perjalanan dinas,
- 4) Belanja pemeliharaan

b. Belanja operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana

Hasil penelitian ini menemukan bahwa saat PAD meningkat 1 % akan diikuti peningkatan belanja rutin sebesar 0.73 %. Hasil penelitian ini kemudian sejalan dengan temuan dari Darwanto & Yulia (2007), David Harianto dan Priyo Hari (2007). Hasil ini juga memperkuat teori

dasar perekonomian, dimana pada saat Pendapatan Asli Daerah meningkat, maka akan meningkat pula alokasi anggaran yang dapat dipergunakan pada rencana anggaran dan pendapatan belanja daerah di tahun berikutnya. Khusus untuk belanja daerah maka pada pos belanja rutin akan meningkat. Itulah sebabnya kenapa pendapatan asli daerah akan mampu mendorong belanja rutin daerah menjadi meningkat pula.

2. Pengaruh Inflasi terhadap Belanja Rutin

Sebagaimana yang telah dipaparkan bahwa Inflasi adalah kecenderungan kenaikan harga secara umum dan terus menerus. Jika inflasi meningkat maka harga barang di dalam negeri, terus mengalami kenaikan. Naiknya inflasi menyebabkan biaya produksi barang akan semakin tinggi. Dengan naiknya harga barang mengakibatkan belanja rutin yang terdiri atas belanja administrasi umum serta belanja operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana akan menurun, atau dengan kata lain Inflasi berpengaruh negatif terhadap belanja rutin.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa saat inflasi dapat ditekan sebesar 1 % akan diikuti peningkatan belanja rutin sebesar 0.39 %.

Hasil ini sejalan dengan temuan sebelumnya, Suparmoko (2003) Peacock dan Wisemen, dalam Mangkoesobroto (1997). Bahl, (1999). Kaho, (1997). Barzelay, (1991). Oates, (1993). Zhang dan Zhou, (1998). Bird, (1994). Syafrizal (2008) .

Juga memperkuat teori terdahulu yang mempertimbangkan harga-harga akan mulai menanjak naik dengan adanya peningkatan nilai inflasi. Dengan meningkatnya harga-harga di suatu daerah tentunya akan menurunkan daya beli dengan nominal yang sama. Sehingga anggaran belanja rutin akan mengalami penurunan daya beli dengan jumlah atau nilai yang sama dengan terjadinya peningkatan nilai inflasi. Untuk itu perlu diadakan penekanan laju inflasi sehingga anggaran belanja rutin dapat terpenuhi.

3. Dampak dan Implikasi Pengaruh PAD dan Inflasi terhadap Belanja Rutin

a. Sebagaimana pemaparan sebelumnya, bahwa PAD merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dalam memenuhi belanja daerah, selain itu merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana (subsidi) dari pemerintah pusat.

Sumber PAD merupakan penerimaan murni daerah dan peranannya merupakan indikator sejauh mana telah dilaksanakan otonomi tersebut secara luas, nyata, dan bertanggungjawab. Sumber-sumber pendapatan asli daerah adalah: (a) Hasil pajak daerah; (b) Hasil retribusi daerah; (c) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan; (d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dalam meningkatkan belanja rutin yang terdiri atas belanja administrasi umum serta belanja operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana akan demi kepentingan masyarakat maka PAD Kalimantan Timur perlu lebih diefektifkan yaitu diperoleh dari pajak daerah, retribusi serta perusahaan daerah yang ada di Kalimantan Timur.

Berdasarkan data Pemprov Kaltim 2009, Anggaran belanja rutin selama periode 2009 menjadi pengeluaran terbesar dalam pengeluaran daerah dengan rata-rata hampir 80% yang sebagian besar diantaranya digunakan untuk menggaji pegawai negeri yang jumlahnya memang amat banyak juga digunakan untuk anggaran operasional kantor pemerintah. Belanja pegawai mendapatkan alokasi terbesar yaitu sebanyak 78,2% dari total belanja rutin. Artinya, sebagian uang yang diperoleh dari penerimaan pemerintah dan pajak lebih banyak terpakai untuk menggaji pegawai dan menjalankan kegiatan kantor.

Pola alokasi dan distribusi anggaran belanja rutin selama periode tahun anggaran 2008 sampai dengan tahun anggaran 2009 didominasi oleh tiga komponen belanja yaitu belanja pegawai yang digunakan untuk gaji pegawai, tunjangan dan lain sebagainya. Naik turunnya kontribusi pengeluaran rutin terhadap total pengeluaran rutin sangat dipengaruhi oleh fluktuasi belanja pegawai, sebab peran belanja pegawai dalam struktur pengeluaran rutin adalah yang terbesar. Kemudian

belanja barang yang digunakan oleh instansi – instansi atau dinas-dinas Pemerintah Kota Kalimantan Timur lalu disusul oleh belanja lain-lain.

Pemenuhan belanja rutin sangat dipengaruhi oleh anggaran yang telah dibuat berdasarkan alokasi PAD periode tersebut. Sehingga saat PAD terjadi penurunan akan menyebabkan penurunan anggaran belanja rutin daerah.

- b. Beberapa kota di Kaltim secara keseluruhan mengalami inflasi, kecuali Tarakan. Di Tarakan terjadi deflasi sebesar 0,74 persen. Sedangkan Balikpapan dan Samarinda masing-masing mengalami inflasi sebesar 0,12 persen dan 0,20 persen.

Kelompok pengeluaran dalam IHK hanya kelompok bahan makanan yang prosentasenya dibawah nol, yakni -0,80 persen. Sementara untuk kelompok pengeluaran seperti makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau, perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, rekreasi dan olahraga, transport dan komunikasi, terjadi inflasi.

Sama seperti belanja publik, belanja rutin juga sangat dipengaruhi oleh laju inflasi. Dengan naiknya harga-harga maka anggaran dana belanja rutin yang digunakan untuk belanja pegawai yang digunakan untuk gaji pegawai, tunjangan dan lain sebagainya juga akan menurun. Naik turunnya kontribusi pengeluaran rutin terhadap total pengeluaran rutin sangat dipengaruhi oleh fluktuasi belanja pegawai, sebab peran belanja pegawai dalam struktur

pengeluaran rutin adalah yang terbesar. Kemudian belanja barang yang digunakan oleh instansi – instansi atau dinas-dinas Pemerintah Kota Kalimantan Timur lalu disusul oleh belanja lain-lain yang jika terjadi kenaikan harga dalam teori ekonomi akan terjadi penurunan permintaan.

Untuk lebih jelas dampak dan implikasi pengaruh PAD dan Inflasi daerah terhadap belanja publik dapat dilihat pada Tabel 6.2 berikut:

Tabel 6.2 : Intisari pengaruh PAD dan Inflasi terhadap Belanja Publik

No.	Temuan	Alasan	Dampak	Saran Implikasi Kebijakan
1	Pengaruh PAD (X1) terhadap Belanja Rutin (Y3)	Sesuai teori/mendukung penelitian sebelumnya	kecenderungan terjadi penurunan PAD Kaltim seiring dengan masih banyaknya tunggakan dari PKB/BBNKB alat-alat berat dan besar Belanja rutin menjadi pengeluaran terbesar dalam pengeluaran daerah dengan rata-rata hampir 80% yang sebagian besar diantaranya digunakan untuk menggaji pegawai negeri yang jumlahnya memang amat banyak juga digunakan untuk anggaran operasional kantor pemerintah.	Agar tidak terjadi penurunan pada belanja daerah maka disarankan Pihak Pemprof lebih mengefektifkan sumber PAD Potensi PAD dari PKB/BBNKB alat-alat berat dan besar semua sektor di Kaltim seperti perkebunan, pertanian, kehutanan, pertambangan batu bara
2	Pengaruh Inflasi (X2) terhadap Belanja Rutin (Y3)	Sesuai teori/mendukung penelitian sebelumnya	Kecenderungan terjadi inflasi daerah menyusul kenaikan indeks harga konsumen Belanja rutin menjadi pengeluaran terbesar dalam pengeluaran daerah dengan rata-rata hampir 80% yang sebagian besar diantaranya digunakan untuk menggaji pegawai negeri yang jumlahnya memang amat banyak juga digunakan untuk anggaran operasional kantor pemerintah.	Seiring terjadinya inflasi disarankan agar pemerintah melakukan penyesuaian atau revisi anggaran atas belanja rutin yang telah dianggarkan, karena dengan kenaikan harga akan diikuti penurunan jumlah belanja rutin

Sumber : diolah dari hasil penelitian 2009

C. Pengaruh PAD, Inflasi, Suku Bunga Kredit, Investasi, Belanja Publik, dan Belanja Rutin terhadap Pertumbuhan Ekonomi

1. Pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara atau suatu daerah. Ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu wilayah yang terus menunjukkan peningkatan, maka itu menggambarkan bahwa perekonomian negara atau wilayah tersebut berkembang dengan baik.

Perencanaan pembangunan ekonomi merupakan sarana utama kearah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dengan perencanaan pembangunan ekonomi suatu negara dapat menentukan serangkaian sasaran ekonomi secara kuantitatif dalam periode tertentu. Melalui perencanaan pembangunan suatu negara dapat memobilisasi sumber daya yang terbatas untuk memperoleh hasil yang optimal dengan lancar, progresif dan seimbang.

Kebijakan otonomi daerah diyakini memberikan peluang bagi daerah untuk lebih maju. Namun demikian, oleh sebagian kalangan kebijakan

ini dianggap dimulai terlalu cepat. Pelaksanaan desentralisasi dianggap sebagai pendekatan big bang karena pendeknya waktu persiapan untuk negara yang cukup besar dengan kondisi geografis yang cukup menyulitkan (Brodjonegoro, 2003). Kebijakan otonomi justru dimulai pada saat daerah-daerah sedang melepaskan diri dari belenggu krisis moneter berkepanjangan yang dimulai pertengahan tahun 1997 (Adi, 2005). Hal ini bisa berarti kebijakan (otonomi) ini dimulai justru pada saat daerah mempunyai tingkat kesiapan (fiskal) daerah yang berbeda satu dengan lainnya, baik dalam hal ketersediaan dan kemampuan sumber daya, maupun manajemen pengelolaan daerah (terutama dalam hal keuangan).

Beberapa peneliti menunjukkan adanya disparitas pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi antar daerah sebelum memasuki era otonomi. Akibatnya adalah tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang relatif siap (yang sebelum era otonomi mempunyai pertumbuhan ekonomi tinggi), pada era otonomi juga mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dibanding dengan daerah-daerah yang relatif kurang siap. Hal ini paling tidak memberikan gambaran awal bahwa, pemerintah daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi (sebelum pelaksanaan otonomi) tinggi relatif lebih siap untuk memasuki otonomi daerah. Tingkat kemampuan keuangan daerah diukur dengan kinerja pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa PAD berhubungan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Ini mengindikasikan bahwa jika PAD

meningkat 1 % akan diikuti peningkatan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0.10 %. Penelitian ini sejalan dengan Amin Pujiati (2008), Daslan Simanjuntak (2006), Neo Klasik, Samuelson dan Nordhaus, (1993). Smith, (1776). Keyeness, (1936). Sukirno, (1994). Kuncoro, (2003). Holland, (1987). Dicken, (1992).

2. Pengaruh Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dalam kaitannya dengan perekonomian Indonesia, inflasi dapat terjadi akibat empat faktor, yakni dari sisi permintaan inflasi timbul sebab lebih besarnya kemampuan belanja konsumen dibanding dengan persediaan barang dan jasa yang akan dibeli (*demand pull inflation*). Kemudian dari sisi penawaran, utamanya sebagai akibat tingginya biaya produksi dunia usaha dalam menghasilkan barang dan jasa sesuai yang diminta konsumen (*cost push inflation*). Juga inflasi akibat adanya persoalan struktural dalam perekonomian (*structural inflation*), seperti akibat sulitnya arus distribusi barang dan jasa karena persoalan geografis, maupun karena adanya praktek bisnis yang tidak beretika dari para pelaku utama penyedia barang dan jasa. Sedangkan sumber keempat inflasi berasal dari pengaruh hubungan ekonomi dengan negara partner dagang luar negeri (*import inflation*). Ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas

perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu.

Peningkatan produksi barang dan jasa dari tahun sebelumnya sangat sulit ditempuh jika harga barang selalu meningkat akibat terjadi inflasi, karena dengan naiknya harga barang permintaan akan produk akan menurun.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa jika Inflasi dapat ditekan sebesar 1 % akan diikuti peningkatan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0.03 %, hasil ini sejalan dengan penelitian Arif M Yusuf (2008), Erna G (2004), Suparmoko (2003), Peacock dan Wisemen, dalam Mangkoesobroto (1997). Bahl, (1999). Kaho, (1997). Barzelay, (1991). Oates, (1993). Zhang dan Zhou, (1998). Bird, (1994). Syafrizal (2008).

3. Pengaruh Tingkat Bunga Kredit terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa penurunan BI Rate normalnya akan diikuti dengan penurunan suku bunga intermediasi (kredit). Penurunan bunga intermediasi akan menurunkan biaya modal sektor riil sehingga akan ada dampaknya terhadap daya saing harga output dan pertumbuhan ekonomi. Artinya saat tingkat bunga kredit menurun menyebabkan biaya modal yang dikeluarkan oleh perusahaan juga rendah sehingga memacu konsumsi masyarakat yang menyebabkan terjadinya peningkatan dan pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa jika suku bunga kredit dapat diturunkan sebesar 1 % akan diikuti peningkatan Pertumbuhan

Ekonomi sebesar 0.14 %. Begitupula sebaliknya, saat tingkat bunga kredit menurun akan diikuti pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya Erna G (2004), Sucahyo (2008), Sunny (2005), Samuelson dan Nordhaus, (1993). Smith, (1776). Keyeness, (1936). Sukirno, (1994). Kuncoro, (2003). Holland, (1987). Dicken, (1992).

Penelitian ini juga sesuai dengan pendekatan teori IS-LM dimana saat tingkat bunga kredit turun akan diikuti peningkatan pendapatan (pertumbuhan ekonomi) begitupula sebaliknya.

4. Pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pada dasarnya Investasi merupakan pembentukan modal yang mendukung peran swasta dalam perekonomian. Menurut Harrod Domar, dalam mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan investasi-investasi baru sebagai stok modal seperti penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing. Investasi di harapkan sebagai penggerak pertumbuhan perekonomian daerah maupun negara. Karena ,terbatasnya dana yang dimiliki daerah untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi maka peran investasi swasta juga dari luar negeri (PMA) sangat di harapkan.

Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output perkapita yang akan bertumbuh apabila dalam jangka waktu yang cukup lama (10, 20, 50 tahun bahkan lebih lama lagi) mengalami kenaikan output perkapita. Oleh karena itu proses pertumbuhan ekonomi harus

bersifat self-generation yang berarti bahwa proses pertumbuhan itu menelurkan kekuatan bagi timbulnya kelanjutan pertumbuhan tersebut dalam periode-periode selanjutnya (Boediono, 1999: 1). Sehingga untuk menaikkan output perkapita diperlukan berbagai akselerator dan salah satunya adalah investor.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa jika Investasi meningkat 1 % akan diikuti peningkatan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0.132 %. Penelitian ini sejalan dengan Thomas G. Rawski (2002), Rofikoh Rokhim (2007), Toni Eko (2003), Arif M Yusuf (2008), Samuelson dan Nordhaus, (1993). Smith, (1776). Keyeness, (1936). Sukirno, (1994). Kuncoro, (2003). Holland, (1987). Dicken, (1992).

5. Pengaruh Belanja Publik terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu bentuk pembangunan adalah belanja publik yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat. Belanja publik merupakan belanja modal yang berupa investasi fisik (pembangunan infrastruktur) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun dan mengakibatkan terjadinya penambahan aset daerah. Dengan membaiknya infrastruktur di suatu daerah akan memberikan kelancaran aktivitas ekonomi yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Hasil pada penelitian ini menemukan bahwa jika Belanja Publik meningkat 1 % akan diikuti peningkatan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0.135 %. Penelitian ini sejalan Kaho, (1997).

Barzelay, (1991). Oates, (1993). Zhang dan Zhou, (1998). Bird, (1994)., Syafrizal (2008).

6. Pengaruh Belanja Rutin terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dengan telah diberikannya kewenangan untuk mengelola keuangan daerah, maka belanja rutin diprioritaskan pada optimalisasi fungsi dan tugas rutin perangkat daerah. Perencanaan belanja rutin sedapat mungkin menerapkan pendekatan anggaran kinerja (berorientasi pada output). Kinerja membaik menghasilkan produktivitas meningkat dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Artinya belanja publik berhubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi

Hasil penelitian ini menemukan bahwa bahwa jika Belanja Publik meningkat 1 % akan diikuti peningkatan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0.139 %. Penelitian ini sejalan dengan Kaho, (1997). Barzelay, (1991). Oates, (1993). Zhang dan Zhou, (1998). Bird, (1994)., Syafrizal (2008).

7. Dampak dan Implikasi Pengaruh PAD, Inflasi, Suku Bunga Kredit, Investasi, Belanja Publik, dan Belanja Rutin terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah terciptanya kemandirian daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui Pendapatan Asli Daerah.

Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan PAD yang positif mempunyai kemungkinan untuk memiliki tingkat pendapatan per Kapita yang lebih baik. PAD merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi – potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan PAD secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah itu.

Berdasarkan data dari dinas pendapatan daerah provinsi Kaltim, upaya keras Pemprov Kaltim menarik sumber penerimaan daerah berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB/BBNKB) alat-alat berat dan besar pada tahun ini dan mendatang. sampai tahun 2008, potensi PAD Kaltim sekitar Rp 1,3 triliun dan bakal meningkat menjadi Rp 2 triliun tahun 2009. Penambahan PAD itu bakal didapat dari asumsi perhitungan dari sumber PKB/BBNKB alat-alat berat dan besar.

Potensi PAD dari PKB/BBNKB alat-alat berat dan besar semua sektor di Kaltim seperti perkebunan, pertanian, kehutanan, pertambangan batu bara dan lain-lain setiap tahunnya mencapai Rp 55-60 miliar lebih. Jika potensi PKB/BBNKB alat-alat berat dan besar itu dihitung dari formulasi akumulasi tunggakan-tunggakan 5-6 tahun terakhir ini, maka angkanya sekitar Rp 500 miliar ke atas. Asumsi

perkiraan sementara dengan dibayarnya PKB/BBNKB alat-alat berat dan besar beserta tunggakannya 5-6 tahun ini, maka PAD Kaltim bakal naik menjadi Rp 2 triliun per tahun. PAD Kaltim dari PKB/BBNKB alat berat ini memberi kontribusi bertambah PAD mencapai 45 persen. (Dispenda Pemrov Kaltim, 2009).

Dari data BPS kaltim 2009 sumbangan PAD terhadap APBD sebesar 0,8%, 2006 sebesar 0,11%, 2007 sebesar 0,13%. kemudian 2008 sebesar 0,11% dan 2009 sebesar 0,19% dengan rata-rata 0,27%. Dari data ini sumbangan PAD terhadap total APBD masih terlalu kecil yaitu nol koma, belum mencapai satu digit, sehingga upaya untuk meningkatkan PAD perlu dipacu secara terus menerus dan berkesinambungan.

Jadi pajak dan retribusi daerah sebagai unsur utama PAD, sangat kecil bila dibandingkan dengan hasil perusahaan milik daerah/hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan PAD lainnya yang sah dalam APBD termasuk unsur PAD. Jika dibandingkan dengan bagian dana perimbangan, PAD sangat kecil sekali

Berkaitan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan objek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap objek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama

melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau objek pendapatan daerah, perluasan sumber atau objek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang.

Secara umum upaya yang perlu dilakukan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antarlain dapat dilakukan dengan cara-cara berikut :

- a. Memperluas basis penerimaan yaitu dengan mengidentifikasi pembayaran pajak baru atau potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan .
- b. Memperkuat proses pemungutan yaitu dengan mempercepat penyusunan peraturan daerah (perda), mengubah tariff khususnya tariff retribusi dan peningkatan SDM
- c. Meningkatkan pengawasan yaitu dengan melakukan pemeriksaan secara sindak (inspeksi mendadak) dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.
- d. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan yaitu dengan memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

- e. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik yaitu dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

Selanjutnya ekstensifikasi perpajakan juga dapat dilakukan yaitu melalui kebijakan pemerintah untuk memberikan kewenangan perpajakan yang lebih besar kepada daerah pada masa mendatang. Untuk itu perlu adanya perubahan dalam sistem perpajakan di Indonesia sendiri melalui sistem pembagian langsung atau beberapa basis pajak pemerintah pusat yang lebih tepat dipungut oleh daerah. Disamping itu berkaitan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan, hal-hal penting lainnya yang perlu diperhatikan oleh daerah dalam upaya untuk pengoptimalkan penerimaan melalui perpajakan adalah dasar pengenaan pajak dan tarif pajak.

Dalam rangka peningkatan pendapatan dan peningkatan percepatan pertumbuhan ekonomi di Kaltim, maka perlu dilakukan langkah-langkah restrukturisasi dan revitalisasi BUMD agar mampu bertindak sebagai mitra investor dalam mendorong perekonomian di Kaltim. BUMD harus dapat meningkatkan profesionalismenya, meningkatkan efisiensi dalam pengelolaannya, dan menfokus pada kegiatannya. Untuk itu revitalisasi BUMD perlu segera dilakukan, misalnya dengan melakukan kerja sama operasi atau kontak manajemen dengan memanfaatkan peluang kerjasama dengan pihak

ketiga, konsolidasi atau merger dan melakukan rasionalisasi manajemen perusahaan di daerah.

Berdasarkan data dari Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Kaltim investasi yang masuk dari Januari hingga September 2009 sebesar Rp 4,15 triliun. Sedangkan target pertumbuhan ekonomi selama 2009 adalah 3 persen, sehingga diperlukan investasi sebanyak Rp 9 triliun. "Itu berarti, realisasi investasi sudah tercapai 50 persen.

Peningkatan investasi juga bisa dilakukan oleh pemerintah setempat dengan melakukan pengeluaran pembangunan, yaitu pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang non konsumtif, berbentuk investasi dalam proyek-proyek, baik dalam bentuk proyek fisik seperti pembangunan bendungan air maupun non fisik seperti proyek-proyek dalam pengembangan pendidikan, keagamaan dan sebagainya.

Pada dasarnya pengeluaran pembangunan merupakan wahana untuk mewujudkan kesejahteraan. Dengan kata lain, untuk meningkatkan kemakmuran secara merata dan serasi antar daerah dan antar golongan, dilaksanakan melalui upaya bidang ekonomi.

Prioritas diberikan kepada sektor-sektor yang merangsang dan menimbulkan dampak kegiatan ekonomi secara lebih luas dan intensif. Kreteria ini sekaligus berarti perluasan lapangan dan kesempatan kerja.

Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dimaksudkan juga untuk meningkatkan daya tarik

investasi. Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas ini akan berujung pada peningkatan kemandirian daerah sehingga terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Samuelson dan Nordhaus (2005) bahwa ada empat faktor sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor tersebut adalah (1) sumberdaya manusia, (2) sumberdaya alam, (3) pembentukan modal, dan (4) teknologi.

Dalam hal ini pengeluaran pemerintah berperan dalam pembentukan modal melalui pengeluaran pemerintah di berbagai bidang seperti sarana dan prasarana. Pembentukan modal di bidang sarana dan prasarana ini umumnya menjadi social overhead capital (SOC) yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. SOC ini sangat penting karena pihak swasta tidak akan mau menyediakan berbagai fasilitas publik, namun tanpa adanya fasilitas publik ini maka pihak swasta tidak berminat untuk menanamkan modalnya. Dengan adanya berbagai fasilitas publik ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan.

Peningkatan pendapatan berarti peningkatan kemampuan masyarakat untuk membayar pajak. Sebagaimana diketahui bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diperuntukkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah maka peningkatan pajak berarti peningkatan pengeluaran pemerintah. Keadaan ini membuat suatu siklus yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Kenaikan pengeluaran pemerintah akan

menyebabkan kenaikan pertumbuhan ekonomi dan kenaikan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah yang diperuntukkan bagi pembangunan

Pembangunan infrastruktur dan stabilitas politik mempengaruhi kuatnya keyakinan pelaku ekonomi terhadap kondusifnya Kalimantan Timur untuk menanamkan investasi. Karena itu, agar terjadi peningkatan investasi baik melalui Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan untuk menjaga stabilitas politik di Kalimantan Timur menjadi perhatian di tahun 2010.

Dukungan infrastruktur dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan rakyat pada tahun 2010 masih menghadapi berbagai masalah dan tantangan, antara lain : masih kurang memadainya pelayanan infrastruktur untuk memenuhi pelayanan dasar sesuai standar pelayanan minimal; masih kurang memadainya dukungan infrastruktur dalam upaya peningkatan daya saing sektor riil; sehingga perlu ditingkatkannya realisasi pembangunan infrastruktur melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha swasta.

Untuk kawasan perbatasan, pedalaman dan terpencil yang sulit dijangkau oleh modal angkutan jalan darat, sungai dan laut, maka satu-satunya alternatif untuk mencapainya adalah dengan melalui transportasi udara. Sebagai konsekuensinya Pemerintah harus memberikan subsidi ongkos angkut kepada masyarakat pedalaman

dan perbatasan yang kondisi sosial ekonominya pada umumnya relatif rendah.

Pengembangan Infrastruktur Wilayah, difokuskan pada, pembangunan infrastruktur perhubungan, pembangunan infrastruktur pengendali banjir, pembangunan dan rehabilitasi daerah strategis, persiapan pembangunan jalan tol (Freeway) Balikpapan – Samarinda sepanjang 87 km yang terbagi dalam tiga paket pengerjaan Balikpapan – Samboja 24,3 km, Samboja – Palaran 45,6 km dan Palaran – Samarinda 16,9 km. Pembangunan akan dimulai pada km 13 Balikpapan. Freeway dibangun dengan maksud untuk meningkatkan efisiensi distribusi dan meningkatnya daya saing daerah (DED-Detail Enggenering Design)

Selain itu pengeluaran daerah dalam bentuk belanja daerah juga diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan melalui revitalisasi pertanian, infrastruktur dasar, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial bagi masyarakat miskin. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D. Pengaruh Inflasi, Suku Bunga Kredit terhadap Investasi

1. Pengaruh Inflasi terhadap Investasi

Inflasi merupakan suatu fenomena di mana terjadi kenaikan harga barang secara umum dan berlangsung secara terus menerus. Pengaruh inflasi dapat memiliki dampak positif atau negatif tergantung seberapa parah atau tidaknya tingkat inflasi tersebut. Inflasi yang ringan atau moderat akan membuat perekonomian menjadi bergairah karena dapat mendorong laju investasi yang kemudian membuka lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi pengangguran dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian bagi para pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan untuk melaksanakan konsumsi, investasi, dan produksi yang pada akhirnya akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, pengendalian inflasi untuk mencapai kestabilan harga barang dan jasa merupakan prasyarat penting dalam menciptakan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Hasil penelitian jni menemukan bahwa jika Inflasi dapat ditekan sebesar 1 % akan diikuti peningkatan Investasi sebesar 0.60 %. Penelitian ini sejalan dengan Sukirno, (1994). Kuncoro, (2003). Holland, (1987). Dicken, (1992).

2. Pengaruh suku bunga kredit terhadap Investasi

Setiap pelaku bisnis baik pengusaha, manajer, individu dalam menjalankan kegiatan ekonomi dan bisnis tidak terlepas dari berbagai alternatif keputusan investasi dan pembiayaan. Keputusan investasi dan pembiayaan merupakan Keputusan yang saling bertalian seperti mata uang dengan dua sisi, dimana satu sisi adalah keputusan investasi maka di sisi lain adalah keputusan pembiayaan.

Secara teoritis, keterandalan keputusan investasi dan pembiayaan sangatlah bergantung pada tingkat suku bunga yang berlaku. Menurut Lawrence J Gitman (2000) tingkat suku bunga merupakan kompensasi yang harus dibayar oleh pihak peminjam (*borrower*) dana kepada pihak yang meminjamkan (*lender*). Dari sudut pandang *borrower* tingkat suku bunga merupakan biaya penggunaan dana (*cost of borrowing funds*) yang harus dipertimbangkan dalam keputusan pembiayaan, sedangkan dari sudut pandang *lender* tingkat suku bunga merupakan tingkat hasil yang diharapkan (*required return*).

Hasil penelitian ini menemukan bahwa jika Suku Bunga Kredit dapat diturunkan sebesar 1 % akan diikuti peningkatan Investasi sebesar 1.48 %, begitupula sebaliknya. Penelitian ini sejalan dengan Faturrahman Anwar (2008), Devie (2000).

3. Dampak, Implikasi Pengaruh Inflasi, Suku Bunga Kredit terhadap Investasi

Setiap pelaku bisnis baik pengusaha, manajer, individu dalam menjalankan kegiatan ekonomi dan bisnis tidak terlepas dari berbagai alternatif keputusan investasi dan pembiayaan. Keputusan investasi dan pembiayaan merupakan keputusan yang saling bertalian seperti mata uang dengan dua sisi, dimana satu sisi adalah keputusan investasi maka di sisi lain adalah keputusan pembiayaan.

Apabila inflasi naik, akan berdampak pada naiknya harga bahan baku yang pada akhirnya akan menyebabkan menurunnya daya saing terhadap produk barang yang dihasilkan suatu perusahaan. Hal ini akan berdampak pada menurunnya prospek perusahaan dan akan berdampak buruk pada kemampuan perusahaan tersebut untuk berinvestasi. Selain itu meningkatnya inflasi akan menaikkan biaya perusahaan yang mengakibatkan menurunnya profitabilitas perusahaan-perusahaan.

Adam Smith menyatakan bahwa investasi dilakukan karena para pemilik modal mengharapkan untung dan harapan masa depan keuntungan bergantung pada iklim investasi pada hari ini dan pada keuntungan nyata. Smith yakin keuntungan cenderung menurun dengan adanya kemajuan ekonomi.

Kalimantan Timur sebagai propinsi maju kini semakin menjulang dengan beberapa peluang investasi yang terbuka dari segala penjuru. Pemerintah daerah cukup fokus dalam menangani masalah-masalah

yang berhubungan dengan hambatan investasi sehingga Kalimantan tumbuh menjadi tumbuh menjadi propinsi dengan pembangunan yang maju dan berkualitas.

Otonomi daerah membuat kepala daerah dapat dengan bebas menerapkan program-program pembangunannya demi kesejahteraan rakyat dengan optimalitas potensi yang ada. Otonomi daerah membuat kestabilan politik daerah Kaltim menjadi lebih bagus dan berhasil mendukung terwujudnya kebijakan-kebijakan ekonomi yang penting. Keberhasilan otonomi daerah di Kalimantan Timur mengantarkan propinsi ini di gala terdepan dalam perkembangan ekonomi yang semakin maju.

Kemajuan Kaltim banyak ditopang oleh kekayaan sumber daya alam berupa minyak, gas alam dan batubara serta kayu yang dimiliki. Batubara dan kayu yang merupakan komoditas nonmigas dan sedang dibutuhkan Cina dan India ini mempunyai kecenderungan harga yang meningkat. Kondisi ini memberikan keuntungan pemasukan yang luar biasa bagi Kaltim karena perkembangan pertumbuhan ekspor nonmigas yaitu batubara dan kayu bergerak positif

Peningkatan ekspor nonmigas ini menunjukkan bahwa Kaltim sedang berada di puncak kejayaannya karena menginduksi sektor-sektor lainnya untuk tumbuh. Secara umum, ekonomi Kaltim tumbuh sebesar 6.5 persen pada triwulan 1 2008 lebih tinggi dari triwulan sebelumnya (IV-2007) yaitu sebesar 4.37 persen. Dari sisi permintaan

perekonomian Kaltim ini didorong oleh besarnya ekspor dan konsumsi masyarakat Kaltim yang mempunyai daya beli tinggi.

Sedangkan di sisi penawaran, hasil tambang berupa migas (minyak dan gas) dan non migas terutama batubara serta kayu memberikan kontribusi terbesar disusul dengan sektor perdagangan, hotel restoran terutama pada pariwisata serta industri pengolahan kertas, kimia, pupuk, karet dan bahan makanan serta kerajinan tangan.

Investasi di sektor migas dan non migas memang menjadi andalan bagi propinsi Kaltim. Proyek pengeboran sumber minyak dan galian diprioritaskan dengan mempergunakan teknologi maju dengan wacana kerjasama bagi hasil antara pemerintah daerah dengan pihak asing.

Di sisi lain, masuknya investasi di industri pariwisata berpotensi berkembang pesat, karena daerah Kaltim memiliki obyek wisata yang bervariasi seperti wisata alam, agrowisata dan wisata budaya. Wisata alam meliputi keindahan laut, pegunungan, sungai yang panjang berkelok serta hutan tropis seperti Kawasan Taman Nasional Kutai. Wisata budaya meliputi peninggalan sejarah dan keanekaragaman tradisi, kesenian dan budaya suku Dayak.

Peluang investasi ada diseluruh kawasan Kaltim. Namun, pemerintah sebaiknya paham tentang bagaimana melakukan percepatan investasi ini untuk melanjutkan pembangunan berkelanjutan dan berdaya saing tinggi. Salah satunya adalah dengan memperhatikan faktor faktor yang berpengaruh terhadap investasi diantaranya adalah

laju inflasi, tingkat bunga kredit dan tingkat pengembalian investasi kepada investor.

Berdasarkan data Pemprov Kaltim 2009, sepanjang Oktober 2009 terjadi inflasi di Kaltim yang mencapai 0,04 persen, sehingga secara keseluruhan sejak Januari - Oktober inflasi mencapai angka 3,69 persen. Inflasi ini terjadi menyusul kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari angka 120,88 di September 2009 menjadi 120,93 pada Oktober 2009. Beberapa kota di Kaltim secara keseluruhan mengalami inflasi, kecuali Tarakan. Di Tarakan terjadi deflasi sebesar 0,74 persen. Sedangkan Balikpapan dan Samarinda masing-masing mengalami inflasi sebesar 0,12 persen dan 0,20 persen. Kelompok pengeluaran dalam IHK hanya kelompok bahan makanan yang persentasenya dibawah nol, yakni -0,80 persen. Sementara untuk kelompok pengeluaran seperti makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau, perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, rekreasi dan olahraga, transport dan komunikasi, terjadi inflasi.

Secara teoritis, keterandalan keputusan investasi dan pembiayaan juga sangatlah bergantung pada tingkat suku bunga yang berlaku. Menurut Lawrence J Gitman (2000) tingkat suku bunga merupakan kompensasi yang harus dibayar oleh pihak peminjam (borrower) dana kepada pihak yang meminjamkan (lender). Dari sudut pandang borrower tingkat suku bunga merupakan biaya penggunaan dana (cost of borrowing funds) yang harus dipertimbangkan dalam keputusan pembiayaan, sedangkan dari sudut pandang lender tingkat

suku bunga merupakan tingkat hasil yang diharapkan (required return). Pemahaman secara lebih mendalam tentang karakteristik tingkat suku bunga sangat membantu keakuratan hasil keputusan investasi dan keputusan pembiayaan. Dalam praktek, tingkat suku bunga diterjemahkan kedalam berbagai terminologi yang beraneka ragam. Keragaman terminologi suku bunga membawa konsekuensi pada penentuan besaran biaya penggunaan dana dan penentuan hasil yang diharapkan dari suatu proyek investasi

Seiring dengan diterapkannya kerangka kebijakan Inflation Targeting (IT) pada Juli 2005, Bank Indonesia memberlakukan BI Rate sebagai suku bunga kebijakan. Memasuki tahun ketiga penerapan kebijakan tersebut, perbankan nasional menunjukkan respon yang positif. Hal tersebut terlihat dari penentuan suku bunga pasar yang mengacu pada BI Rate, seperti suku bunga deposito dan PUAB (Pasar Uang Antar Bank). Adapun suku bunga kredit pada umumnya juga akan diikuti oleh pergerakan investasi (Mankiw dalam Wimanda, 2007).

Efek dari kebijakan moneter Bank Indonesia terhadap pergerakan suku bunga dan sektor riil tidak hanya berlaku secara nasional, namun juga secara regional.

Investasi adalah sumber dari kekuatan penggerak ekonomi. Elemen-elemen yang penting dari investasi adalah mendapatkan pengembalian yang maksimum dengan meminimalkan risiko. Konsep ini sangat cocok diterapkan jika kita memutuskan berinvestasi pada

proyek-proyek investasi yang bergerak pada hampir semua sektor perekonomian di propinsi Kalimantan Timur ini

Implikasi yang dilakukan oleh pemerintah Prov Kaltim adalah dengan melakukan pengendalian inflasi dengan mengkoordinasikan seluruh instansi terkait dan pengusaha atau distributor dalam hal penyediaan bahan baku atau bahan pokok. Berikutnya adalah mengupayakan agar pengembalian keuntungan investasi baik dalam bentuk bunga investasi maupun bagi hasil agar tetap pro kepada investor karena kekuatan ekonomi utama yang menentukan investasi adalah hasil biaya investasi yang ditentukan oleh kebijakan tingkat bunga dan pajak, serta harapan mengenai masa depan (Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, 1993, 183).

BAB VII

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan permasalahan yang ada didalam penelitian ini dan hipotesis penelitian serta hasil analisa data dan pembahasan hasil analisa, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga naik - turunnya PAD akan diikuti dengan naik dan turunnya pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini mengindikasikan bila sebuah daerah ingin menumbuhkan perekonomiannya, maka pendapatan asli daerah tersebut seyogyanya juga tumbuh secara positif.
2. Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga saat inflasi dapat ditekan, akan diikuti peningkatan pertumbuhan ekonomi begitupula sebaliknya. Hal ini mengindikasikan bahwa bila sebuah daerah ingin menumbuhkan perekonomiannya, maka daerah tersebut sedapat mungkin mengendalikan inflasinya.
3. Bunga kredit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga saat tingkat bunga kredit diturunkan, akan diikuti peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengindikasikan bahwa bila daerah ingin meningkatkan pertumbuhannya sedapat mungkin mengendalikan atau menurunkan tingkat bunga kredit daerahnya.

4. Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut, sehingga naik turunnya investasi daerah akan diikuti dengan naik - turunnya pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi pertumbuhan investasi di daerah tersebut, baik itu investasi dari penanaman modal dalam negeri atau penanaman modal luar negeri, maka akan dapat memicu pertumbuhan perekonomian daerah.
5. Belanja Publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga naik - turunnya Belanja Publik akan diikuti dengan naik dan turunnya pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengindikasikan bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka belanja publik ditingkatkan.
6. Belanja Rutin berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga naik - turunnya belanja rutin akan diikuti dengan naik dan turunnya pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengindikasikan bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dibutuhkan juga peningkatan belanja rutin

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang ada di dalam penelitian ini dan hipotesis penelitian serta hasil analisa data serta pembahasan hasil analisa pada Bab VI terdahulu, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Dalam menyusun perencanaan pembangunan di Kalimantan Timur maka pemerintah daerah perlu mempertimbangkan faktor faktor Pendapatan Asli Daerah (PAD), Inflasi, Suku Bunga Kredit, Investasi, Belanja Publik, dan Belanja rutin karena faktor ini dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur.
2. Dalam rangka meningkatkan PAD maka pemerintah daerah lebih mengutamakan menggali sumber-sumber PAD yang belum tersentuh (ekstensifikasi Pajak) daripada menaikkan tarif pajak dan retribusi daerah.
3. Dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi di daerah maka pihak pemerintah daerah Kalimantan Timur untuk mengendalikan tingkat inflasi dan tingkat bunga kredit di daerah.
4. Untuk peneliti berikutnya, hendaknya menambah variabel yang belum dimasukkan ke dalam model ini.

DAFTAR PUSTAKA

- , 2000. "Undang-undang Nomor 33 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2000".
- , 2000. "Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah".
- , 2007. "Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.07/2007 tentang Peta Kapasitas Fiskal.
- Abdullah, Burhanuddin. 2006. Strategi Kebijakan Moneter dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan. Bank Indonesia, Jakarta.
- Abdullah, Syukry dan Abdu Halim, 2003. Pengaruh Dana Alokasi Umum DAU dan Pendapatan Asli Daerah PAD Terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali, SNA, Surabaya, Oktober 2003.
- Achmad Bachrudin dan Harapan L. Tobing 2003. Analisis Data untuk Penelitian Survey menggunakan Lisrel 8. Bandung: Jurusan Statistika, FMIPA, UNPAD.
- Adi, Wijaya. 2006. Kajian Ketimpangan Jawa dan Luar Jawa. Jakarta : Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan LIPI.
- Alfirman, Luky dan Edy Sutriyono. 2003. Analisis Hubungan Pengeluaran Pemerintah dan Produk Domestik Bruto dengan Menggunakan Pendekatan Granger Causality dan Vector Autoregression. Jurnal Keuangan Publik. Departemen Keuangan.
- Alkadri, dkk. 1999. Manajemen Teknologi untuk Pengembangan Wilayah: Konsep Dasar, Contoh Kasus, dan Implikasi Kebijakan, Edisi Revisi. Jakarta : Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT.

- Aloysius Gunadi Brata. 2004. Nilai Ekonomis Modal Sosial Pada Sektor Informal Perkotaan. email : aloy.gb@mail.uajy.ac.id, Agustus 2004. Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya.
- Amin Pujiati, 2008 Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Karesidenan Semarang Era Desentralisasi Fiskal, Jurnal Ekonomi Pembangunan.
- Amir 2006. Perencanaan Dan Pembiayaan Pembangunan. Edisi Ke-3. UI-Jakarta : Press.
- Amiruddin AT, 2005 Pengaruh Investasi di Sektor Industri terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Batam, ADLN Digital Collections Master Theses from GDLHUB / 2005-10-31 00:16:32
- Amri Amir 2006 Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran di Indonesia, Fakultas Ekonomi Universitas Jambi
- Awh. R.Y. 1976. Microeconomic: Theory and Applications. Santa Barbara: John Wiley & Sons Inc.
- Bahl, R.W. dan Linn, J. F., 1999. Urban Public Finance in Developing Countries, Oxford University Press, Oxford
- Bahl, Roy W. and F. Linn, Johannes, 1992 Urban Public Finance In Developing Countries, Published for the World Bank, New York Oxford University Press.
- Barzelay, Michael. (1991). Breaking Through Bureaucracy. California: University of California Press.
- Bird, R. M, Ebel, Robert, and Wallich, Christine, 1994, Decentralization of Socialist State: Intergovernmental Finance in Transition Economies, Washington, DC: world Bank
- Boediono 1992, Ekonomi Makro, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No 2 Edisi 4, BPFE Yogyakarta
- Brandt, Loren dan Zhu, Ziadong. "Redistribution in a Decentralized Economy: Growth and Inflation in China Under Reform." The Journal of Political Economy Vol. 108 issue 2, April 2000
- Britany Alasen Sembiring, 2008 Kalimantan Timur Investasi yang Telah Matang Berita Daerah.com Senin, 21 Juli 2008

- Brodjonegoro, Bambang P.S, 2002. "The impact of Fiscal Decentralization Process to The Indonesian Regional Economies: A Simultaneous Econometrics Approach." Vanersborg, Sweden: Udavella Symposium 2001:Regional Economies in Transitions, June 14-16.
- Brown, H James. 1968. Shift and Share Projects of Regional Growth an Empirical Test, *Juornal of Regional Science*. Vol.9.
- Budiharsono, Sugeng. 1989. *Perencanaan Pembangunan Wilayah, Teori Model Perencanaan dan Penerapannya*. Bogor : Penerbit IPB.
- Burhanuddin Abdullah, 2003. *Strategi Kebijakan Moneter dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan*. Bank Indonesia, Jakarta.
- Cooper, Donald R. dan C., William Emory. 1996. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Darwanto dan Yulia Yustikasari, 2007 *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Penglaokasian Anggaran Belanja Modal*, Magister Sains Ilmu-ilmu Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Universitas Gadjah Mada Jogjakarta
- Daslan Simanjuntak, 2006 *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Labuhan Batu*, Universitas Sumatera Utara
- David Harianto dan Priyo Hari Adi 2007, *Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan perkapita*, Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga
- Davoodi and H. Zou 1998 "Fiscal Decentralization and Economic Growth: A Cross Country Study," *Journal of Urban Economics* 43, 244-257.
- Dicken, 1992. Regional growth and structural adaptation: A correction to the Stilwell modification. *Urban Studies* 15:97-100
- Domar, Evsey D. 1957. *Essay in The Theory of Economic Growth*. Oxford University Press. Fairlawn, New Jersey.

- Erna, Gayanti. 2004. Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pasca Krisis di Indonesia Januari 1999-Desember 2003. Tesis. Universitas Sumatera Utara.
- Fane, G., 2003. Change and Continuity in Indonesia's New Fiscal Decentralisation Arrangements, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, XXXIX1:159-76
- Fathurrahman Anwar 2008 Pengaruh Tingkat Bunga SBI Terhadap Dunia Bisnis, Aceh Fulbright Association
- Firman, Tommy. 1985. Perspektif Neo-Klasik, Depedensi dan Humanitarian Dalam Teori-Teori Pembangunan, Keterbelakangan dan Pengembangan Wilayah. Bandung : Penerbit ITB.
- Fitriani, F., Hofman, B., dan Kaiser, K., 2005. Unity in Diversity? The Creation of New Local Governments in a Decentralising Indonesia, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, LXI1: 57-79
- Forrester & R.J. May eds, 1999 *The Fall of Soeharto*. Singapore: Select Books, Ltd.
- Fozzard, Adrian. 2001. The basic budgeting problem: Approaches to resource allocation in the public sector and their implications for pro-poor budgeting. Center for Aid and Public Expenditure, Overseas Development Institute ODI. Working paper 147
- Gaspersz, Vincent dan Esthon Foenay. 2003. Kinerja Pendapatan Ekonomi Rakyat Dan Produktivitas Tenaga Kerja Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ekonomi Rakyat*. Th. II - No. 8 - Nopember 2003
- Giampaolo Arachi 2002 "Fiskal decentralization and the Autonomy of Local Government in Italy" Social science Research Network
- Glasson, J. 1974, "An Introduction to Regional Planning". London: Hutchinson Educational.
- Granger, C.W.J. & Pesaran, H., 1996. "A Decision-Theoretic Approach to Forecast Evaluation," Cambridge Working Papers in Economics 9618, Faculty of Economics, University of Cambridge.

- Groves, 1951, Tax Competition in EU implies EMTR different: some effects on FDI and Economic Growth Rate, *University of Salerno*
- Hadi Sasana, Achma Hendra, 2002. Pengaruh hubungan keuangan pemerintah pusat-daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten. Published in 2003, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro (Semarang).
- Halim, Abdul dan Syukriy Abdullah. 2006. Pengaruh Dana Alokasi Umum DAU dan Pendapatan Asli Daerah PAD Terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. Simposium Nasional Akuntansi VI, 1140-1159
- Halim, Abdul. 2001. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP YKPN.
- Harrod, R.F. 1939 "An Essay in Dynamic Theory", dalam *Economic Journal*. London: Macmillan,
- Hatta 2008 Telaah Singkat Pengendalian Inflasi Dalam Perspektif Kebijakan Moneter Islam, <http://www.jurnal-ekonomi.org/2008/06/16/telaah-singkat-pengendalian-inflasi-dalam-perspektif-kebijakan-moneter-islam>
- Hemming, 1963. *Growth and Poverty in Developing Countries*. World Bank Staff Working Paper. Washington DC.
- Hirschman, Albert, 1968. "The Strategy of Economic Development." Yale University Press, Connecticut.
- Hirschman, Albert, 1968. "The Strategy of Economic Development." Yale University Press, Connecticut
<http://bisnis.vivanews.com/news/read/83769sby> teori trickle down effect telah gagal
<http://blog.keuanganpribadi.com/penurunan-suku-bunga-sbi-percepat-pertumbuhan-ekonomi/>
- Ida Bagus Putu Purbadharmaja, 2003. Implikasi Variabel Pengeluaran dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Bali Buletin Studi Ekonomi Volume 11 Nomor 1 Tahun 2006 Terakreditasi No: 34/DIKTI/Kep/2

- Intermediate Areas: The Hunt Report. HL Deb 25 June 1969 vol 303 cc170-7170. The Lord Privy Seal (Lord Shackleton). under the Chairmanship of Sir. Joseph Hunt. London: H.M. Stationery Office. Cmnd 3798
- Ismal, Rifki. 2002 "Penelitian Tentang Apakah Penerapan Otonomi Daerah Khususnya Alokasi Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah (PKPD) Dan Non-PKPD Selama Tahun 2001 Telah Memberikan Dampak Kepada Pengendalian Moneter ?" Buletin Ekonomi dan Moneter Vol. 5 No. 2, September, 2002
- Jhingan, M L, 2002, Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, RajaGrafindo Perkasa, Jakarta.
- Joko Waluyo 2007 Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Indonesia Parallel Session IA : Fiscal Decentralization 12 Desember 2007, Kampus UI – Depok
- Jones and Laser 1940- 1951 Regional Inequality and the Process of National Development: A Description of the Patterns," *Economic Development and Cultural Change* 13, pp. 3-45
- Junaidi , *Investasi di Indonesia: Perkembangan dan Volatilitas* . Senin, 27 April 2009
- Kaho. Josef Riwu, 1997. *Prospek Otonomi Daerah di Segara RI*. PT. Raja GraffmdoPersada. Jakarta
- Kaldor, N. 1936-1937, Limitational factors and the elasticity of substitution, *Review of Economic Studies*, 4, pp. 162-165.
- Kanokpan Lao-Araya, '2002 *"Effect of Decentralization Strategy on Macroeconomic Stability in Thailand"* Asian Development Bank Manila Philippines.
- Keynes, John M, 1936. *The General Theory of Employment, Interest and Money*. Harcourt: Brace and World,
- Kuncoro, M., 2003. "Otonomi Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang". Jakarta: Penerbit Erlangga

- Kuncoro, Mudrajad, 2003. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. Edisi Ketiga, UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajad, 2004. *Ekonomi Pembangunan II*, Universitas Terbuka, Jakarta, .
- Kusnendi. 2005. *Konsep dan Aplikasi Model Persamaan Struktur (SEM) dengan Proses Lisrel 8* Yogyakarta : Penerbit Kanisius
- Kuznets, 1966. S. *Modern Economic Growth*, New Haven, Yale University Press
- L. Jay Helms, 1985. "The Effect of State and Local Taxes on Economic Growth: A Time Series-Cross Section Approach," *The Review of Economics and Statistics* 67:4 (November 1985), 574-582
- Lucas, R.E. 1979. *On the Mechanics of Economic Development*. *Journal of Monetary Economics*, 22(1):3-42.
- M. Govinda Rao. 2000. *Fiscal Desentralization in China and India: A Comparative Prespective*. *Asia-Pacific Development Journal*, Vol. 10, No. 1, June 2003.
- Ma, J., 1996. *Intergovernmental Fiscal Transfer: a comparison of nine countries United States, Canada, United Kingdom, Australia, Germany, Japan, Korea, India and Indonesia*, Discussion paper for the World Bank, Washington DC
- Machmud, Amir. 1996. *Analisis Pertumbuhan Dan Ketimpangan Daerah Tk I di Indonesia Pada Periode 1979-1993*. Tesis. Bandung : PPS-Universitas Padjadjaran
- Mahi, Raksaka, 2001. "Problem on the Design and Implementation of Fiscal Decentralization Policy." Makalah pada th 3rd IRSA International Conference, Jakarta, March.
- Mangkoesoebroto, G. 1997. *Ekonomi Publik*. BPFE Yogyakarta.
- Mardiasmo & Akhmad mukhlifatih, 2000. *Perhitungan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Magelang*. (Laporan Akhir). PAU-SE UGM, Yogyakarta.

- Mardiasmo, 1995. Perpajakan (edisi ketiga). Yogyakarta: ANDI OFFSET.
- Mardiasmo, 2002. Akuntansi keuangan Sektor Publik. Andi Yogyakarta
- Martinez-Vazquez Jorge, McNab Robert M., 2001, Fiscal Decentralization and Economic Growth, Georgia State University
- Maruyama, G.M., 1998. Basic of Structural Equation Modeling, Thousand Oaks California: Sage Publishing Inc.
- Michael Barzelay, 1991 .Research on Public Management Policy Change in the Latin American Region: Conceptual Framework, Methodological Guide, and Exemplars, Prepared for the Inter-American Development Bank.
- Miller WE, Stokes DE. 1975 Publications of the American Sociological Society, XIV: 140.
- Miller, S.M. dan Russek, F.S. 1997. "Co-Integration and Error Correction Models: The Temporal Causality between Government Taxes and Spending." Southern Economic Journal. June: 221-229.
- Muhammad Arif Yusuf, 2008. Analisis Pengaruh Investasi, Inflasi, Pengeluaran Pemerintah, Penawaran Uang dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1981-2006, Fakultas Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Musgrave, Richard A. & Peggy B. Musgrave. 1989. Keuangan Negara Dalam Teori Dan Praktek. Edisi Kelima. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Nanga, Muana. 2005. Analisis Posisi Fiskal Kabupaten/Kota di NTT : Adakah Posisi Fiskal Lebih Baik. Jurnal Studi Pembangunan KRITIS. Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga
- Nurdjaman, Arsjad, Bambang Kusumanto, dan Yuwono Prawirosetoto, 1992. Keuangan Negara, Jakarta: Intermedia
- Nurkse, Ragnar, 1953. Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries. Oxford: Oxford University Press
- Oates, W. E. 1972. Fiscal Federalism, Harcourt Brace Jovanovich, New York

- Oates, W. E., 1993. Fiscal Decentra-lization and Economic Development, *National Tax Journal*, LXVI2:237-43.
- Paul Samuelson dan William D. Nordhaus, 1996, *Ekonomi*. Jakarta: Erlangga,
- Perloff, H. S., Dunn, E. S., Lampard, E. E., and Muth, R. F. *Regions, Resources and Economic Growth*. Lincoln, Nebraska: University of Nebraska Press, 1960
- Prawirosetoto, Yuwonono, 2002. "Desentralisasi Fiskal di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 2 Agustus, Jakarta : Unika Atmajaya
- Radianto Elia, 1997, Otonomi Keuangan Daerah Tingkat II Suatu Studi di Maluku, *Prisma*, nomor 3, 1997, hal. . 39 – 50.
- Rawski Thomas G., 2002, Will investment behavior constrain China's growth, Department of Economics, University of Pittsburgh, Pittsburgh, USA
- Reksohadiprodjo, Sukanto 1999, *Dasar-Dasar Manajemen*, Yogyakarta: BPFE.
- Ricardo, D. 1881. original 1817 *Principles of Political Economy and Taxation*. Dover Publications
- Riduwan dan Engkos Achmad Kuncoro. 2007. *Cara Menggunakan dan Memaknai Analisis Jalur Path Analysis*. Bandung: CV Alfabeta
- Rofikoh Rokhim, 2007. *Investasi bagi pertumbuhan berkelanjutan*. *Ekonomi Bisnis Indonesia*, <http://www.madani-ri.com/2007/12/17/investasi-bagi-pertumbuhan-berkelanjutan/>
- Rosenstein-Rodan, Paul. 1943-1957. "Problems of Industrialization of Eastern and South eastern Europe." *Economic Journal* 53(210-211) June-September: 202-211
- Sadono Sukirno, 1985. *Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan* Jakarta : Rajawali Press
- Sadono Sukirno, 1994. *Pengantar Teori Makroekonomi*. Jakarta. LPFEUI
- Sadono Sukirno, 1996. *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*. Jakarta : Rajawali Press

- Sadono Sukirno, 2005. Makroekonomi Teori pengantar. PT. RajaGrafindo. Jakarta.
- Samuelson, P.A dan W. Nordhaus, 1993. Ilmu Makro Ekonomi, Edisi 17 Alih bahasa Gretta. Jakarta : PT. Media Global Edukasi.
- Samuelson, Paul A. 1996. Pengantar Ekonomi Mikro. Jakarta: Erlangga
- Saragih, Juli Panglima. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Ghalia Indonesia
- Sarundajang, S.H. 1999. Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Schumacher, R.E., Lomax, R.G. 1996, A Beginner's Guide to Structural Equation Modeling, Lawrence Erlbaum Associates
- Schumpeter, Joseph 1911 "Change and the Entrepreneur" in Essays of J.A. Schumpeter. Ed. Richard V. Clemence Reading. Mass: Addison Wesley
- Sedyadi Endang 2007 Mengurangi Resiko Rugi Berinvestasi percepat Pertumbuhan Ekonomi,
- Sidik, Machfud, 2002. Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah. Wisuda Angkatan XXI STIA LAN Tahun Akademik 2001-2002. Orasi Ilmiah
- Silver, C., Aziz, I.J., dan Schoeder, L., 2001. Intergovernmental Transfer and Decentralisation in Indonesia, Bulletin of Indonesian Economic Studies, XXXVII (3):345-62
- Simanjuntak, Robert, 2001. Decentralization and Local Autonomy. www.worldbank.org/wbi/publicfinance/document/ASEM/brodjonegoro.pdf.
- Smith, Adam, 1776, The Wealth of Nations, The University of Chicago Press, Chicago.
- Soepono, Prasetyo. 1993. Analisis Shift-share : Perkembangan dan Penerapan. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, volume 8 nomor 1. Yogyakarta. Fakultas Ekonomi UGM

- Stilwell FJB (1969) Regional growth and structural adaptations. *Urban Studies* 6:162-178.
- Stine, William F. 1994. Is Local Government Revenue Response to Federal Aid Symmetrical? Evidence From Pennsylvania County Government in an era of Retrenchment. *National Tax Journal* 47.No. 4. Hal : 799-816.
- Sucahyo, Indra Budi, 2008. Analisis Hubungan Suku Bunga SBI, Pertumbuhan Ekonomi, dan Finansial Deepenn, digilib.uns.ac
- Sugiyono, 2002, Cetakan kedua, Statistika Untuk Penelitian dan aplikasinya dengan SPSS10,0 For Windows, Bandung, Alfabeta
- Sunny Naury, 2005. Analisis Uang Beredar, Suku Bunga dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 1997-2002, digilib.uns.ac.
- Suparmoko, 2002. *Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: BPFE. Edisi Keenam
- Suparmoko, 2003. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan & Pembangunan Daerah*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Susanto Heri, Nur Farida Ahniar, Agus Dwi Darmawan 2009 : "SBY: Teori Trickle Down Effect Telah Gagal".
- Syafrizal, 2008. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Cetakan Pertama. Penerbit Baduose, Padang
- Tadjoeddin, Zulfan M., Suharyo, W.I., dan Mishra, S., 2001. Regional Disparity and Vertical Conflict in Indonesia, UNDP/UNSFIR United National Special Facility for Indonesian Recovery, Mimeo, Jakarta
- Tinbergen, J. 1942, Professor Douglas' production function, *Revue del'Institut International de Statistique*, 10, p. 37-48.
- Todaro, M.P. 1998. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Terjemahan, Erlangga, Jakarta
- Todaro, M.P., dan Stephen C. Smith. 2003, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Jilid I, Edisi Kedelapan. Jakarta : Erlangga.
- Todaro, Michael, P., 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Alih Bahasa Indonesia: Burhanudin Abdullah dan Harris Munandar.

- Toni Eko Suchahyo , 2003. Pengaruh PMDN, PMA, tenaga kerja dan ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi (menggunakan indikator PDRB) di Propinsi Jawa Tengah (1986.I-2002.IV), digilib.uns.ac.
- Wong, John D. 2004. The Fiscal Impact of Economic Growth and Development on Local Government Capacity. *Journal of Public Budgeting., Accounting and Financial Management.* Fall. 16.3. Hal : 413 – 423
- Zhang, T. dan Zou, H., 1998. Fiscal Decentralization, Public Spending, and Economic Growth in China, *Journal of Public Economics*, LXVII:221-40.

LAMPIRAN

A. Pengujian Kesesuaian Model

Pengujian *model fit* yang pada dasarnya untuk menguji seberapa baik model memiliki kesesuaian dengan data hasil pengukuran, di dalam penelitian ini sebenarnya kurang relevan, dikarenakan model yang dipergunakan adalah model yang telah ditetapkan dan peneliti memutuskan untuk tidak akan melakukan modifikasi model sesuai anjuran *software* (LISREL 8.7). Pilihan ini sering dilakukan oleh para peneliti sebelumnya (Gozali, 2005). Namun pengujian model akan dicoba dengan model *trimming path analysis*.

Pengujian kesesuaian model dilakukan dengan mencari nilai Q dan W sebagaimana dijelaskan pada Bab IV Sebelumnya. Dari hasil keluaran analisis statistik *Path Analysis*, diperoleh nilai Q dan M sebagaimana perhitungan berikut:

$$R_m^2 = 1 - (1 - 0.89^2)(1 - 0.91^2)(1 - 0.80^2) = 0.987134$$

$$M = 1 - (1 - 0.93^2) = 0.8649$$

$$Q = \frac{1 - R_m^2}{1 - M^2} = \frac{1 - 0.987134}{1 - 0.8649} = \frac{0.012866}{0.1351} = 0.095231$$

Dikarenakan nilai $\hat{Q} < 1$, maka perhitungan harus dicari nilai W yang dapat dihitung sebagai berikut:

$$W = -(N - dk) \ln(Q) = -(89 - 5) \ln(0.095231) = 197.522$$

Nilai W bila dibandingkan dengan nilai χ^2 dari tabel dengan signifikansi 0.05 dan $dk = 5$ sesuai perolehan analisis statistik diagram jalur, maka diperoleh nilai χ^2 sebesar 3.841. dan ternyata nilai $W > \chi^2$.

$$W \geq \chi^2 \quad 197.522 \geq 3.841$$

Dengan demikian berarti model dinyatakan layak sebagai pengestimasi variabel-variabel di dalam model atau model dinyatakan *fit*.

Goodness of fit Indeks juga dapat di lihat dari perbandingan antara *Independence Akaike's Information Criterion (Independence AIC)* dengan *Model AIC* serta *Saturated AIC*, bila *Model AIC* atau model yang kita buat untuk penelitian lebih mendekati ke arah *Saturated AIC* dibandingkan ke arah *Independence AIC*, maka model mendekati sempurna (*saturated*), hal ini berarti model *fit*.

Hasil perhitungan *Goodness of Fit Statistics* dari diperoleh nilai sebagai berikut:

Independence AIC = 1603.21	Model AIC = 110.54	Saturated AIC = 56.00
Independence CAIC = 1627.63	Model CAIC = 187.29	Saturated CAIC = 153.68

Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa *model AIC* = 110.54 lebih kecil daripada *independence AIC* = 1603.21 dan angka tersebut jauh dari *independence AIC*, namun angka *model AIC* sangat dekat dengan *saturated AIC*. Demikian pula halnya dengan *model CAIC* = 187.29 sedangkan *independence CAIC* = 1627.63, angka antara *model CAIC* dengan *independence CAIC* sangat jauh dibandingkan kedekatan nilai *model CAIC* dengan *saturated CAIC* = 153.68. Kedua indikator tersebut baik *AIC* maupun *CAIC* semuanya mendekati nilai *saturated*, hal ini berarti ***model fit***.

Goodness of fit Indeks juga dapat di lihat dari *Expected Cross Validation Index* (ECVI). perbandingan antara *Independence Expected Cross Validation Index* (*Independence ECVI*) dengan *Model ECVI* serta *Saturated ECVI*, bila Model AIC atau model yang kita buat untuk penelitian lebih mendekati ke arah *Saturated ECVI* dibandingkan ke arah *Independence ECVI*, maka model mendekati sempurna (*saturated*), hal ini berarti model fit.

Hasil perhitungan *Goodness of Fit Statistics* dari diperoleh nilai sebagai berikut:

Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 1.30

ECVI for *Saturated Model* = 0.66

ECVI for *Independence Model* = 18.86

Dari keluaran hasil perhitungan statistik di atas menunjukkan bahwa nilai ECVI = 1.30 lebih mendekati ke arah nilai *saturated model* (0.66), dan jauh dari *Independence model* (18.86). Hal ini berarti model yang dibentuk dalam penelitian ini adalah *model fit*. Pengukuran *model fit* lainnya seperti *Normed Fit Index* (NFI), *Non-Normed Fit Index* (NNFI), *Comparative Fit Index* (CFI), *Incremental Fit Index* (IFI), dan *Relative Fit Index* (RFI) menunjukkan nilai sebagai berikut:

Normed Fit Index (NFI) = 0.95 (*Good fit*)

Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.84 (*Marginal Fit*)

Comparative Fit Index (CFI) = 0.96 (*Good Fit*)

Incremental Fit Index (IFI) = 0.96 (*Good Fit*)

Relative Fit Index (RFI) = 0.83 (*Marginal Fit*)

Dengan seluruh pengukuran yang telah diungkapkan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa model yang dibentuk adalah *model fit*.

B. Pengujian Validitas dan Reliabilitas

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur seberapa handal dan konsisten variabel-variabel pengukuran tersebut dapat dipergunakan sebagai sebuah konstruk penelitian. Dalam penelitian ini reliabilitas diukur menggunakan Ukuran Cronbach Alpha dengan cara *one shot* atau sekali saja. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0.60 (Nunnaly, 1967 dalam Gozali, 2005)

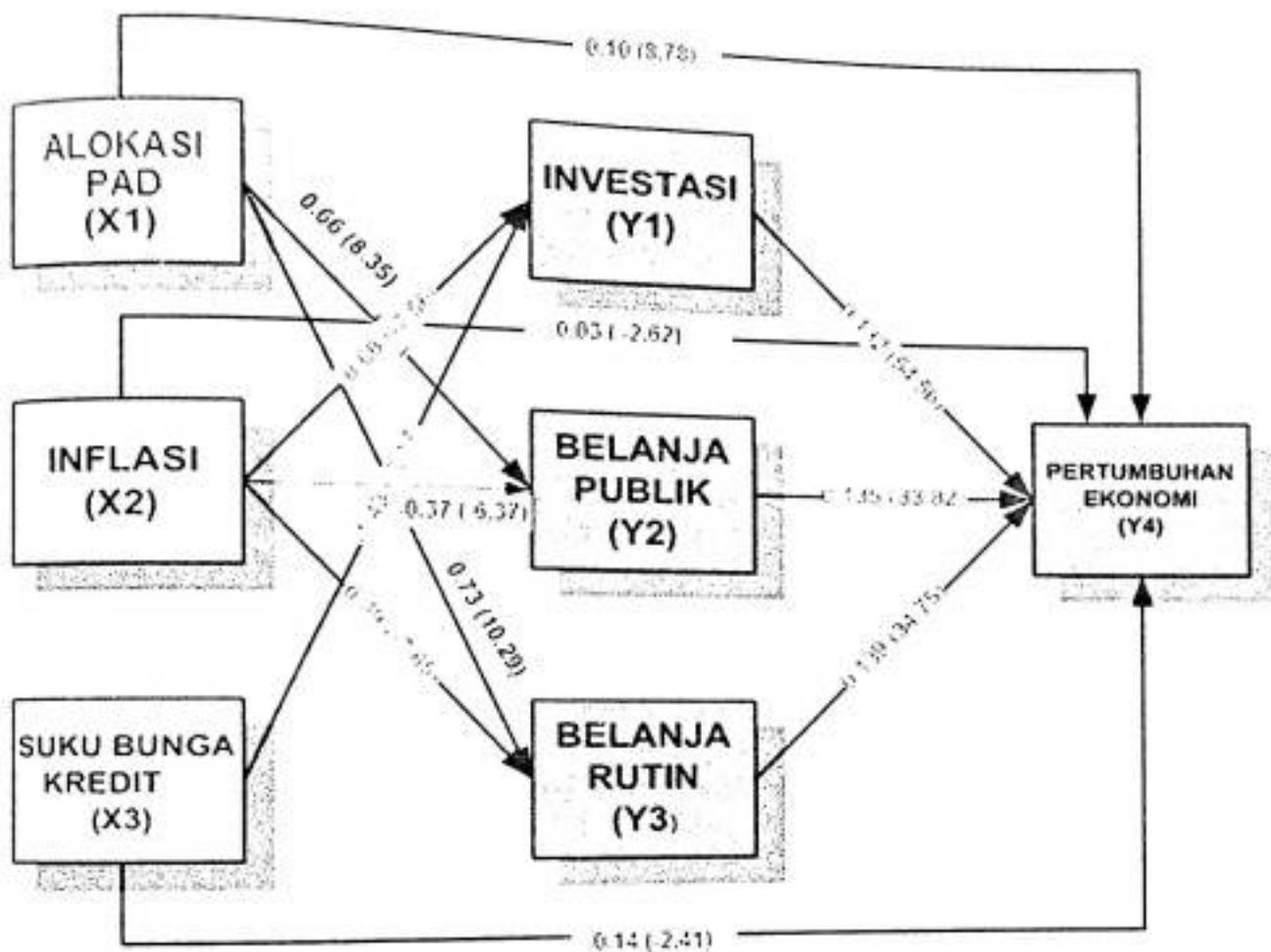
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu konstruk penelitian, di dalam penelitian ini digunakan pengujian dengan *Corrected Item-Total Correlation (r)* yang dibandingkan dengan *r* tabel, hal ini dengan pertimbangan bahwa model yang dibangun di dalam penelitian ini tidak mempertimbangkan *modification indices* dari *software*, sehingga validitas diukur dengan *Corrected Item-Total Correlation (r)* dan *Cronbach Alpha*. Hasil hitung *Pearson Correlation* dan *Cronbach Alpha* dari data variabel-variabel penelitian ini adalah sebagai mana tabel 4.2 di bawah ini.

Tabel 4.2 Hasil Perhitungan Nilai r dan Cronbach's Alpha

	Corrected Item-Total Correlation (r)	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
PAD	.975	.981	.726
SUKUBUNG	-.623	.511	.919
INFLASI	.947	.926	.832
B.PUB	.962	.973	.722
B.RUTIN	.975	.974	.719
INVEST	.867	.826	.749
GROWTH	.972	.966	.826

Melihat hasil perhitungan reliabilitas pada Tabel 4.5 tersebut, maka dapat dikatakan bahwa seluruh variabel penelitian ini memiliki *Cronbach's Alpha* yang nilainya di atas 0.60. Hal ini berarti seluruh variabel tersebut reliable sebagai variabel pengukuran.

Sedangkan validitas Pengukuran dapat dilakukan dengan membandingkan r hitung dengan r tabel untuk *degree of freedom* (df) = n-2, dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Pada kasus ini df pengukuran konstruk n-2 adalah sebesar 89-2=87. Dan alpha = 0.05 di dapat r tabel sebesar 0.2084. Jadi dengan melihat r hitung semuanya melebihi r tabel dua sisi (+/-), maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel penelitian tersebut valid untuk dijadikan konstruk dalam pengukuran.



DATE: 12/16/2009
TIME: 11:27

L I S R E L 8.70

BY

Karl G. Jöreskog & Dag Sorbom

This program is published exclusively by
Scientific Software International, Inc.
7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100
Lincolnwood, IL 60712, U.S.A.
Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140
Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-2004
Use of this program is subject to the terms specified in the
Universal Copyright Convention.
Website: www.ssicentral.com

The following lines were read from file C:\Program Files\lisrel870\DATA
JIUHARDI\MODGROW27LAST.Spl:

MODEL DISERTASI SATISFACTION AND BEHAVIORAL INTENTIONS
Observed variable PAD INFLASI SUKUBUNG INVEST B_PUBLIK B_RUTIN GROWTH
Covariance Matrix from file MODGROW27.COV
Sample size 89
Equations
INVEST = INFLASI SUKUBUNG
B_PUBLIK = INFLASI PAD
B_RUTIN = INFLASI PAD
GROWTH = PAD INFLASI SUKUBUNG INVEST B_PUBLIK B_RUTIN
Options: SC EF RS
Path diagram
End of problem

Sample Size = 89

MODEL DISERTASI SATISFACTION AND BEHAVIORAL INTENTIONS

Covariance Matrix

	INVEST	B_PUBLIK	B_RUTIN	GROWTH	PAD	INFLASI
INVEST	47.31					
B_PUBLIK	43.59	44.95				
B_RUTIN	47.43	46.27	51.41			
GROWTH	6.10	6.00	6.60	0.93		
PAD	35.47	35.44	38.46	5.16	31.89	
INFLASI	-50.48	-48.20	-52.22	-6.87	-38.96	60.95
SUKUBUNG	-8.28	-8.03	-8.71	-1.18	-6.68	9.53

Covariance Matrix

	SUKUBUNG
SUKUBUNG	1.76

MODEL DISERTASI SATISFACTION AND BEHAVIORAL INTENTIONS

Number of Iterations = 0

LISREL Estimates (Maximum Likelihood)

Structural Equations

$$\begin{aligned} \text{INVEST} &= -0.60 \cdot \text{INFLASI} - 1.48 \cdot \text{SUKUBUNG}, \text{Errorvar.} = 4.92, R^2 = 0.90 \\ &\quad (0.079) \quad (0.47) \\ &\quad -7.56 \quad -3.17 \quad (0.75) \\ &\quad \quad \quad \quad \quad \quad 6.52 \\ \text{B_PUBLIK} &= 0.66 \cdot \text{PAD} - 0.37 \cdot \text{INFLASI}, \text{Errorvar.} = 3.76, R^2 = 0.92 \\ &\quad (0.080) \quad (0.058) \\ &\quad 8.35 \quad -6.37 \quad (0.58) \\ &\quad \quad \quad \quad \quad \quad 6.52 \\ \text{B_RUTIN} &= 0.73 \cdot \text{PAD} - 0.39 \cdot \text{INFLASI}, \text{Errorvar.} = 2.97, R^2 = 0.94 \\ &\quad (0.071) \quad (0.051) \\ &\quad 10.29 \quad -7.65 \quad (0.46) \\ &\quad \quad \quad \quad \quad \quad 6.52 \end{aligned}$$

Reduced Form Equations

$$\begin{aligned} \text{INVEST} &= 0.0 \cdot \text{PAD} - 0.60 \cdot \text{INFLASI} - 1.48 \cdot \text{SUKUBUNG}, \text{Errorvar.} = 4.92, R^2 = 0.90 \\ &\quad (0.079) \quad (0.47) \\ &\quad -7.56 \quad -3.17 \\ \text{B_PUBLIK} &= 0.66 \cdot \text{PAD} - 0.37 \cdot \text{INFLASI} + 0.0 \cdot \text{SUKUBUNG}, \text{Errorvar.} = 3.76, R^2 = 0.92 \\ &\quad (0.080) \quad (0.058) \\ &\quad 8.35 \quad -6.37 \\ \text{B_RUTIN} &= 0.73 \cdot \text{PAD} - 0.39 \cdot \text{INFLASI} + 0.0 \cdot \text{SUKUBUNG}, \text{Errorvar.} = 2.97, R^2 = 0.94 \\ &\quad (0.071) \quad (0.051) \\ &\quad 10.29 \quad -7.65 \\ \text{GROWTH} &= 0.10 \cdot \text{PAD} - 0.025 \cdot \text{INFLASI} - 0.14 \cdot \text{SUKUBUNG}, \text{Errorvar.} = 0.069, R^2 = 0.93 \\ &\quad (0.012) \quad (0.0097) \quad (0.057) \\ &\quad 8.78 \quad -2.62 \quad -2.41 \end{aligned}$$

Covariance Matrix of Independent Variables

	PAD	INFLASI	SUKUBUNG
PAD	31.89 (4.89) 6.52		
INFLASI	-38.96 (6.38) -6.10	60.95 (9.35) 6.52	
SUKUBUNG	-6.68 (1.09) -6.14	9.53 (1.53) 6.25	1.76 (0.27) 6.52

Covariance Matrix of Latent Variables

	INVEST	B_PUBLIK	B_RUTIN	GROWTH	PAD	INFLASI
INVEST	47.31					
B_PUBLIK	40.50	44.95				
B_RUTIN	43.88	44.67	51.41			
GROWTH	5.77	5.94	6.64	0.94		
PAD	33.14	35.44	38.46	5.19	31.89	
INFLASI	-50.48	-48.20	-52.22	-6.87	-38.96	60.95
SUKUBUNG	-8.28	-7.93	-8.59	-1.17	-6.68	9.53

Covariance Matrix of Latent Variables

	SUKUBUNG
SUKUBUNG	1.76

Goodness of Fit Statistics

Degrees of Freedom = 6
 Minimum Fit Function Chi-Square = 75.61 (P = 0.00)
 Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 66.54 (P = 0.00)
 Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 60.54
 90 Percent Confidence Interval for NCP = (37.94 ; 90.59)

Minimum Fit Function Value = 0.86
 Population Discrepancy Function Value (FD) = 0.71
 90 Percent Confidence Interval for FD = (0.45 ; 1.07)
 Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.34
 90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.27 ; 0.42)
 P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.00

Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 1.30
 90 Percent Confidence Interval for ECVI = (1.03 ; 1.65)
 ECVI for Saturated Model = 0.66
 ECVI for Independence Model = 18.86

Chi-Square for Independence Model with 21 Degrees of Freedom = 1589.21

Independence AIC = 1603.21
 Model AIC = 110.54
 Saturated AIC = 56.00
 Independence CAIC = 1627.63
 Model CAIC = 187.29
 Saturated CAIC = 153.68

Normed Fit Index (NFI) = 0.95
 Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.84
 Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.27
 Comparative Fit Index (CFI) = 0.96
 Incremental Fit Index (IFI) = 0.96
 Relative Fit Index (RFI) = 0.83

Critical N (CN) = 20.57

Root Mean Square Residual (RMR) = 1.04
 Standardized RMR = 0.025
 Goodness of Fit Index (GFI) = 0.82
 Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.17
 Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.18

MODEL DISERTASI SATISFACTION AND BEHAVIORAL INTENTIONS

Fitted Covariance Matrix

	INVEST	B_PUBLIK	B_RUTIN	GROWTH	PAD	INFLASI
INVEST	47.31					
B_PUBLIK	40.50	44.95				
B_RUTIN	43.88	44.67	51.41			
GROWTH	5.77	5.94	6.64	0.94		
PAD	33.14	35.44	38.46	5.19	31.89	60.95
INFLASI	-50.48	-48.20	-52.22	-6.87	-38.96	9.53
SUKUBUNG	-8.28	-7.93	-8.59	-1.17	-6.68	

Fitted Covariance Matrix

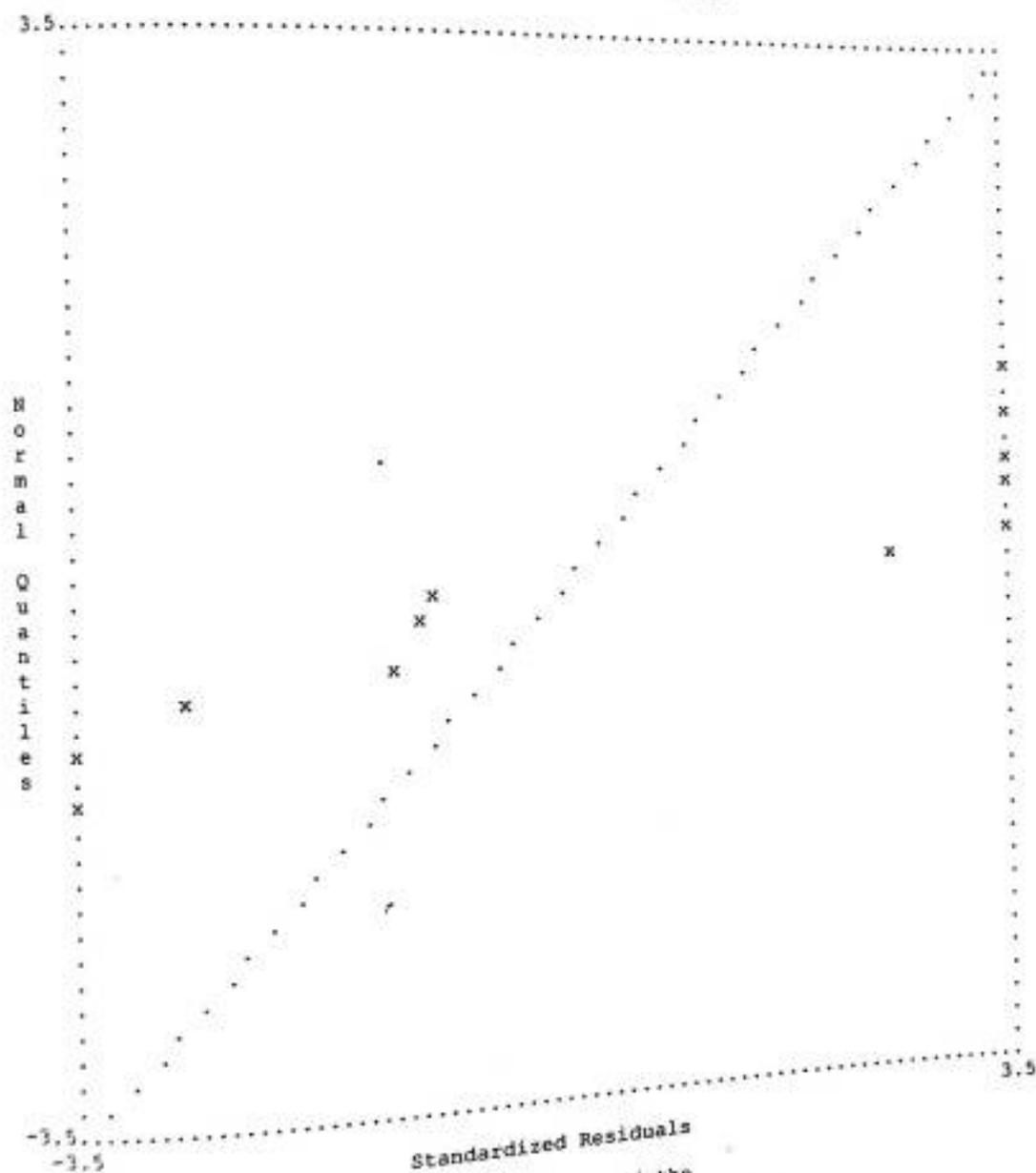
	SUKUBUNG
SUKUBUNG	1.76

4114
51029

Largest Negative Standardized Residuals
 Residual for GROWTH and B_RUTIN -2.74
 Residual for GROWTH and GROWTH -3.78
 Residual for PAD and GROWTH -4.07
 Largest Positive Standardized Residuals
 Residual for B_PUBLIK and INVEST 5.00
 Residual for B_RUTIN and INVEST 5.89
 Residual for B_RUTIN and B_PUBLIK 4.43
 Residual for GROWTH and INVEST 5.21
 Residual for PAD and INVEST 4.07

MODEL DISERTASI SATISFACTION AND BEHAVIORAL INTENTIONS

Qplot of Standardized Residuals



The Modification Indices Suggest to Add the

Path to	from	Decrease in Chi-Square	New Estimate
INVEST	B_PUBLIK	24.0	0.47
INVEST	B_RUTIN	33.0	0.57
INVEST	GROWTH	26.2	4.66
B_PUBLIK	INVEST	10.0	0.29
B_PUBLIK	B_RUTIN	19.6	0.54

B_PUBLIK	GROWTH	11.7	
B_RUTIN	INVEST	18.1	6.04
B_RUTIN	B_PUBLIK	19.6	0.34
INVEST	PAD	16.6	0.43
			0.41

The Modification Indices Suggest to Add an Error Covariance Between and Decrease in Chi-Square

		Decrease in Chi-Square	New Estimate
B_PUBLIK	INVEST	9.0	1.40
B_RUTIN	INVEST	16.4	1.68
B_RUTIN	B_PUBLIK	19.6	1.61
B_PUBLIK	INVEST	9.0	1.40
B_RUTIN	INVEST	16.4	1.68
B_RUTIN	B_PUBLIK	19.6	1.61
PAD	B_PUBLIK	20.0	-2.04
PAD	B_RUTIN	20.4	-2.17
PAD	PAD	21.0	2.83
INFLASI	INVEST	38.5	4.67
INFLASI	B_PUBLIK	24.1	2.49
INFLASI	B_RUTIN	31.2	2.64
INFLASI	PAD	17.8	-1.53
INFLASI	INFLASI	51.3	6.70
SUKUBUNG	INVEST	16.6	1.05
SUKUBUNG	SUKUBUNG	16.6	0.71

MODEL DISERTASI SATISFACTION AND BEHAVIORAL INTENTIONS

Standardized Solution

BETA

	INVEST	B_PUBLIK	B_RUTIN	GROWTH
INVEST	---	---	---	---
B_PUBLIK	---	---	---	---
B_RUTIN	---	---	---	---
GROWTH	-0.09	-0.05	0.41	---

GAMMA

	PAD	INFLASI	SUKUBUNG
INVEST	---	---	---
B_PUBLIK	0.56	-0.43	---
B_RUTIN	0.57	-0.43	---
GROWTH	0.39	-0.11	-0.21

Correlation Matrix of Y and X

	INVEST	B_PUBLIK	B_RUTIN	GROWTH	PAD	INFLASI
INVEST	1.00					
B_PUBLIK	0.88	1.00				
B_RUTIN	0.89	0.93	1.00			
GROWTH	0.87	0.91	0.95	1.00		
PAD	0.85	0.94	0.95	0.95	1.00	
INFLASI	-0.94	-0.92	-0.93	-0.91	-0.88	1.00
SUKUBUNG	-0.91	-0.89	-0.90	-0.91	-0.89	0.92

Correlation Matrix of Y and X

	SUKUBUNG
SUKUBUNG	1.00

PSI

Note: This matrix is diagonal.

	INVEST	B_PUBLIK	B_RUTIN	GROWTH
	---	---	---	---
	0.10	0.08	0.06	0.06

Regression Matrix Y on X (Standardized)

	PAD	INFLASI	SUKUBUNG
INVEST	- -	-0.68	-0.28
B_PUBLIK	0.56	-0.43	- -
B_RUTIN	0.57	-0.43	- -
GROWTH	0.60	-0.21	-0.19

MODEL DISERTASI SATISFACTION AND BEHAVIORAL INTENTIONS

Total and Indirect Effects

Total Effects of X on Y

	PAD	INFLASI	SUKUBUNG
INVEST	- -	-0.60 (0.08) -7.56	-1.48 (0.47) -3.17
B_PUBLIK	0.66 (0.08) 8.35	-0.37 (0.06) -6.37	- -
B_RUTIN	0.73 (0.07) 10.29	-0.39 (0.05) -7.65	- -
GROWTH	0.10 (0.01) 8.78	-0.03 (0.01) -2.62	-0.14 (0.06) -2.41

Indirect Effects of X on Y

	PAD	INFLASI	SUKUBUNG
INVEST	- -	- -	- -
B_PUBLIK	- -	- -	- -
B_RUTIN	- -	- -	- -
GROWTH	0.04 (0.01) 2.44	-0.01 (0.01) -1.07	0.02 (0.02) 1.03

Total Effects of Y' on Y

	INVEST	B_PUBLIK	B_RUTIN	GROWTH
INVEST	- -	- -	- -	- -
B_PUBLIK	- -	- -	- -	- -
B_RUTIN	- -	- -	- -	- -
GROWTH	-0.01 (0.01) -1.09	-0.01 (0.01) -0.51	0.06 (0.02) 3.67	- -

Largest Eigenvalue of B^*B' (Stability Index) is 0.003

MODEL DISERTASI SATISFACTION AND BEHAVIORAL INTENTIONS

Standardized Total and Indirect Effects

Standardized Total Effects of X on Y

	PAD	INFLASI	SUKUBUNG
	-----	-----	-----
INVEST	--	-0.68	-0.28
B_PUBLIK	0.56	-0.43	--
B_RUTIN	0.57	-0.43	--
GROWTH	0.60	-0.21	-0.19

Standardized Indirect Effects of X on Y

	PAD	INFLASI	SUKUBUNG
	-----	-----	-----
INVEST	--	--	--
B_PUBLIK	--	--	--
B_RUTIN	--	--	--
GROWTH	0.21	-0.09	0.03

Standardized Total Effects of Y on Y

	INVEST	B_PUBLIK	B_RUTIN	GROWTH
	-----	-----	-----	-----
INVEST	--	--	--	--
B_PUBLIK	--	--	--	--
B_RUTIN	--	--	--	--
GROWTH	-0.09	-0.05	0.41	--

Time used: 0.063 Seconds

```

GET
  FILE='C:\Program Files\lisrel870\DATA JIUHARDI\MODGROW23LAST.sav',
DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT.
SAVE
  OUTFILE='C:\Program Files\lisrel870\DATA
JIUHARDI\MODGROW27.sav'
/COMPRESSED.
REGRESSION
/MISSING LISTWISE
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
/NOORIGIN
/DEPENDENT GROWTH
/METHOD=ENTER INVEST .

```

Regression

[DataSet1] C:\Program Files\lisrel870\DATA JIUHARDI\MODGROW27.sav

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	INVEST ^b	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: GROWTH

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.984 ^a	.969	.968	.17148

a. Predictors: (Constant), INVEST

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	87.529	1	87.529	2976.816	.000 ^a
	Residual	2.823	96	.029		
	Total	90.352	97			

a. Predictors: (Constant), INVEST

b. Dependent Variable: GROWTH

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.386	.058		-6.623	.000
	B_PUBLIK	.135	.004	.960	33.818	.000

a. Dependent Variable: GROWTH

REGRESSION

```

/MISSING LISTWISE
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
/NOORIGIN
/DEPENDENT GROWTH
/METHOD=ENTER B_RUTIN .

```

Regression

[DataSet1] C:\Program Files\lisrel870\DATA JIUHARDI\MODGROW27.sav

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	B_RUTIN ^b	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: GROWTH

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.962 ^a	.926	.926	.26330

a. Predictors: (Constant), B_RUTIN

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	83.697	1	83.697	1207.258	.000 ^a
	Residual	6.655	96	.069		
	Total	90.352	97			

a. Predictors: (Constant), B_RUTIN

b. Dependent Variable: GROWTH

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.325	.055		-5.876	.000
	B_RUTIN	.139	.004	.962	34.746	.000

a. Dependent Variable: GROWTH

```
REGRESSION
/MISSING LISTWISE
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
/NOORIGIN
/DEPENDENT GROWTH
/METHOD=ENTER PAD .
```

Regression

[DataSet1] C:\Program Files\lisrel870\DATA JIUHARDI\MODGROW27.sav

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	PAD ^a	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: GROWTH

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.981 ^a	.962	.962	.18912

a. Predictors: (Constant), PAD

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	86.918	1	86.918	2430.065	.000 ^a
	Residual	3.434	96	.036		
	Total	90.352	97			

a. Predictors: (Constant), PAD

b. Dependent Variable: GROWTH

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.159	.036		-4.379	.000
	PAD	.168	.003	.981	49.296	.000

a. Dependent Variable: GROWTH

```
REGRESSION
/MISSING LISTWISE
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
/NOORIGIN
/DEPENDENT GROWTH
/METHOD=ENTER SUKUBUNG .
```

Regression

[DataSet1] C:\Program Files\lisrel870\DATA JIUHARDI\MODGROW27.sav

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	SUKUBUN G	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: GROWTH

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.590 ^a	.348	.341	.78330

a. Predictors: (Constant), SUKUBUNG

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	31.450	1	31.450	51.257	.000 ^a
	Residual	58.902	96	.614		
	Total	90.352	97			

a. Predictors: (Constant), SUKUBUNG

b. Dependent Variable: GROWTH

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.027	.122		16.560	.000
	SUKUBUNG	-.073	.010	-.590	-7.159	.000

a. Dependent Variable: GROWTH

REGRESSION

```

/MISSING LISTWISE
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
/NOORIGIN
/DEPENDENT GROWTH
/METHOD=ENTER INFLASI .

```

Regression

[DataSet1] C:\Program Files\lisrel870\DATA JIUHARDI\MODGROW27.sav

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	INFLASI	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: GROWTH

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.928 ^a	.861	.859	.36214

a. Predictors: (Constant), INFLASI

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	77.762	1	77.762	592.943	.000 ^a
	Residual	12.590	96	.131		
	Total	90.352	97			

a. Predictors: (Constant), INFLASI

b. Dependent Variable: GROWTH

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.445	.093		36.973	.000
	INFLASI	-.676	.028	-.928	-24.350	.000

a. Dependent Variable: GROWTH

```

REGRESSION
/MISSING LISTWISE
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
/NOORIGIN
/DEPENDENT B_PUBLIK
/METHOD=ENTER PAD .

```